Purnama Suwardi
Koloni Pengucilan
BOVEN DIGOEL
Prolog : Des Alwi
Epilog : Dr. Anhar Gonggong

PURNAMA SUWARDI

KOLONI PENGUCILAN BOVEN DIGOEL

Untuk Syifa Salsabila,
dan kepada
para digoelis
kusedekahkan Al Fatihah

Only one land which is named my motherland
It is prosperous because of effort given to it,
And that effort is my effort

(Rene de Clerq)

SAMBUTAN

Sesungguhnya masih amat sedikit orang yang mau meluangkan waktu untuk menulis sebuah buku sejarah. Apalagi buku kisah tentang orang-orang tertindas yang gigih memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan agar bangsanya menjadi manusia yang bermartabat.

Pada umumnya, sejarah adalah rangkaian cerita sukses para pemimpin yang lebih banyak menonjolkan nuansa heroik ketimbang menjelaskan sisi kelemahannya. Karena itulah mungkin Karl Marx menyebut bahwa tidak ada apa-apa dalam sejarah. Sebab sejarah hanyalah catatan perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan dan romantikanya. Arnold Toynbee menyebut bahwa sejarah tidak lebih adalah kisah sukses seorang pemimpin.

Purnama Suwardi, barangkali termasuk kelompok orang yang sedikit jumlahnya. Ia dengan tekun, setidaknya dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun mempersiapkan penulisan buku yang anda baca, "*Koloni Pengucilan Boven Digoel"*. Gagasan menulis buku ini bermula ketika ia melakukan perjalanan jurnalistik ke Tanahmerah Papua pada bulan Desember 1991. Reportase di TVRI yang dibuatnya ketika itu banyak mendapat respons dari berbagai kalangan, karena apa yang disampaikan kepada pemirsa tergolong *"documentary reports*" berisi kisah penderitaan dan sekaligus kegigihan putra-putra Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bangsanya.

Dalam ukuran sekarang, Boven Digoel adalah tempat yang sangat menyeramkan. Sebagai daerah penjara *"konsentrasi orang-orang buangan"* di jaman kolonial Hindia Belanda, kondisinya tentu jauh lebih buruk bila dibanding kamp-kamp konsentrasi kaum Nazi Jerman semasa Perang Dunia II. Sebab menurut sejarawan, Boven Digoel adalah kamp konsentrasi pertama di dunia pada saat masalah HAM belum mendapat perhatian.

Dengan membaca buku *"Koloni Pengucilan Boven Digoel",* kita akan memperoleh gambaran betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh manusia untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Kita berhutang budi teramat banyak kepada para pendiri negeri yang kita cintai ini. Kita harus membayar dengan memberikan sumbangan terbaik bagi negara yang dibangun dengan pengorbanan besar, sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri bangsa.

Sebagai teman diskusi dan sekaligus atasannya dalam bertugas di TVRI saat penyelesaian penulisan buku ini, saya patut menghargai

ketekunan Purnama Suwardi. Sekalipun latarbelakang pendidikan formalnya adalah sarjana ekonomi, ternyata ia lebih banyak menekuni bidang sastra dan sejarah. Ia pun pernah menerbitkan kumpulan transkrip wawancaranya di TVRI dengan tokoh-tokoh ternama dan pelaku mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dihimpun dalam buku berjudul "*Sejarah Indonesia Modern Dalam Dialog*". Buku tersebut ditulis ketika ia sedang "tidak difungsikan secara maksimal dalam tugas" oleh manajemen saat itu. Demikian pula buku *"Koloni Pengucilan Boven Digoel",* ditulis pada saat Purnama Suwardi dkk. "terbeku-tugaskan" selama setahun akibat adanya konflik manajemen TVRI.

Dalam menjalankan profesi, tugas reporter dan sejarawan memang ada kesamaan. Reporter menyajikan fakta atas suatu kejadian yang disampaikan secara aktual tanpa intepretasi. Sedangkan sejarawan menyusun rangkaian kejadian menjadi sebuah cerita yang berkesinambungan. Tetapi keduanya punya tugas yang sama. Frazer Bond penulis buku Journalism pada tahun 1960-an berkata bahwa *"the duty of the press is same duty of the historians that is seek out the thruth"* (tugas wartawan adalah sama dengan tugas sejarawan yaitu mengungkapkan kebenaran).

Semoga buku yang anda baca ini bermanfaat, setidaknya sebagai tambahan referensi. Selamat membaca dan terimakasih.

Jakarta, 10 Februari 2003
DIREKTUR PEMASARAN
Perusahaan Jawatan TVRI

Drs SUTRIMO, MM, MSi.

PENGANTAR

Jauh tahun sebelum pemerintah Nazi Jerman membangun kamp-kamp konsentrasi Auschwitz, Buchenwald, Belsen dan Birkeneu untuk memusnahkan ras Yahudi, di Hindia Belanda telah dibangun kamp konsentrasi untuk melumpuhkan perlawanan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan.

Kamp konsentrasi yang dibangun di tengah hutan belantara Nieuw Guinea, sekitar 500 kilometer dari muara Sungai Digoel itu dapat dikatakan merupakan kamp konsentrasi pertama di dunia.

Tujuan pembangunannya adalah untuk mempasifikasi dan membungkam semangat perlawanan tokoh-tokoh pergerakan melalui pemutusan total hubungan mereka dengan segala hal yang melatarbelakangi perlawanan terhadap kolonial Belanda. Dalam hal ini penetralan dilakukan dengan cara mengasingkan seseorang ke suatu tempat yang sama sekali berbeda adat-istiadat, bahasa, dan budayanya. Perbedaan tersebut setidaknya diyakini akan membuat seseorang menjadi frustrasi dan kehilangan orientasi serta melumpuhkan semangat perjuangannya.

Rasa terasing dan sepi yang ditimbulkan oleh tindakan pembuangan memang terbukti adakalanya dapat mematahkan semangat dan meruntuhkan moral seseorang. Namun demikian, apa yang terjadi di koloni isolasi Boven Digoel seperti yang diuraikan dalam buku ini menunjukkan bahwa pendigoelan ternyata sama sekali tidak melumpuhkan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda.

Di tengah kesunyian Boven Digoel yang dilingkupi hutan belantara yang terbilang liar, para digoelis justru memperoleh pembelajaran berharga tentang betapa pentingnya arti kebebasan bagi manusia dan kemerdekaan bagi suatu negara. Kedua hal itu tidaklah datang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan bersama, semahal apapun harga yang harus dibayarkan.

Banyak tokoh yang pernah diasingkan di Digoel dan banyak pula diantara mereka ternyata hanya petani dan pedagang yang tidak tahu-menahu soal politik. Mereka didigoelkan hanya lantaran terseret oleh pusaran peristiwa pemberontakan PKI tahun 1926/27 di Banten, Jawa Barat, dan Silungkang, Sumatera Barat. Kebanyakan dari mereka terprovokasi oleh PKI tanpa mengerti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan komunisme.

Terlepas dari persoalan tersebut, Boven Digoel memang harus diakui sebagai salah satu tempat persemaian bibit-bibit perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Banyak mantan tahanan Digoel yang kemudian tampil gemilang di panggung sejarah Indonesia Modern. Meskipun koloni Digoel sudah tidak ada dan bahkan hampir dilupakan orang, beberapa digoelis mengakui bahwa sangat sulit bagi mereka melupakan pengalaman semasa didigoelkan.

Buku berjudul *Koloni Pengucilan Boven Digoel* ini setidaknya diharapkan dapat memberi gambaran tentang betapa memprihatinkannya derita hidup yang dialami para digoelis, dirangkaikan dengan beragam peristiwa yang melatarbelakanginya, baik dari aspek politik, hukum dan ekonomi.

Jakarta, 10 Februari 2003

Purnama Suwardi

PENGANTAR CETAKAN II

Dalam cetakan II ini, buku *Koloni Pengucilan Boven Digoel* mengalami beberapa perbaikan dan perluasan kajian sehubungan diperolehnya data terbaru mengenai para digulis, fakta dan interpretasi atas sejarah yang terjadi. Sejalan dengan itu kesalahan-kesalahan redaksional dan penulisanpun diperbaiki dalam cetakan II ini.

Dengan demikian buku berjudul Koloni Pengucilan Boven Digoel ini diharapkan dapat lebih memberi gambaran tentang betapa memprihatinkannya derita hidup yang dialami para digoelis, dirangkaikan dengan beragam peristiwa yang melatarbelakanginya, baik dari aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Jakarta, ….., …………., 2006

Purnama Suwardi

PROLOG

MEMAKNAI KEMBALI KOLONI DIGOEL

Oleh: Des Alwi*

Tidak banyak kajian mengenai Boven Digoel ditulis orang lantaran sulitnya mendapatkan referensi, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang melatarbelakanginya, maupun proses menyangkut keputusan untuk membangunnya.

Boleh jadi hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan koloni Boven Digoel akibat cap *"koloni pengucilan bagi orang kiri"* yang diberikan pemerintah Hindia Belanda sejak koloni tersebut dibuka pada tahun 1927.

Kenyataan itu membuat pemahaman orang tentang makna koloni Digoel dalam peta sejarah gerakan kemerdekaan menjadi relatif terbatas dan bahkan terkesan terpotong-potong. Terlebih lagi 32 tahun kekuasaan Rezim Totaliter Orde Baru dapat dikatakan berjaya menanamkan *communisto phobi* kepada masyarakat melalui beragam penataran dan penyeragaman akal pikiran.Hal itu pada gilirannya membuat kesadaran menyejarah masyarakat relatif menjadi tidak dalam, sebab *sejarah senantiasa dibaca dalam teks atau kata, bukan dalam pemahaman konteks atau dunia*. Padahal sejarah bukan semata-mata urusan penanggalan peristiwa dan pemunculan deretan panjang nama tokoh yang terlibat, melainkan juga menyangkut kondisi sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sosio-politik kehidupan masyarakat pada zaman atau kurun waktu tertentu.

Membaca Digoel sesungguhnya bukan sekedar membaca betapa (berpotensi) menekannya suatu pemerintahan, melainkan juga betapa keras dan gigihnya manusia memperjuangkan hak dan kebebasannya. Hak yang diperjuangkan tersebut tidak hanya sebatas hak untuk memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga adalah hak untuk memberontak melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

* Pejuang, dilahirkan di Bandaneira 17 November 1927. Putra angkat Soetan Sjahrir dan Bung Hatta. Pernah hidup dalam pelarian di luar negeri karena ikut pemberontakan PRRI/Permesta. Mendapat Bintang Mahaputra dari pemerintah RI. Saat ini menjadi Ketua Yayasan 10 November 1945.

Koloni Digoel, memang bukan sekedar kamp konsentrasi pertama di dunia, melainkan juga menjadi tempat penting di mana bibit-bibit gerakan kemerdekaan disemaikan di tengah situasi pengap pemenjaraan yang sunyi menekan. Lebih dari seribu orang pernah dikucilkan di koloni ini. Mereka adalah orang-orang yang berani melawan cengkeraman tirani kolonialisme di tengah serba keterbatasan yang ada waktu itu.

Meskipun secara fisik mereka dikucilkan, akan tetapi daya jelajah pikiran mereka ternyata tidak dapat dibendung. Apabila kita bersetuju dengan pendapat mendiang Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy yang menyebutkan bahwa *negara boleh hancur, maju, dan berkembang, orang boleh hidup atau mati, tetapi ideologi hidup terus*, tampak sekali bahwa pemenjaraan dan pengucilan atas diri seseorang memang bukan cara yang ampuh untuk mematahkan keyakinan dan semangat untuk menggugat ketidakadilan dan tirani kekuasaan.

Daya hidup dan daya juang para digoelis mengajarkan kepada bangsa dan negara ini agar pertama-tama mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk keluar dari keterbelakangan sebelum mengandalkan orang lain.

Tradisi pengucilan sebagai bagian dari upaya untuk mematahkan semangat perlawanan seseorang memang memiliki sejarah yang panjang di dunia ini. Umumnya tradisi ini dilakukan oleh pemerintahan represif dan totaliter. Untuk kelas dunia saja, sejumlah nama besar korban pengucilan dapat dikemukakan dalam deretan yang panjang. Sastrawan pemenang hadiah Nobel asal Rusia, Alexander Solzhenitsyn dideportasi dari Uni Soviet setelah bertahun-tahun dipenjarakan di kamp Khazakstan akibat perlawanannya terhadap Stalin. Tahun-tahun panjang pemenjaraan tidak mematahkan semangat perlawanannya. Banyak karya sastra kelas dunia dihasilkannya, di antaranya yang terpenting adalah *One Day in the Life of Ivan Denisovich* dan *Gulag Archipelago*. Kedua buku tersebut menceritakan kekejian dan keras hidup dalam penjara dan kamp pengasingan pemerintah Totaliter Uni Soviet. Pada masa pemerintahan Leonid Breznev perjuangan Solzhenitsyn menegakkan martabat manusia bahkan dinilai sebagai tindak pembangkangan yang membahayakan pemerintah. Nobelis lainnya yang juga berasal dari Rusia, yakni pakar *bom hidrogen* terkemuka Andrei Shakarov diasingkan dan dipenjarakan di Gorki akibat protes-protes kerasnya terhadap sikap represif pemerintah Uni Soviet. Pemerintah Brasil juga pernah mengasingkan dan mengusir tokoh pemikir besar pendidikan abad ke-20, Paulo Freire, untuk

mencegah meluasnya pengaruh humanisme yang dijajakan Freire di Brasil.

Umumnya orang-orang yang pernah merasakan kejamnya pengasingan berkeyakinan bahwa kebebasan yang diperjuangkan harus dilahirkan oleh sikap bertanggung jawab atas diri sendiri tanpa mesti ditentukan oleh pihak lain.

Boleh saja manusia sebagai *intersubjektivitas* mempunyai kecenderungan untuk mengadakan hubungan antar sesama, namun demikian dibalik kecenderungan tersebut manusia tetap harus mempunyai keinginan untuk membuat dirinya menjadi sesuatu. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Paulo Freire yang menyebutkan bahwa pembuangan bukan semata-mata waktu hidup yang harus *dijalani* (dihayati), tetapi juga mencakup waktu hidup yang harus *diderita* (ditanggung).

Banyak di antara orang buangan adalah mereka yang solider terhadap derita sesama. Rata-rata mereka bukanlah orang yang berkeinginan menjadi penguasa, apalagi menjadi orang yang dikuasai. Mereka hanya berupaya menggugat sistem yang menghina martabat manusia sebab sebagai bagian dari sebuah sistem, manusia memang cenderung terbagi-bagi dalam struktur *homo sistemicus* itu sendiri. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang berkuasa dan ada pula yang dikuasai secara sistematis.

Tindakan pengasingan atau pembuangan terhadap diri seseorang pada prinsipnya merupakan upaya sistematis untuk menguasai sekaligus mempasifikasi manusia dengan cara melumpuhkan pikiran dan kesadarannya melalui pengkontrasan kondisi hidup dengan lingkungan barunya.

Bersandar kepada asumsi tersebut, tak pelak tindakan pembuangan sebagai bagian dari pemenjaraan acapkali dijadikan pilihan utama oleh pemerintahan totaliter untuk membungkam mereka yang berada diseberang jalan. Bagi pemerintah semacam itu kekuasaan adalah tujuan sehingga oposisi ditabukan sebab di dunia tidak boleh ada dua matahari.

Dikaitkan dengan kenyataan tersebut tidaklah mengherankan jika kekuasaan acapkali mengesampingkan hakikat dasar humanisme, padahal humanisme mempunyai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia.

Harus diakui, jalan panjang yang ditempuh manusia untuk menemukan dan meluruskan kembali hak-hak dasar berikut pranata-

pranata kerangka pemikiran dan kesadarannya memang adakalanya penuh onak-duri.

Benturan dengan penguasa dalam memperjuangkan hak-hak mendasar dimaksud seringkali harus dibayar dengan air mata dan darah. Pemenjaraan, pembuangan, dan pengucilan hanyalah bagian kecil dari derita yang harus ditanggung.

Sejarah membuktikan ada banyak orang yang berhasil bertahan dan ada pula yang terpatahkan dan terkalahkan dalam perjuangan menegakkan martabat manusia dalam arti menegakkan kebebasan dan kemerdekaan.

Sejarah sesungguhnya memang bukan sekedar catatan peristiwa semata, mata-hatinya adalah suatu keniscayaan yang segi buramnya diharapkan tidak berulang sebab hidup dan kehidupan yang dijalani manusia bukanlah *mite Sisiphus!*

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah panjang koloni Digoel sehubungan dengan upaya manusia menuju pencerahan diri melalui perjuangan panjangnya dalam membebaskan diri dari beragam belenggu yang meminimalkan hak-hak kodratinya.

Kekuasaan kolonial yang dengan gigih digugat oleh para digoelis adalah kekuasaan absolut yang dengan serakah tidak hanya merampas kebebasan, tetapi juga berupaya menguasai pikiran dan kesadaran manusia.

Kecenderungan ini -disadari atau tidak- ternyata acapkali berulang, bahkan setelah Indonesia merdeka. Demokrasi terpimpin Soekarno dan 32 tahun pemerintahan represif Orde Baru membuktikan kepada kita betapa *will to power* begitu mudah mengabaikan harkat hidup manusia.

Kekuasaan seringkali menempatkan orang hanya sebagai objek yang dapat diperlakukan sekehendak hati, terlebih jika orang tersebut memiliki cara pandang berbeda dengan penguasa.

Dalam konteks pengalaman pribadi, sekurangnya ada dua kali persentuhan yang penulis alami sehubungan dengan tindakan pemenjaraan dan pengucilan.

Yang pertama adalah pengalaman masa kecil di Bandaneira di mana penulis untuk pertama kalinya memahami makna *"orang buangan"*. Bandaneira kampung kelahiran penulis juga dipilih kolonial Belanda sebagai tempat pengucilan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan.

Sejumlah tokoh gerakan kemerdekaan sejak awal tahun 1930-an pernah diasingkan di Kepulauan Bandaneira. Mereka antara lain

adalah dr. Tjipto Mangoen Koesoemo, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir. Pada akhir abad ke-19 Bandaneira juga pernah dijadikan tempat pembuangan banyak tokoh dari Palembang, Banten, Aceh, dan Jawa yang dinilai pemerintah Hindia Belanda merongrong kekuasaannya. Mereka diasingkan di Bandaneira sampai tahun 20-an.

Penulis banyak mendapat pelajaran mengenai hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa dari Soetan Sjahrir, Bung Hatta, dr. Tjipto Magoen Koesomo, dan Mr. Iwa Koesoema Soemantri semasa mereka dikucilkan di Bandaneira.

Pengalaman kedua yang penulis alami lebih bersifat pribadi, yakni dalam kaitan keterlibatan penulis dengan pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1957. Pilihan untuk terlibat dalam pemberontakan tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa kekuasaan yang menindas memang harus digugat. Apalagi waktu itu pemerintah cenderung dekat dengan PKI.

Keterlibatan dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang intinya adalah menentang komunisme itu membuat penulis lebih dari sepuluh tahun terpaksa hidup di negeri orang untuk menghindari penangkapan Rezim Soekarno. Masa-masa sulit selama pelarian tersebut mengajarkan banyak hal kepada penulis mengenai betapa berharganya kebebasan. Akan tetapi, di atas semuanya itu ternyata hal paling berharga dan penting justru kemauan untuk tetap menjaga semangat perlawanan atau semangat untuk memberontak terhadap ketidak-adilan. Orang tidak boleh berpangku tangan saja menyaksikan kesewenang-wenangan yang menghina martabat manusia.

Dikaitkan dengan keberadaan koloni-koloni pengucilan yang pernah ada di tanah air, adalah tugas sejarah untuk memaknai sekaligus memposisikannya kembali dalam peta sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia. Digoel, Bandaneira, dan Ende, Flores, boleh jadi cuma noktah kecil di nusa persada Indonesia. Akan tetapi setidaknya keberadaannya pernah menjadi tali pengikat yang mempersatukan beragam gerakan kemerdekaan.

Khusus mengenai koloni Digoel, secara historis keberadaannya harus diakui ikut menjiwai persatuan Papua dalam koridor Indonesia. Sayangnya, jangankan memberi makna, Digoel sendiri sekarang hampir dilupakan orang, seperti juga orang (kekuasaan) melupakan Papua dalam konteks ekonomi dan pembangunan.

Papua saat ini hanya terintegrasi dengan Indonesia dalam arti politik dan bukan dalam arti sosio-ekonomi dan sosio-kulturalnya.

Kiranya inilah tragedi kita. Boven Digoel (baca Papua) yang pernah menjadi salah satu tempat persemaian semangat perjuangan melawan kolonisasi dan penindasan, sekarang justru dilupakan dan terlupakan.

Melalui buku berjudul *Koloni Pengucilan Boven Digoel* yang ditulis sdr. Purnama Suwardi ini diharapkan pemaknaan kembali Boven Digoel dapat dilakukan tanpa harus berpretensi macam-macam. Purnama Suwardi sendiri penulis kenal sebagai reporter dan pewawancara TVRI yang memiliki minat cukup luas terhadap pasang-surut sejarah bangsa. Sebelumnya ia telah menerbitkan buku berjudul *Sejarah Indonesia Modern Dalam Dialog* yang merupakan transkripsi wawancaranya dengan sejumlah tokoh penting pelaku sejarah di republik tercinta ini.

Akhirnya, memang harus diakui bahwa koloni Digoel adalah masa lalu yang tetap relevan direfleksikan dengan kenyataan pemenjaraan sehari-hari banyak di antara kita dalam rasa sepi atau *alienasi* yang membekukan kesadaran dan pikiran kita tentang betapa berharganya kebebasan yang saat ini terjalani.

BAB I

JEJAK

Penjajahan Belanda itu menghimpun kekuatan dengan perkawinan ratio-modern dengan feodalisme Indonesia, sehingga menjadi contoh fasisme yang terutama dari fasisme di bumi. Fasisme ini jauh sebelum fasisme Hitler dan Mussolini. Jauh sebelum mereka mendirikan kamp-kamp konsentrasi Buchenwald atau Belsen, Boven Digoel sudah lebih dulu diadakan.

Soetan Sjahrir

Hari masih terlalu pagi dan matahari seakan ragu menohokkan tombak-tombak sinarnya ke perut bumi ketika kami tiba di Tanahmerah, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Merauke Irian Jaya, pada suatu pagi, Desember 1991. Bagi kami, perjalanan di bumi harapan bernama Irian Jaya yang sekarang kembali disebut Papua ini merupakan perjalanan pemuasan obsesi yang tahunan lamanya terendapkan dalam alam bawah sadar.

Kami sepenuhnya menyadari, banyak kali keakbaran bumi cenderawasih tergilas oleh roda waktu akibat kecilnya kepedulian sosial yang diejawantahkan dalam beragam darma dan perkabaran.

Bagi banyak orang, terutama manusia metropolitan, Irian Jaya tampaknya hanya sekedar nama dalam peta. Ia nyaris dilupakan dan terlupakan dalam kebersahajaan sosio- ekonomi dan sosio-kultural serta sosio-politiknya.

Diakui atau tidak, kendati sumberdaya alam Irian Jaya demikian berlimpah, ternyata tingkat kehidupan rata-rata penduduk aslinya masih jauh dari kata sejahtera. Delapan puluh persen dari 1,6 juta penduduk Irian Jaya hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembangunan karena keterbatasan kemampuan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh.

Tidak terlepas dari obsesi mengangkat secara utuh ragam kehidupan masyarakat Irian Jaya, perjalanan yang kami lakukan sengaja dimuarakan di Tanahmerah Kabupaten Merauke. Ibu Kota Kecamatan Mandobo ini dahulu dikenal sebagai Boven Digoel, suatu

perkampungan penjara sekaligus tempat pengasingan tokoh-tokoh perintis pergerakan kemerdekaan.

Berbeda dengan kamp-kamp konsentrasi yang dibangun Nazi Jerman, di kamp Digoel pemerintah koloniall Belanda tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dikucilkan. Namun demikian hakikat dari keberadaannya tetaplah sama, yakni sebagai tempat untuk mengucilkan sekaligus menghukum orang-orang yang tidak disukai pemerintah. Tentunya dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang menjalankan kebijakan yang ketatt melawan aspirasi pihak oposisi.

Kini, kendati musim terus berganti dan dinamisme hidup tanpa ampun diseret oleh perjalanan waktu ke arah modernisasi, ternyata Boven Digoel (perkampungan perjuangan yang bermakna sungai di tengah rimba belantara) kelihatannya masih tidur dalam keterpencilannya.

Dinamisme hidup di kota berpenduduk sekitar tiga ribu jiwa ini berjalan begitu lamban akibat isolasi transportasi dan isolasi informasi.

Penyimakan terhadap ragam kehidupan sehari-hari Boven Digoel secara nyata menyeret kami ke alam lamunan tentang sisi paling *nelangsa* perjuangan para pendiri republik. Kami seakan mencium kembali jejak semangat mereka pada beragam bebungaan dan bahkan pada bau Sungai Digoel.

Harus diakui, setelah sekitar 65 tahun berlalu sejak dibuka sampai kunjungan kami pada tahun 1991, Boven Digoel tidak banyak berubah. Sungai Digoel tetap keruh di tengah pasang surut waktu. Yang tersisa hanyalah kenangan yang secara niscaya juga akan dipupus oleh jarak, waktu dan peristiwa. Ribuan penghuni kamp isolasi Boven Digoel termasuk Bung Hatta dan Soetan Sjahrir kini telah tiada. Kehidupan terus juga berlangsung menurut ketentuan yang telah diguratkan Tuhan.

Adalah kenyataan yang sulit dimungkiri, kendati tahun demi tahun terus juga berlalu, nuansa sendu Boven Digoel masih dapat kita bayangkan. Betapa tidak, sejak penjara Digoel dibuka pada tahun 1927 hingga ditutup pada tahun 1942, lebih dari 1.300 pejuang dan perintis kemerdekaan secara keji pernah diasingkan dalam keliaran tak bersahabat belantara Digoel. Pemerintah kolonial Belanda waktu itu secara total dan tanpa kompromi mencoba mengunci habis segala aspek perjuangan putra-putri terbaik bumi pertiwi. Waktu itu warna buram kehidupan para digoelis selain ditandai dengan siksa derita juga

diwarnai tiga hal utama. Pertama adalah *malaria*, kedua *tuberkulosa*, dan ketiga *penyakit gila* atau *gangguan syaraf* akibat keterasingan dan kesepian.

Ketiga hal itu menjadi musuh utama peradaban di tengah deraan keras hutan tropis Boven Digoel yang dipenuhi buaya dan keganasan suku Kaya-Kaya yang mempunyai tradisi mengayau atau memenggal kepala orang.

Dalam rentang waktu 1927 hingga 1942, kematian akibat *dimakan buaya* dan *dikayau suku Kaya-Kaya* bukanlah hal yang istimewa di Digoel. Tragedi seperti itu merupakan warna buram kehidupan yang dengan mudah terlupakan oleh sejarah.

Membayangkan semuanya itu, mau tidak mau kami sampai pada kesimpulan, bahwasanya kamp konsentrasi Boven Digoel dilahirkan oleh obsesi kekuasaan yang paling tidak bertanggungjawab di muka bumi ini. Motor utama pembangunan kamp isolasi Boven Digoel adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, de Graeff dan pelaksananya adalah perwira kolonial Belanda bernama Kapten L. Th Becking yang sebelumnya berperan penting dalam penumpasan pemberontakan PKI di Banten.

Arsitek kamp isolasi Digoel ini adalah para ilmuwan orientalis yang sehari-harinya berkantor di *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenchappen* (sekarang Museum Nasional). Mereka antara lain adalah Profesor B.J.O. Schrijke, Dr. D.A. Rinkes, dan Maijer Ranneft. [1]

Obsesi pemerintah Hindia Belanda membangun tempat pengasingan di Irian Jaya akhirnya terpenuhi di Digoel. Di tengah keterpencilan Kawasan Digoel mereka membangun kamp isolasi yang terdiri atas tiga bagian, yakni Tanahmerah atau Digoelatas, Gudangarang, dan Tanahtinggi.

Pilihan untuk membagi tiga kamp isolasi itu tidak hanya untuk mematahkan semangat perlawanan para tokoh pergerakan, tetapi juga untuk membunuh secara perdata dan menebar darah serta dosa dalam kesenyapan belantara Digoel.

---

[1] Berdasarkan catatan S.L. Van der Wal, De Opkomst van de Nasionalistische Beweging in Nederlands-Indie, Grononingen: J.B. Wolters, 1967, hal 201.

Sesungguhnya memang agak sulit melacak referensi pemerintah kolonial Belanda dalam membangun Digoel. Akan tetapi tampaknya pembangunan koloni isolasi tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah awal memperluas daerah jajahan ke Irian, sekaligus guna mempasifikasinya dengan membuka hutan-hutan perawan untuk perkebunan karet, kopi, dan tanaman ekspor lainnya. Paling tidak tujuan sampingan ini pernah dinyatakan oleh Maijer Rannefft di Volksraad. [22]

Penjara Digoel yang dibangun Kapten L. Th Becking pada tahun 1927, kini tetap tinggal dalam keasliannya. Penjara tersebut tampak kaku dan sangat tidak bersahabat. Ilalang dan rumputan mulai menyemaki hampir seluruh pelatarannya. Suatu anekdot zaman:jika dahulu penjara tersebut yang disemaki manusia, kini pelatarannya disemaki rumput, sementara sel-sel sempit penjara tersebut kosong, dingin dan kaku.

Hingga berakhirnya masa penjajahan Belanda, dari 1.308 pejuang yang disekap dalam penjara Tanahmerah, tercatat 300 di antaranya meninggal dunia dalam status tahanan. Mereka tidak pernah diadili, namun langsung divonis.

Luas penjara Tanahmerah seluruhnya mencapai dua hektare, terdiri atas sel-sel khusus dan barak-barak tahanan. Penjara Digoel dikelilingi tembok setinggi enam meter dan kawat berduri. Di tengah-tengah kawasan penjara terdapat rumah penjara dengan ruang utama berukuran 5 m X 8 m, tinggi enam meter. Selain itu juga terdapat beberapa sel berukuran 2 m X 3 m. Sel-sel penjara Digoel tidak dilengkapi ventilasi yang memadai.

Kapten Becking tampaknya tidak berpuas diri hanya dengan bangunan sel-sel di atas tanah itu saja. Ia juga membangun sel bawah tanah berukuran 2 m X 3 m untuk menyekap tokoh-tokoh yang dinilai sangat berbahaya. Sel bawah tanah penjara Digoel tidak memiliki sarana penghubung ke dunia luar selain satu tangga tua.

Pada tahun 1935-1936, Mohammad Hatta (kemudian Wakil Presiden RI) dan Soetan Sjahrir (kemudian Perdana Menteri RI), pernah diasingkan di Boven Digoel yang sekarang lebih dikenal dengan nama Tanahmerah. Meskipun kedua tokoh itu tidak disekap dalam

---

[2] Mededelingen der Regeering Omtrent Enkele Onderwegen van Algemeen Belang, Mei, Landsdrukkerij, 1929, hal 10-12.

penjara Digoel, isolasi daerah dipandang oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pilihan paling tepat untuk membungkam aktivitas politik kedua tokoh bangsa itu.

Selama menjadi digoelis, baik Hatta maupun Sjahrir memang tidak terpatahkan semangatnya oleh kerasnya alam dan rasa sepi yang menggigit. Soetan Sjahrir bahkan menuangkan pengalaman dan pemikiran-pemikirannya selama di Digoel melalui surat-surat kepada istri Belandanya yang kemudian dihimpun dalam buku *Indonesische Overpeinzingen* yang diterjemahkan oleh H.B. Jassin dengan judul *Renungan dan Perjuangan***.** Selama setahun masa pengasingan di Digoel kedua tokoh itu bahkan menjadi tempat bertanya bagi sesama pejuang lainnya.

Mereka acapkali memperbincangkan berbagai aspek perjuangan menuju Indonesia merdeka. Kursus-kursus politik yang dilakukan secara informal di Bumi Digoel, disadari atau tidak, telah membuka cakrawala kebangsaan para Digoelis secara lebih luas. Sekurang-kurangnya kenyataan itu dapat disimak dari tulisan I.F.M. Chalid Salim berjudul *Lima Belas Tahun Digul, Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea,* dan *Tanah Merah, Digul Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia* karangan A. Hasjmy, serta banyak lainnya lagi. Dalam beberapa tulisan, Bung Hatta juga banyak menyinggung dinamisme kehidupan politik selama masa didigulkan. Hal serupa juga dilakukan Sayuti Melik, Mukhtar Luthfi, Abdoel Xarim Ms, Wiranta, dan lain-lain.

Hal yang paling menggembirakan yang kami rasakan dalam perjalanan di Tanah Merah adalah ketika berjumpa dengan Albertina Goube yang akrab dipanggil sebagai Mama Goube [3] . Wanita asal suku Muyu itu mengaku pernah menjadi putri angkat Bung Hatta semasa pengasingan di Digoel. Sewaktu diangkat sebagai anak oleh Bung Hatta, Mama Goube masih menggunakan cawat dan belum berpakaian seperti layaknya perempuan saat ini. Ia diangkat sebagai anak oleh Bung Hatta ketika berumur 15 tahun. Tugas utamanya waktu itu adalah mencuci pakaian dan memasak makanan untuk Bung Hatta.

Di tengah deras perjalanan waktu, Mama Goube tampak masih sehat dan segar. Wanita sederhana itu hidup berbahagia dengan anak-cucunya. Sumber utama penghasilannya berasal dari sepetak kebun miliknya.

Mama Goube sangat menghormati bapak Hatta-nya, bahkan ia berkeinginan kuat datang ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga Bung

---

[3] Wawancara: 16 Desember 1991.

Hatta. Kerinduannya terhadap keluarga Bung Hatta memang tidak berlebihan. Perempuan tua suku Muyu ini hanya memiliki kenangan tentang Bung Hatta. Menurutnya, Bung Hatta pernah mengunjunginya sekali. Waktu itu ia mendapat aneka hadiah dari Bung Hatta, malangnya sebelum hadiah-hadiah itu sempat dibuka, pencurii menjarahnya tanpa sisa.

Jika kita menghulu Sungai Digoel sekitar 40 kilometer dari penjara Tanahmerah, tepatnya di ceruk bukit kecil di pinggir rawa-rawa Sungai Digoel, terdapat bekas-bekas tempat pengasingan tokoh perintis kemerdekaan yang dinilai oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai orang-orang tahanan yang sulit diatur. Di tempat ini Kapten Infantri L.Th. Becking membangun penjara yang kemudian dikenal sebagai penjara Tanahtinggi seperti yang sudah disinggung sebelumnya.

Penjara Tanahtinggi yang diperuntukkan bagi para tahanan keras kepala itu berukuran 9 m X 15 m. Kendati penjara Tanahtinggi kini tinggal puing belaka, tak urung lebih dari 125 pejuang dan perintis kemerdekaan pernah merasakan kekejamannya. Di penjara Tanahtinggi mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Seorang saksi hidup yang secara rutin mengunjungi penjara Tanahtinggi, Petrus Komayap [4], mengatakan bahwa keadaan kesehatan para pejuang yang ditawan Belanda waktu itu memang sangat menyedihkan. Catu makanan mereka sehari-hari hanya terdiri atas lima genggam beras, lima siung bawang, lima cabai, lima sendok gula, lima sendok teh, dan lima sendok kopi. "Tiga bulan sekali para tahanan Tanah Tinggi memperoleh tiga stel pakaian dari pihak kolonial", lanjut Petrus Komayap.

Keterangan Petrus Komayap yang pada masa penjajahan Belanda bertugas sebagai sipir penjara sekaligus kurir makanan bagi para tahanan di Tanahtinggi secara jelas memberikan gambaran tentang derita hidup yang dirasakan para tahanan.

[4] Wawancara: Tanggal 15 Desember 1991.

PETA KOLONI PENGUCILAN BOVEN DIGOEL
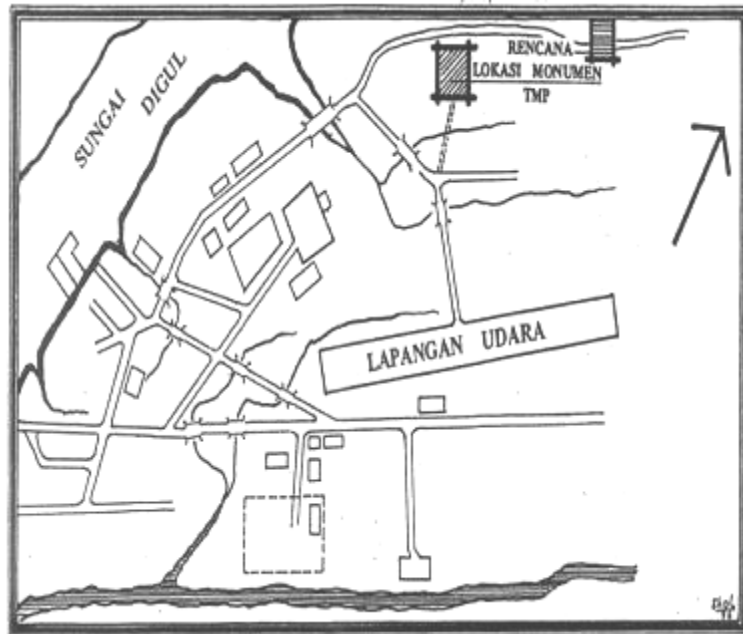
Saat ini data lengkap mengenai identitas para tokoh pergerakan yang diasingkan, baik di penjara Tanahmerah mapun penjara Tanahtinggi, semakin sulit didapatkan. Tampaknya kemudian hari kenangan mengenai keberadaan tokoh-tokoh tersebut bisa jadi sepenuhnya akan hilang digilas roda waktu. Saat ini saja kebanyakan mereka seakan telah dilupakan dan terlupakan oleh sejarah. Padahal pertanyaan kepada sejarah harus terus dimunculkan sebab pertanyaan tersebut pada hakikatnya adalah pertanyaan kritis kepada diri sendiri mengenai dasar kebijaksanaan kemanusiaan.

Tragis memang menyaksikan kesadaran menyejarah manusia yang semakin tipis dari waktu ke waktu akibat digilas berbagai beban kehidupan !.

Penjara Tanahtinggi sekarang telah berubah kembali menjadi bagian hutan belantara di tepian Sungai Digoel. Untuk menemukan puing-puingnya cukup susah mencarinya. Dan itu harus dicari sendiri.

Kamerawan Harlen W. Hutagaol dan Reporter Purnama Suwardi dalam suatu ekspedini ke Kawasan Penjara Tanahtinggi, Desember 1991

BAB II

POLITIK PENGASINGAN PEMERINTAH HINDIA-BELANDA

Pada tanggal 20 Maret 1602 Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) itoe diberi idzin (oetradi) oleh negeri (Algemeene Staten) boeat dibilang permoelaan berdirinja peperentahan Belanda di Hindia. Itoe waktoe jang diperloekan hanja perdagangan dan membikin beberapa kantor-kantor dagang dimana-mana tempat. Tetapi moelai itoe waktoe ada tanda-tanda djoega boeat melebarkan peperentahan Belanda akan menakloekan Hindia, dan maksoed itoe poen bisa kesampean, jang sekarang di mana Nederlandsch-Indie, jaitoe seloeroeh tanah Djawa dan (tiga perempat) dari poelau-poelau Hindia

(Marco Kartodikromo; Babad Tanah Djawa)

Secara garis besar, masa kolonialisme Hindia Belanda di tanah air dapat dibedakan ke dalam dua periode. Pertama adalah Masa Kolonialisme Lama dan kedua adalah Masa Kolonialisme Baru.

Masa Kolonialisme Lama ditandai dengan beragam kontrak yang dilakukan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) dengan Raja-Raja Mataram, khususnya sejak Amangkurat I sampai dilakukannya Perjanjian Gianti pada tahun 1755. Persekutuan Dagang Hindia Belanda, VOC yang didirikan pada bulan Maret 1602 di Amsterdam, pada prinsipnya ditujukan untuk memonopoli perdagangan di Kepulauan Hindia Timur. Pada awal keberadaannya di Hindia Belanda, kongsi dagang itu tidak mempunyai kekuasaan yang berarti. Namun setelah menerapkan sistem perdagangan monopoli di Kepulauan Banda, VOC memandang perlu mengangkat gubernur jenderal untuk melegitimasi dan menjamin kepentingannya.

Berbagai peraturan yang merugikan rakyat kemudian dikeluarkan VOC, seperti memberlakukan pelayaran *hongi tochten*[5], merusak tanaman rakyat untuk menjamin stabilitas harga dan mengeluarkan peraturan-peraturan sepihak yang hanya menguntungkan VOC. Akibatnya perlawanan rakyat pun mulai bermunculan pada beberapa daerah. Dan karena sifatnya lokal serta

---

[5] Hongitochten : *Perjalanan menghancurkan kebun-kebun (rakyat) dengan maksud untuk mempertahankan harga harga komoditas yang dimonopoli.*

tidak terorganisasi dengan baik, perlawanan-perlawanan tersebut dapat ditumpas dengan mudah.

Sampai abad ke-17 VOC dapat dikatakan merupakan suatu kekuatan politik yang utama di Jawa. Persekutuan Dagang Hindia Belanda itu menguasai banyak pelabuhan penting dan kawasan pesisir di nusa persada. Akan tetapi memasuki abad ke-19, Persekutuan Dagang Hindia Belanda, VOC, mulai mengalami kemunduran tajam akibat korupsi yang merajalela di kalangan pengurusnya[6].

Runtuhnya dominasi ekonomi VOC di Hindia Belanda sekaligus menandai pula keruntuhannya di bidang politik. Pada tahun 1800 seluruh Wilayah Indonesia secara politis jatuh ke dalam tangan pemerintahan kolonial Belanda. Diawali oleh kepemimpinan tangan besi Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1811-1816), Hindia Belanda memasuki suatu Era Kolonial Baru yang jauh lebih modern. Di Belanda Herman Willem Daendels dikenal sebagai pengacara ulung dan juga aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ia terbilang tokoh politik yang reaksioner dan revolusioner di Belanda. Penunjukkannya sebagai Gubernur Jenderal oleh Raja Belanda waktu itu, Louis Bonaparte (saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte, Perancis), bukan semata untuk koloni Hindia Belanda saja, melainkan juga mencakup semua daerah jajahan Belanda di Timur Jauh.

Daendels menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi dalam rangka mempertahankan semua daerah jajahan Belanda di Timur Jauh, terutama Pulau Jawa. Pada masa pemerintahannyalah dibangun jalan dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur. Pembuatan jalan dengan mengerahkan tenaga rakyat melalui kerja paksa itu memakan korban tidak sedikit. Hal itu kemudian mempersubur kebencian rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Perubahan dari kolonialisme VOC ke kolonialisme Hindia Belanda yang dimulai pada masa pemerintahan Daendels tentunya membawa perubahan pula yang cukup mendasar terhadap struktur masyarakat negeri jajahan.

Setidaknya kolonialisme modern Hindia Belanda kemudian terbukti membuat masyarakat makin dikekang dan ditindas oleh sistem ekonomi penjajah. Dalam hal ini rakyat bumiputra diperlakukan sebagai budak di rumah sendiri akibat diskriminasi ras dan kelas.

---

[6] Boxer, C.R, *Jan Kompeni, Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*, (Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1983), hal 113-115

Pada banyak daerah tekanan hidup akibat tindakan represif pemerintah Belanda dari hari ke hari terus meningkat.

Tekanan hidup yang dirasakan rakyat terutama terasa setelah pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Sistem Tanam Paksa* atau *Cultuurstelsel* pada tahun 1830 dan *Undang-Undang Agraria* pada tahun 1870. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar legalitas pemerintah kolonial dalam mengembangkan imperialisme ekonomi di Hindia Belanda dengan cara memaksa rakyat menanam berbagai komoditas pertanian dan perkebunan tertentu yang menguntungkan Belanda.

Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa dimulai pada tahun 1836 di Jawa atas inisiatif Van Den Bosch, seorang tokoh Hindia Belanda yang berpengalaman menjalankan sistem tersebut di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Boch menjalankan sistem tanam paksa antara lain adalah untuk mentransformasikan Pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, yang keuntungan penjualannya terutama mengalir ke kantong keuangan Belanda.

Melalui *cultuurstelsel,* Van den Bosch yang diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, selanjutnya mengarahkan produksi Hindia Belanda kepada berbagai komoditas yang *keras permintaannya* di pasaran dunia. Atas dasar itulah kemudian rakyat dipaksa dan diancam agar menanam kopi, gula, nila, tembakau, teh, lada, kayu manis, dan sebagainya.

Guru besar Universitas Leiden, Professor Cornelis Fasseur, dalam suatu penelitian menyangkut pelaksanaan *cultuurstelsel* menyebutkan bahwa pada tahun 1840 sekitar 75,5 % penduduk Jawa dikerahkan untuk menyukseskan *cultuurstelsel* tersebut. Persentase keterlibatan rakyat dalam *cultuurstelsel* itu cukup berfluktuasi, umpamanya pada tahun 1850 turun menjadi 46%, tetapi pada tahun 1860 naik lagi menjadi 54,5 %[7].

Pada masa awal pelaksanaannya, sistem tanam paksa memang mendatangkan keuntungan tidak sedikit bagi Belanda. Paling tidak hal itu tergambarkan dari perkembangan penjualan kopi dari Sumatera Barat[8] (lihat tabel). Sebelum mendapat kritik tajam dari kaum liberal di Belanda dan dihapus pelaksanaannya pada tahun 1870, nilai penjualan

---

[7] *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1996), hal 54.

[8] Ibid, hal 64.

kopi Sumatera Barat tercatat relatif tinggi. Kendati di Jawa *cultuurstelsel* telah dihapus pelaksanaannya pada tahun 1870, di Sumatera Barat *cultuurstelsel* masih tetap dijalankan untuk beberapa waktu lamanya. Pelaksanaanya lebih didasarkan kepada sikap curang aparat pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat. Hal itu pada gilirannya akan mendatangkan tidak saja protes rakyat, tetapi juga mendorong timbulnya perlawanan bersenjata rakyat Minangkabau.

Sejalan dengan pelaksanaan *cultuurstelsel,* pada tahun 1863 pemerintah kolonial membangun jalan kereta api yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta/Solo. Tujuan pengadaan lintasan kereta api tersebut adalah untuk menjamin kekuasaan politik dan ekonomi Belanda atas dua kerajaan utama di Pulau Jawa waktu itu. Di Sumatera pada tahun 1883 *Deli Spoorweg Maatschappij* membangun pula jaringan kereta api untuk mendukung transportasi hasil-hasil perkebunan di Sumatera Utara[9] . Pengadaan jalur kereta api baik di Jawa maupun di Sumatera tentunya tidak terlepas dari tujuan-tujuan *cultuurstelsel.*

KEUNTUNGAN PEMERINTAH BELANDA
(dalam Gulden)

Tahun	Kopi	Gula	Nila	Cochinela
1840-44	40.277.637	8.217.907	7.835.77	20.421
1845-49	24.549.042	4.136.060	7.726.362	519.661

Sumber: Fasseur 1992:37

PENJUALAN KOPI SUMATERA BARAT 1842-1906
(dalam jutaan kilogram)

No.	Tahun	Terjual	Rata-rata setahun
1.	1842-1846	23.1	4.6
2.	1847-1851	20.0	4.0
3.	1852-1856	40.0	8.0
4.	1857-1861	45.8	9.2
5.	1862-1866	43.7	8.7
6.	1867-1871	49.6	9.9
7.	1872-1876	35.5	7.1
8.	1877-1881	37.0	7.4
9.	1882-1886	30.4	6.1

[9] Suharto, A. Sandiwan, *Perkeretaapian Indonesia*, *Sebuah Tantangan* (Jakarta, Manajemen, PPM No.16. Tahun III, Mei-Juni 1983), hal 6-7.

10.	1887-1891	21.2	4.2
11.	1892-1896	14.4	2.9
12.	1897-1901	11.9	2.4
13.	1902-1906	10.1	2.0

Sumber: Young 1988.

Dalam melaksanakan *cultuurstelsel*, kolonial Belanda berusaha sedapat mungkin tidak berurusan dan berhubungan langsung dengan petani. Penyelenggaraannya umumnya diserahkan kepada para bupati dengan segenap jajarannya.

Kepentingan pihak Belanda dalam hal ini hanya sebatas pada hasil semata. Untuk memberi jaminan agar hasilnya sesuai dengan rencana. Kolonial Belanda menugaskan para kontrolir yang jumlahnya mencapai 90 orang pada tahun 1860.

Agar para kontrolir giat bekerja, kepada mereka diberikan persentasi tertentu dari hasil panen atau *cultuurprocent*. Untuk mencapai *cultuurprocent* yang tinggi banyak kontrolir berlaku kejam dan sewenang-wenang kepada para petani.

Sesungguhnya, sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel* pelaksanaannya memang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri Belanda, terutama masalah likuiditas atau keuangan. Caranya adalah dengan menghisap rakyat negeri jajahan melalui, antara lain, ketetapan agar rakyat menanam tanaman yang telah ditentukan pemerintah dan membayar pajak sebanyak kira-kira seperlima dari luas tanah bagi desa-desa di seluruh Jawa.

Undang-Undang Agraria yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menguasai tanah guna perkebunan, menggantikan sistem tanam paksa yang dianggap terlampau represif dan eksploitatif[10].

Politik pertanahan Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) yang ditambahkan pada konstitusi 1854 yang mengatur kedudukan Belanda atas Hindia Belanda, khususnya sebagai pelaksanaan *Pasal 62*, sepenuhnya memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda.

Di bawah Undang-Undang Agraria itu, pengusaha swasta diberikan tanah-tanah negara dengan hak penyewaan untuk jangka

---

[10] Hutagalung, Arie Sukanti, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Press, 1985), hal 27.

waktu 75 tahun. Hak sewa yang disebut *erfpacht* itu tentunya sangat merugikan masyarakat sebab selain pihak swasta diberi hak sewa atas tanah selama 75 tahun, dalam praktiknya hak tersebut dilengkapi pula dengan penyediaan tenaga kerja dan pengairan untuk kepentingan usahanya.

Peraturan dalam bidang pertanahan itu tentunya mendatangkan kekecewaan yang mendalam pada kalangan kaum kapitalis pribumi Hindia Belanda. Akibat pemberlakuan *Agrarische Wet* itu, banyak tanah rakyat dan tanah ulayat diakui sepihak sebagai tanah negara oleh pemerintah kolonial sebab tanah-tanah tersebut tidak memiliki sertifikat yang menunjukkan kepemilikannya. Didukung oleh *Agrarisce Besluit* (Beslit Agraria) yang dikeluarkannya, pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahwa tanah yang dikuasai berdasarkan hak ulayat pada saat itu dianggap sebagai *Tanah Negara Bebas* dan tanah yang dimiliki oleh perseorangan dianggap sebagai *Tanah Negara Tidak Bebas*. Sebagai akibatnya, kebanyakan tanah di Hindia Belanda dimiliki oleh perusahaan swasta. Petani, penduduk pribumi hanya dapat mengolah tanah sebagai buruh tani. Selain itu, rakyat yang dalam hal ini dijadikan tenaga perahan untuk kerja kasar pada banyak perkebunan swasta yang memperoleh konversi tanah juga mulai merasakan penderitaan hebat akibat perlakuan sewenang-wenang para tuan kebun Belanda[11].

Ketidakadilan dalam pola redistribusi tanah akibat pemberlakuan Undang-Undang Agraria tersebut setidaknya tergambarkan dalam komposisi pemilikan dan pemanfaatan lahan produktif yang sampai tahun 1940 dari sekitar 7,5 juta hektare tanah yang dapat ditanami, hampir tiga juta hektare di antaranya dikuasai oleh 2.977 perusahaan swasta di Hindia Belanda.

Sejalan dengan upaya kolonial Belanda meningkatkan pemasukan dalam negerinya dengan cara mengeksploitasi negeri jajahannya melalui *cultuurstelsel* dan Undang-Undang Agraria, maka dipandang perlu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan bisnis Belanda kepada masyarakat. Atas dasar ini, pada tahun 1808 Daendels memerintahkan para bupati di Pulau Jawa agar melaksanakan pengajaran kepada rakyat berdasarkan adat-istiadat, undang-undang, dan pokok-pokok pengertian keagamaan, khususnya agama Islam.

---

[11] Jacoby, Erich, *Agrarian Unrest in South East Asia* (Publishing House, 1961), hal 56.

Perintah tersebut sekaligus menandai suatu era saat mana pendidikan dan pengajaran tidak lagi merupakan monopoli golongan atas saja.

Pada tahun 1818 masa pemerintahan Daendels berakhir karena kekuasaan atas Pulau Jawa jatuh ke tangan pemerintah Inggris, padahal Daendels menghendaki agar sekolah dibuka pada tiap distrik, belum terlaksana. Namun demikian harus diakui bahwa pemerintahan Daendels-lah untuk pertama kalinya mengakui pentingnya memberikan pengajaran kepada rakyat. Kewajiban untuk itu tentu saja berada di tangan pemerintah sebab pengajaran yang diberikan tidak boleh terbatas kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, tetapi juga diharapkan merata pada semua lapisan masyarakat.

Harus diakui bahwa tujuan pendidikan selama periode kolonial memang tidak pernah dinyatakan dengan tegas. Meskipun begitu, tampaknya tujuan pokoknya antara lain sekedar untuk memenuhi keperluan tenaga buruh bagi kepentingan kaum modal Belanda. Itu sebab mengapa umumnya penduduk hanya dididik untuk menjadi buruh tingkat rendah. Ada juga di antaranya yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lain yang diangkat sebagai pekerja klas dua atau klas tiga.

Baik sistem tanam paksa maupun Undang-Undang Agraria dan juga pendidikan serta pengajaran kepada rakyat seperti diuraikan tadi merupakan pranata hukum untuk mengontrol ketertiban dan kepatuhan rakyat atau *rust en orde* terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Tindakan represif dan eksploitatif pemerintah Hindia Belanda melalui pranata-pranata hukumnya itu kemudian bermuara pada berbagai tindak perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Peperangan dan pemberontakan pada berbagai daerah mewarnai masa penjajahan Belanda pada abad ke-19 hingga empat dekade pertama abad ke-20.

Di Pulau Jawa, pemberontakan dan perlawanan yang cukup berarti dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri di Sumatera Barat yang digerakkan oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, Tuanku nan Renceh, Haji Miskin, Tuanku Tambusai, dll, berlangsung sengit dari tahun 1820 hingga 1837, sedangkan pemberontakan Batipuh untuk mengusir Belanda dari Padang Darek terjadi pada tahun 1841.

Masih di Sumatera, pada 26 Maret 1873 meletus pula perang Aceh yang berlangsung hampir 50 tahun dikomandani oleh Teuku Umar, Teungku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, Panglima Polem, Cut

Meutia, dll. Perang Aceh dicatat sejarah sebagai perang terbesar dan terlama melawan kolonial Belanda. Untuk mengatasi perang Aceh pihak Belanda menerjunkan sejumlah jenderal untuk menumpasnya, diantaranya adalah Jenderal Kohler, Spelman, Van Daelan, dan Van Heutz. Berbeda dengan kebanyakan peperangan di daerah lainnya, perang Aceh tidak terkait dengan kebijaksanaan kerja paksa dan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah kolonial.

Memasuki abad ke-20, pemberontakan rakyat terus terjadi seperti *perang belasting* atau perang pajak di Kamang Sumatera Barat pada tahun 1908. Perang yang intinya menentang kapitalisme perkebunan di mana rakyat menolak membayar pajak yang sangat memberatkan itu justru terjadi 30 tahun setelah sistem tanam paksa dihapuskan. Khusus untuk daerah Sumatera Barat secara diam-diam sistem itu terus dijalankan oleh kolonial Belanda, terutama untuk tanaman kopi.

Dipengaruhi oleh perubahan situasi dunia akibat Perang Dunia Pertama, revolusi Bolshevyk, Cina, dan India, serta keberhasilan Jepang menyerbu Rusia, semangat perlawanan kaum intelektual dan setengah intelektual di Hindia Belanda kemudian mulai bermunculan pada dekade kedua abad ke-20. Partai-partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Hindia Belanda selanjutnya tampil kepermukaan untuk mengorganisasikan perlawanan secara lebih terencana.

Perlawanan terencana secara modern terhadap kolonial Belanda pada pertengahan dekade kedua abad ke-20 ditandai dengan pemberontakan PKI di Banten dan beberapa daerah lainnya di Jawa pada bulan November 1926, dan pemberontakan Silungkang di Sumatera Barat pada awal tahun 1927.

Pemberontakan PKI tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff [12] yang sebelumnya dikenal lunak, terpaksa berlaku keras dengan membatasi ruang gerak para pejuang, bahkan memenjarakan serta membuang mereka ke tempat-tempat tertentu.

Sikap keras pemerintah kolonial Belanda terhadap berbagai aktivitas perjuangan dan pergerakan nasional semakin menjadi-jadi di

[12] A.C.D. de Graft, *dikenal sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dekat dengan tokoh-tokoh penganjur politik etis. Pada tahun 1931 ia diganti oleh Jhr Bonafacius C. de Jonge.*

bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge [13] yang menggantikan de Graeff pada tahun 1931.

Protes keras terhadap sikap represif dan memperbudak pemerintah Kolonial Belanda atas penduduk Hindia Belanda memang tidak hanya tercermin dari berbagai pemberontakan dan perlawanan, tetapi juga datang dari tokoh-tokoh liberal di negeri Belanda.

Mereka menyerang kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Tekanan dan serangan tokoh-tokoh liberal di Belanda tersebut bermuara pada pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda, suatu politik yang menekankan perlunya dilakukan upaya membayar budi baik tanah jajahan.

Apa yang hendak dicapai melalui politik etis ialah peningkatan ekonomi penduduk, peningkatan kesehatan, dan pendidikan, sedikit saja hasilnya. Bahkan secara sinistik beberapa tokoh pergerakan mengatakan bahwa politik etis hanya etis dalam perumusannya, sedangkan dalam pelaksanaannya seringkali tidak beradab.

Asumsi itu setidaknya mendapat pembenaran dari lumpuhnya fungsi Dewan Rakyat atau *Volksraad* yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 sebagai salah satu jembatan komunikasi politik dan sosial antara bangsa terjajah dengan penjajah.

Pada Tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Graff Van Limburg Stirum,[14] di depan Sidang Istimewa *Volksraad* menjanjikan akan membangun pemerintahan yang demokratis yang memperluas hak-hak rakyat di Hindia Belanda. Janji Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu kemudian dikenal sebagai *November Belofte (janji November)* yang tidak lain dari kebohongan besar.

Adapun jumlah keanggotaan *Volksraad* yang terdiri atas wakil-wakil golongan masyarakat itu sejak 1927 diperluas dari 46 menjadi 60 orang. Sejak tahun 1931, komposisi pribumi dalam keanggotaan *Volksraad* adalah 30 orang, sedangkan sisanya terdiri atas wakil-wakil golongan Belanda dan Timur Asing (Cina, India, dan Arab). Sepertiga dari anggota *Volksraad* diangkat oleh Gubernur Jenderal. Meskipun banyak tokoh nasional seperti Mohammad Hoesni Thamrin, Soetardjo,

---

[13]Jhr Bonifacius C. de Jonge, *memerintah tahun 1931 s/d 1936.Ia mengeluarkan hak exorbitante (hak-hak luar biasa; hak darurat) dan melakukan tindakan keras terhadap nasionalisme Indonesia.*

[14] Mr. Graft Van Limburg Stirum, *Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1916-1921) berhaluan demokrat, bersimpati terhadap Sarekat Islam.*

I.J. Kasimo, dll, menyuarakan kritiknya dengan tajam terhadap perlakuan Belanda terhadap penduduk pribumi Hindia Belanda. Pada umumnya kritik-kritik anggota Volksraad tersebut tidak diindahkan dan diperhatikan[15].

Sejak berdirinya *Volksraad*, maka jalan atau cara perjuangan dengan tegas terbagi dua, yakni perjuangan dengan jalan yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif.

Seperti telah dikemukakan, untuk meredam pemberontakan dan perlawanan rakyat, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil langkah untuk mengasingkan atau membuang para pemberontak, bahkan membuang juga banyak tokoh pergerakan yang menentang kebijaksanaannya.

Tempat pembuangan atau pengasingan yang paling terkenal untuk mempasifikasi para tokoh pergerakan di Hindia Belanda adalah Boven Digoel di Irian Jaya. Sejak dibuka pada tahun 1927 hingga ditutupnya kamp isolasi tersebut pada tahun 1942, lebih dari 3.000 orang *didigoelkan* oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kebijaksanaan untuk mempasifikasi perlawanan rakyat itu didasarkan kepada *exorbitante rechten* yang memberikan kewenangan tidak terbatas kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam membungkam perlawanan melalui tindakan pemenjaraan dan pengasingan atau pembuangan atas diri seseorang ke tempat tertentu di dalam negeri atau ke luar negeri. *Exorbitante rechten* tersebut dipertajam oleh *Pasal 47 Regerings Reglement* semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda.

Pada dasarnya, *Pasal 47 Regerings Reglement* yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda memberi kewenangan kepada setiap pejabat di daerah untuk menangkap dan memenjarakan serta menanyakan kepada Gubernur Jenderal ke mana seseorang harus dibuang atau diasingkan. Kemudian sejarah mencatat betapa tingginya intensitas pembuangan para pejuang dan tokoh pergerakan.

Dalam istilah politik Belanda, tindakan pembuangan diartikan sebagai pemindahan secara legal seseorang ke suatu tempat yang jauh, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan persyaratan tempat pembuangan tersebut mempunyai bahasa, adat istiadat, dan sejarahnya sama sekali asing bagi orang yang dibuang. Di tempat pembuangan, seseorang umumnya hanya akan tetap bertahan hidup

---

[15] Siswanto, Y Heri, *I. J. Kasimo dan Partai Katolik* (Jakarta, Majalah Filsafat Driyarkasa Th XXII No. 3, 1996), hal 22-36.

karena berani menderita dengan sabar, meskipun terus menerus diawasi. Penajaman atas pendapat ini dengan lugas tergambarkan oleh amatan Soetan Sjahrir atas kondisi para digoelis:

"Iklim, penyakit-penyakit, kekurangan makanan, mungkin menjadi sebab-sebab penting, tetapi aku yakin bahwa reaksi psikis orang-orang itu atas keadaan pengasingan ini, dan perubahan semua ini dalam pikiran mereka menjadi kesengsaraan jiwa, itulah yang menyempurnakan proses kemunduran. Mereka sendiri bicara tentang pergaulan sempit, maksudnya ialah bahwa ruangan hubungan-hubungan, begitu terbatas sehingga timbul kesesakan batin. Aku bertanya-tanya apakah ini bukan suatu bentuk lain dari psikologi-amuk?" [16].

Seorang tokoh politik terkemuka yang juga mengalami masa pembuangan/pengasingan selama lebih dari 10 tahun di Banda Neira, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, dalam otobiografinya menggambarkan kehidupan di tempat pengasingan lebih menyedihkan daripada kehidupan orang dalam penjara.

"Secara mental kami tertekan, sebab orang-orang yang dihukum dalam penjara dapat mengetahui berapa lama mereka itu harus menjalani hukuman. Orang-orang buangan seperti kami tidak dapat mengira-ngira sampai kapan masa pengasingan ini akan berakhir…, kami sering gelisah dan dihinggapi semacam putus asa, tidak lagi memiliki harapan dapat hidup di tengah-tengah keluarga kembali" [11].

Pendapat Sjahrir dan Mr. Iwa Koesoema Soemantri, tampak sejalan dengan pendapat tokoh pendidik terpenting dunia abad 20, *Paulo Freire*, yang juga pernah mengalami masa pembuangan oleh pemerintah Brasil. Menurut Freire, menanggung derita hidup dalam pembuangan berarti menerima tragedi perpisahan yang merupakan ciri khas pengalaman berada atau hidup dalam *konteks pinjaman*. Tiap-tiap orang dalam pembuangan bereaksi, menanggung derita, tumbuh berkembang, dan mengalahkan kesulitan-kesulitan dengan cara yang berbeda-beda[17].

---

[16] Sjahrir, Soetan, *Renungan dan Perjuangan* (Jakarta, Djambatan, 1990), hal 70.

[11] Kusuma Sumantri, Mr. Iwa, *Sang Pejuang Dalam Gejolak Sejarah, Otobiografi*, editor: Nina H. Lubis (Bandung, CV. Satya Historika,2002), hal 105.

[17] Freire, Paulo, *Pedagogi Hati* (Jakarta, Penerbit Kanisius, 2001), hal 78-81.

Dari segi geografis, daerah yang dipilih pemerintah Hindia Belanda untuk mengasingkan mereka yang melawan kebijaksanaannya adalah daerah-daerah yang jauh dari kampung halaman orang yang dibuang, bertradisi berbeda, dan sulit ditempuh. Daerah pembuangan yang dipilih bukan sekedar daerah di Hindia Belanda seperti Timor, Banda, Makassar, Manado, Kalimantan, dan Boven Digoel, melainkan juga Sailan (sekarang Srilanka) dan Afrika Selatan.

Pada dekade ketiga abad ke-20, tindakan pengasiangan atau pembuangan para tokoh pergerakan ke luar Hindia Belanda dihentikan oleh pemerintah kolonial. Penghentian tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa umumnya orang-orang yang dibuang ke luar negeri tidak menjadi lunak, tetapi justru bertambah keras akibat pencerahan yang diperoleh dalam pergaulan internasional di tempat pengasingan masing-masing.

Des Alwi dalam suatu wawancara dengan penulis mengenai kehidupan orang buangan di Bandaneira. Latar belakang adalah Gunung Api di Bandaneira

Melalui pembuangan atau pengasingan ke tempat-tempat yang jauh dari daerah asalnya, orang-orang yang dibuang diharapkan akan hancur secara morel, penghancuran dimaksud setidaknya diasumsikan dimulai dengan datangnya perasaan ngeri secara perlahan-lahan, sehingga seseorang akan merasa kehilangan arah dan dihantui perasaan tidak mampu berbuat apa-apa. Di tengah keterasingan yang dialaminya

orang umumnya cenderung merasa bahwa harapan hanyalah khayalan belaka.

Diawali dengan pembuangan Pangeran Diponegoro ke Makassar pascaperang 1825-1830, pemerintah Belanda tampak mulai mentradisikan politik pembuangan dan pengasingan terhadap orang-orang yang dinilai membahayakan kepentingannya.

Tuanku Imam Bonjol pemimpin Perang Padri 1820-1837 di Sumatera Barat diasingkan ke luar Pulau Sumatera, yakni ke Cianjur, Jawa Barat. Dua tahun kemudian Imam Bondjol dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Manado di mana beliau menetap sampai meninggal pada 6 November 1864.

Hal serupa juga dialami oleh tokoh wanita pejuang Aceh, Cut Nyak Dhien. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, hingga meninggalnya pada 6 November 1908. Cut Nyak Dhien baru berhasil ditangkap Belanda setelah dia buta dan tua renta. Selain Cut Nyak Dhien, tokoh Aceh yang dibuang kolonial Belanda adalah Sultan Muhammad Daud Syah. Sultan dibuang ke Ambon pada tahun 1907 karena dipersalahkan mengadakan hubungan dengan Kaisar Jepang untuk mendapatkan bantuan persenjataan guna melanjutkan perjuangan menentang kolonialisme Belanda di Aceh. Pada tahun 1917, beliau diperbolehkan memilih salah satu tempat kediaman di Hindia Belanda kecuali di Sumatera. Sultan memilih *Meester Cornelis* (Jatinegara) dan di situlah beliau wafat pada tanggal 6 Februari 1939.

Menjelang dan memasuki abad ke-20, serangkaian tindakan membuang dan mengasingkan orang-orang yang menentang kekuasaan kolonial Belanda meningkat tajam.

Pelaksanaan pembuangan para tokoh pergerakan pada tiga dekade pertama abad ke-20 sebenarnya adalah buah pemikiran dari para ilmuwan orientalis Belanda seperti Dr. D.A. Rinkes yang pernah menjadi Deputi Penasihat Hubungan-Hubungan Pribumi pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1911 hingga 1913.

Bersama-sama dengan Maijer Rannefft dan Professor B.J.O. Schrijke, mereka mengarsiteki pembangunan koloni pengucilan Digoel di Irian Jaya, yang dibuka berdasarkan *Indishe Staatsregeling Pasal 37*. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah Hindia Belanda membuang orang-orang yang dianggap pengacau ketentraman dan ketertiban umum ke suatu tempat khusus yang ditunjuk untuk waktu yang tidak terbatas.

Catatan sejarah kemudiaan juga membuktikan bahwa ada banyak Surat Keputusan pembuangan dikeluarkan untuk memadamkan semangat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda [18].

Sebagai contoh, pada tahun 1885 dikeluarkan SK 1 Agustus 1885 No.5c tentang pembuangan 17 orang yang dinilai terkait dengan pemberontakan di Batusangkar. Pada tahun 1873 dikeluarkan SK No.19 25 Mei 1873 tentang pembuangan mereka yang dituduh memberontak di Kototuo, Sumatera Barat.

Masih untuk Sumatera Barat, pada tahun 1910, dikeluarkan SK No.37 12 April 1910 tentang pembuangan 15 orang tokoh *perang belasting* atau pemberontakan pajak 1908 dan SK No. 37 tanggal 28 Mei 1910 masih tentang pembuangan 35 orang yang terlibat pemberontakan pajak 1908.

Tiga tokoh *Indische Partij*, dr. Tjipto Mangoen Koesoemo, Douwess Dekker (alias Setiabudi), dan Suwardi Suryadiningrat (Ki Hadjar Deawantara) pada tahun 1913 juga termasuk tokoh-tokoh yang akan diasingkan ke Kupang dan Ambon, tetapi kemudian ketiganya lebih meminta meninggalkan Hindia Belanda menuju Belanda. Mereka menetap di Belanda dari tahun 1913 sampai tahun 1919.

Tokoh pejuang revolusioner yang pernah menjadi pemimpin PKI, pendiri Pari dan Partai Murba, dan yang hidupnya paling diliputi misteri, Tan Malaka, juga tidak luput dari tindakan pembuangan oleh pemerintah kolonial. Tan Malaka meninggalkan Hindia Belanda tanggal 24 Maret 1922, dibuang ke negeri Belanda.

Pada tahun 1927, seorang tokoh pemimpin pemberontakan Silungkang asal Selayo Solok, Mohammad Sa'ad gelar Datuk Rajo Timbua, 26 tahun, dibuang ke Sumenep Madura. Dalam perjalanan ke tempat pembuangan, Mohammad Sa'ad membuat keributan dan mengamuk di pasar Glodok, Jakarta. Masa pembuangan di Sumenep tidak berlangsung lama, selanjutnya ia dibuang ke Boven Digoel dan baru dibebaskan pada tahun 1936 dalam keadaan kurus kering. Perintis Kemerdekaan ini masih sempat terjun dalam Perang Kemerdekaan I dan II. Beliau meninggal dunia pada tahun 1968.

---

[18] Amran, Rusli, *Cerita-Cerita Lama dalam Lembaran Sejarah* (Jakarta, Balai Pustaka, 1997).

Digulis, Mohamad Saad Datuk Rajo Timbua
Asal Selayo-Solok, Sumatera Barat

Masih pada tahun 1926/1927, tercatat 1.308 pelaku pemberontakan komunis yang gagal di Banten dan Silungkang Sumatera Barat dibuang ke Boven Digoel. Pembuangan para tokoh pergerakan kemerdekaan ke Digoel terus berlanjut hingga Digoel ditutup pada tahun 1942.

Sejumlah tokoh terkemuka nasional pernah didigoelkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka antara lain Mohammad Hatta (1935), Soetan Sjahrir (1935), I.F.M. Chalid Salim (1927), Marco Kartodikromo (1927), Sayuti Melik (1927-1933), Mohammad Bondan, Moerwoto, Maskun (1935), dll.

Tokoh Islam asal Solo yang menjadi propagandis komunis sekaligus editor *Medan Moeslimin* dan *Islam Bergerak*, Haji Mohamad Misbach, dibuang ke Manokwari, Irian.

Di Kepulauan Banda, tercatat pernah diasingkan antara lain dr. Tjipto Mangoen Koesoemo yang sekembalinya dari Belanda pada tahun 1919 melanjutkan perjuangan yang dinilai radikal oleh Belanda, sehingga ia kembali dibuang dari tahun 1927 hingga 1942 di Banda

Neira, selain itu juga turut dibuang ke Banda adalah Mr. Iwa Koesoema Soemantri dari tahun 1930 hingga 1941, Ia selanjutnya diasingkan di Makassar hingga tahun 1942. Mr. Iwa dibuang ke Banda karena aktifitasnya dalam kegiatan politik dan serikat buruh seperti *Persatuan Motoris Indonesia, Perkumpulan Sekerja ORBLDM* dan *INPO* di Medan serta berbagai tulisannya di harian *Matahari Indonesia*. Pada tahun 1936 Hatta dan Sjahrir setelah setahun sebelumnya diasingkan di Boven Digoel juga dibuang ke Banda. Masa pembuangan di Banda Neira itu mereka jalani sampai tahun 1942.

Ir. Soekarno juga tidak luput dari tindakan pembuangan oleh pemerintah kolonial Belanda, selain pernah disekap di penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno pernah pula diasingkan di Ende, Flores dari tahun 1933 sampai 1938 dan di Bengkulu dari tahun 1938 sampai 1942.

Tokoh Gerakan Nasional Iwa Koesoema Soemantri, Mohamamad Hatta, dr. Tjipto Mangoen Koesoemo dan Soetan Sjahrir dalam pengasingan di Banda Neira.

Setelah menjalani masa pengasingan, banyak di antara mereka tampil dengan lebih lantang dan berani melawan kolonialisme Belanda. Bagi mereka kemerdekaan adalah mata rantai yang tidak akan pernah terputuskan bahkan oleh maut sekalipun.

Masa pengasingan atau pembuangan yang dijalani seakan menjadi masa perenungan yang mendalam bagi mereka, terutama

dalam merumuskan dan mengorganisasikan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Paling tidak hal itu dicerminkan oleh pernyataan Soetan Sjahrir dalam buku kumpulan suratnya, *Indonesische Overpeinzingen* yang diterjemahkan H. B. Jassin dengan judul *Renungan dan Perjuangan*, sebagai berikut:

"…Kami beranggapan bahwa kekuasaan kolonial akan segera menemui keruntuhannya dan kami membuat rencana-rencana untuk menjaga supaya organisasi kami tetap utuh dan untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan…"

BAB III

PEMBERONTAKAN PKI DI BANTEN

POLITIK ETIS

Banten, Hindia Belanda tahun 1900. Politik Etis[19] yang untuk pertama kali diwacanakan anggota Parlemen Belanda Van Dedem pada tahun 1891 dapat dikatakan merupakan garis politik kolonial baru yang berintikan keharusan memisahkan keuangan Hindia Belanda dari Negeri Belanda. Politik etis yang secara umum di arahkan ke suatu politik yang konstruktif dan terbilang progresif itu mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh liberal, humanis, dan demokrat di negeri Belanda seperti Van Kol[20], Van Deventer[21] dan Brooschoot[22]. Van Deventer tokoh liberal yang mendukung politik etis tersebut bahkan dalam satu tulisan berjudul *Een Eereschuld* atau *Hutang Kehormatan* dalam majalah De Gids pada tahun 1899, mengatakan:

"…dari hasil panen yang sangat berharga melalui tanam paksa, negeri Belanda telah memperoleh keuntungan berjuta-juta gulden. Antara tahun 1867 hingga tahun 1878 keuntungan yang diperoleh tidak kurang dari 187 juta gulden. Hal ini merupakan hutang Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda yang perlu dikembalikan, sekalipun dalam bentuk lain, karena hal itu merupakan hutang kehormatan. Sebagai bangsa yang bermoral, adalah menjadi kewajiban untuk mengembalikan hutang budi itu dengan jalan memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan rakyat jajahan..."

---

[19] Permulaan haluan etis dalam politik kolonial terjadi ketika Ratu Wilhelmina pada bulan September 1901 menyampaikan pidato pembukaan Parlemen Belanda. Ia mengatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai suatu panggilan moral terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

[20] Van Kol, Nellie, pengarang, salah seorang pelopor politik etis. Ia pengasuh majalah *De Hollandsche Lelie*.

[21] Van Deventer, Mr. Conrad Theodore (1857-1915), ahli hukum, pernah tinggal di Hindia Belanda selama 10 tahun, tersentuh melihat penderitaan rakyat. Ketika menjadi anggota parlemen dia dengan gigih memperjuangkan politik etis.

[22] Brooschooft, Pieter (1845-1921), wartawan sekaligus sastrawan yang memelopori politik etis.

Van De Venter (1857 – 1915)
Pelopor Politik Etis

Gaung politik etis sampai juga imbasnya ke Banten. Politik Etis yang mereka dorong pelaksanaannya di negeri jajahan Hindia-Belanda pada prinsipnya berintikan kehendak agar pemerintah kolonial Belanda lebih menaruh perhatian terhadap bangsa jajahannya. Perhatian itu terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat memang mendapat dukungan dari semua golongan.

Meskipun perdebatan antarberbagai golongan politik di Belanda mengenai bagaimana sebaiknya pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda (sebagai pembayar budi baik tanah jajahan) lumayan marak. Pada akhirnya politik etis mulai dijalankan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pribumi Hindia Belanda.

Diakui atau tidak, pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui program pendidikan bagi golongan pribumi ternyata berpotensi besar membangun kesadaran berbangsa. Dalam dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang luar biasa pesat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pemerintah kolonial waktu itu berusaha menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam latar belakangnya.

Secara umum sistem persekolahan yang dijalankan di dasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.

Kendatipun masih dalam jumlah yang sangat terbatas, sekolah-sekolah mulai dibuka untuk pribumi. Salah satu contoh dapat dikemukakan disini, yakni menyangkut peningkatan jumlah Sekolah Rendah Eropa atau Europeesche Lagere School (ELS).

Sekolah rendah ini diperuntukan bagi anak-anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan timur, dan anak-anak bumiputra dari golongan priayi atau elite. Pada tahun 1820 jumlah sekolah ELS di Hindia Belanda baru ada tujuh buah, pada tahun 1898 jumlahnya meningkat menjadi 191 buah, dan pada tahun 1917 berjumlah 198 buah[23].

Pada tahun 1900, dari 50 juta penduduk pribumi, tercatat hanya sekitar tiga ribu jiwa saja yang berkesempatan memperoleh pendidikan barat untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Tujuan pendidikan yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda atas masyarakat pribumi memang tidak pernah secara tegas dinyatakan. Akan tetapi, secara umum tujuan pendidikan yang dilakukan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh bagi kepentingan kaum modal Belanda. Dengan kata lain, pendidikan ditujukan untuk mencetak tenaga-tenaga yang diharapkan dapat

---

[23] Departemen P&K, *Sejarah Pendidikan di Indonesia* (Jakarta, P&K, 1993), hal 76.

digunakan untuk menjamin kepentingan penjajahan, mencakup upaya untuk memperkuat kedudukan Belanda dan untuk meningkatkan pengabdian pribumi kepada kepentingan kolonial[24].

Itu pulalah sebabnya mengapa materi dan substansi pendidikan yang diberikan hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang di arahkan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi di tanah jajahannya.

Menimbang Pulau Jawa merupakan pusat geo politik Hindia Belanda, pemerintah kolonial memusatkan pelaksanaan pendidikan menengah dan tinggi di pulau ini. Misalnya, di Batavia terdapat MULO, HBS 5 tahun, Sekolah Menengah Pamongpraja, Sekolah Menengah Hukum, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Dagang, dan Sekolah Tinggi Kedokteran. Di Bandung, Semarang, dan Yogyakarta juga terdapat HBS 5 tahun.

Pada tiga dekade berikutnya jumlah pribumi yang terdidik terus meningkat, namun peningkatannya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun begitu, pada tiga dekade pertama abad ke-20 itu kaum etis memang tiada henti mendesak agar pemerintah Belanda memperhatikan pendidikan rakyat jajahan. Desakan mereka sedikit banyak memang diperhatikan, terbukti dengan mulai dibukanya Sekolah Tinggi Teknik di Bandung dan Sekolah Dokter Jawa di Jakarta.

Sebenarnya politik etis dimaksudkan untuk mengupayakan kemakmuran, mendidik masyarakat pribumi, sekaligus memaksa mereka membangun jaringan jalan kereta api dan jembatan. Semuanya itu membuat pergerakan membalik. Kesadaran mengatakan bahwa ini adalah sebuah eksploitasi atas manusia dan kemanusiaannya.

Kiranya ini pulalah sebab mengapa tindakan pengembangan pendidikan di Hindia Belanda, khususnya di Jawa dan Sumatera diaplikasikan secara sangat terbatas. Pemerintah kolonial Belanda mendidik penduduk hanya untuk menjadikan mereka buruh-buruh kelas bawah. Namun begitu, ada juga sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lain yang diangkat sebagai pekerja kelas dua atau kelas tiga.

---

[24] Ibid, hal 63.

KEBANGKITAN ORGANISASI PERJUANGAN

Digerakkan oleh politik etis, ternyata hubungan antara penjajah dengan yang dijajah pada batas-batas tertentu telah memasuki Era Baru. Dalam hal ini setidaknya kelompok awal intelektual menengah, sedang dilahirkan oleh zaman. Para intelektual dimaksud adalah orang Indonesia yang pertama kali secara modern sadar dalam menilai dan menanggapi keadaan yang memprihatinkan bangsanya sebagai akibat penjajahan berkepanjangan pemerintah Belanda.

Pelaksanaan pendidikan melalui bangku sekolah yang didorong oleh politik etis, kemudian bermuara pada meningkat dan tercerahkannya kesadaran politik sebagian kaum intelektual muda yang tengah dilahirkan zaman. Berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, hingga organisasi politik, kemudian seakan tidak terbendung lagi kemunculannya di Hindia Belanda. Dipelopori oleh organisasi Boedi Oetomo, berbagai organisasi lainnya efektif membuka cakrawala berfikir bangsa untuk melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme.

Seperti halnya di Pulau Jawa, di Sumatera pun, politik etis tidak hanya terasa melalui dibukanya sekolah-sekolah, seperti Sumatera Thawalib, INS Kayu Tanam, dan lain-lain, tetapi juga terasa dengan mulai masuknya modal swasta ke Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi jadi meningkat. Untuk mengatur perekonomian yang demikian diperlukan tenaga khusus dan terdidik. Kenyataan itu mendorong lahirnya elite intelektual atau setengah intelektual berdasarkan kebudayaan barat di Minangkabau.

Perubahan garis kebijaksanaan politik yang dilakukan pemerintah Belanda, khususnya menyangkut pendidikan dan kemakmuran masyarakat pribumi, menurut sejarawan Dr. Onghokham, didasarkan kepada penelitian-penelitian mengenai tingkat kemakmuran, meskipun waktu itu di Jawa orang menjerit-jerit. Penelitian atas hal itu menurutnya , hasilnya adalah kenyataan bahwa penduduk Pulau Jawa miskin-miskin dan buta huruf. Jadi harus dilakukan perbaikan-perbaikan[25]. Sejalan dengan niat tersebut, Islam juga dipakai sebagai suatu symbol oleh Belanda. Orang Belanda yang bukan Islam-lah yang memberikan identifikasi ini, menimbang waktu itu

[25]Suwardi, Purnama, *Sejarah Indonesia Modern dalam Dialog* (Jakarta, Cakrawala, 2000), hal 20.

organisasi gerakan nasional yang terbesar dan paling berpengaruh adalah Sarekat Islam yang dibentuk pada tahun 1912.

Meskipun Islam dipakai sebagai simbol, tokoh perintis kemerdekaan, Mr.Hamid Algadri[26] berpendapat, pada dasarnya politik kolonial Belanda adalah anti Islam. Pendapat Mr.Hamid Algadri ini tidaklah berlebihan sebab fakta menunjukkan bahwa pada masa kolonial subsidi yang diberikan pemerintah Belanda bagi pengembangan syiar Islam relatif lebih sedikit dibandingkan dengan subsidi serupa untuk agama Protestan dan Katolik[27].

Subsidi Pemerintah Kolonial untuk Agama
Kristen Protestan, Katolik, dan Islam
(dalam Gulden)

Agama	1936	1937	1938	1939
Protestan	686.100	683.200	696.100	844.000
Katolik	286.500	290.700	296.400	335.700
Islam	7.500	7.500	7.500	7.600

Sumber: Staatsblad, 1936/Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, 1982, hal 188.

Pada tiga dekade pertama abad ke-20, sejumlah organisasi politik, keagamaan, dan sosial tumbuh menjamur di Hindia Belanda. Di antaranya yang terpenting adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging), PKI, Muhammadiyah, Partai Arab Indonesia, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, PNI, dan lain-lain.

Dalam kurun itu Sarekat Islam sebagai organisasi politik secara konsisten memperjuangkan berbagai tuntutan dari bawah yang pada gilirannya membengkak menjadi gerakan-gerakan masal pertama di Indonesia sejak Perang Diponegoro. Massa kejayaan Sarekat Islam berlangsung hingga tahun 1919, dan setelah itu, terutama akibat tekanan pemerintah kolonial Belanda dan penyusupan PKI, Sarekat Islam mengalami kemunduran besar.

Awal penyusupan komunis dalam Sarekat Islam bermula dari upaya ISDV untuk mendapatkan pengaruh dalam lingkungan

[26] Ibid,hal13-14.
[27] Noer,Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta, LP3ES, 1982), hal 188.

pergerakan politik melawan kolonial Belanda. ISDV atau Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda didirikan oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang lebih populer dikenal dengan panggilan Henk Sneevliet pada tahun 1914. ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging) yang anggotanya mencakup orang Belanda dan Indonesia dikenal antikapitalis dan banyak melakukan agitasi terhadap rezim kolonial Belanda serta elite Indonesia yang mendapatkan hak-hak khusus. Setelah Revolusi Rusia 1917, ISDV yang merupakan cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang kelak dipimpin oleh Semaoen, memilih Sarekat Islam untuk memperluas pengaruhnya. Sarekat Islam dipilih karena merupakan partai massa yang besar dan banyak di antara tokohnya dinilai bersedia menerima pikiran-pikiran yang radikal.Pada tahun 1917, para pengikut ISDV berhasil membentuk faksi dalam Sarekat Islam.

Pada permulaan tahun 1920-an pemerintah Hindia Belanda memperkeras tekanannya terhadap ISDV yang telah mengubah diri menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada gilirannya tekanan ini juga memperlemah pertumbuhan Sarekat Islam.

Sarekat Islam yang merupakan suatu kekuatan raksasa di dalam pergerakan nasional, dengan ratusan ribu anggotanya akhirnya terpecah dua menjadi SI Putih dan SI Merah. Perpecahan Sarekat Islam timbul akibat penyusupan PKI melalui taktik infiltrasi yang dikenal dengan istilah "blok di dalam".

Penyusupan terhadap Sarekat Islam dilakukan PKI dengan cara menjadikan anggotanya sebagai anggota Sarekat Islam dan sebaliknya menjadikan anggota Sarekat Islam sebagai anggota PKI. Adapun dasar pertimbangannya adalah kenyataan bahwa PKI belum mendapat tempat untuk menyebarkan sosialisme dan komunisme pada kalangan rakyat umum Hindia Belanda.

Langkah penyusupan yang dilakukan PKI/ISDV atas Sarekat Islam dapat dikatakan berhasil. Sarekat Islam yang semula merupakan partai massa satu-satunya di Hindia Belanda, kian hari kian menyusut pendukungnya. Penyusupan dalam tubuh SI di antaranya dilakukan oleh tokoh Islam berhaluan komunis, Haji Mohamad Misbach. Salah seorang murid Haji Misbach, Mangoenatmodjo, mendirikan organisasi Islam Abangan di Surakarta pada September 1919. Organisasi Islam Abangan itu merupakan embrio Sarekat Islam Merah.

Pada bulan Mei 1920, anggota SI Merah sudah mencapai dua belas ribu orang. Pada tahun 1919, organisasi itu menggerakan

pemogokan buruh perkebunan di Jawa Tengah. Dengan demikian dimulailah kemerosotan Sarekat Islam secara tajam.

Melihat kenyataan tersebut, para tokoh SI golongan H.O.S. Tjokroaminoto tidaklah berpangku tangan saja. Dengan gencar mereka melakukan langkah-langkah konsolidasi partai. Agus Salim dan Abdul Muis bahkan mendesak agar ditetapkan peraturan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap.

Desakan yang disampaikan dalam Kongres Nasional ke –6 CSI (Central Sarekat Islam), di Surabaya dari tanggal 6 hingga 10 Oktober 1921 itu ditentang keras oleh Semaoen dan Darsono. Selanjutnya pertentangan di dalam tubuh Sarekat Islam semakin tajam. Organisasi itu akhirnya terpecah dua menjadi Sarekat Islam Putih yang berazaskan kebangsaan-keagamaan di bawah kepemimpinan H.O.S Tjokroaminoto, dan Sarekat Islam Merah yang berazaskan komunis di bawah kepemimpinan Semaoen dan Darsono. SI Merah yang berpusat di Semarang selanjutnya memisahkan diri dari CSI yang merupakan organisasi induknya di Yogyakarta..

Pada bulan Juni 1924, SI Merah yang mengubah nama menjadi Sarekat Rakyat telah sepenuhnya dijadikan *onderbouw* (bawahan) PKI. Hal itu sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan pendidikan ideologi komunisme di Hindia Belanda melalui sekolah-sekolah Sarekat Rakyat yang relatif tersebar di Jawa dan Sumatera.

Dalam kurun waktu ini jumlah, anggota PKI diperkirakan mencapai lebih dari 13 ribu jiwa, dan dengan masuknya bekas anggota SI Merah, jumlahnya ditaksir meningkat menjadi sekitar 35 ribu jiwa.

PKI memang cukup gencar mengembangkan keanggotaan yang sebahagian besar terdiri atas orang-orang kota, mengorganisasikan kaum buruh untuk melancarkan pemogokan-pemogokan, dan menggiring mereka menuju konfrontasi yang tajam dengan pemerintah Hindia Belanda.

PEMBERONTAKAN PKI

Pada tahun 1926, dalam pertemuan Prambanan, sejumlah pemimpin pucuk PKI mulai menggagas suatu gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Semaoen dan Alimin untuk melakukan gerakan revolusi rakyat itu kemudian menjadi salah satu keputusan pertemuan Prambanan. Keputusan untuk melakukan revolusi rakyat, ditantang keras oleh Tan Malaka, pemimpin PKI yang

juga menjadi salah seorang pimpinan Komunis Internasional, *Comintern,* untuk kawasan Asia Tenggara[28].

Keberatan Tan Malaka atas rencana pemberontakan yang akan dilakukan PKI didasarkan pada pertimbangan tidak terintegrasinya kepemimpinan dan keanggotaan PKI.

Konsolidasi yang mereka lakukan tidak kuat dan mantap, bahkan pada waktu itu dapat dikatakan sebagian besar anggota PKI tidak mengerti betul apa sesungguhnya garis politik dan perjuangan partai mereka.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut Tan Malaka dengan tegas bahkan mengatakan bahwa waktu untuk menggalang massa aksi masih terlalu dini bagi PKI sebab kepengurusan masih tercerai berai dan perlu disatukan dalam garis komando yang jelas.

Selain itu, PKI yang mengandalkan kekuatan pada perjuangan kelas buruh, secara riel belumlah sebesar seperti gambaran mereka terhadap organisasinya sendiri. Di Hindia Belanda waktu itu kelas buruh atau pekerja relatif sedikit jumlahnya. Apalagi *malaise* juga mempengaruhi iklim investasi di Hindia Belanda. Menimbang kenyataan itu, PKI harus dengan optimal melakukan propaganda untuk menarik minat rakyat yang umumnya adalah petani, agar mau ambil bagian dalam perjuangan dan pencapaian tujuan PKI. Dalam hal ini propaganda dilakukan dengan mempertajam pertentangan antara kaum kapitalis dengan kaum buruh. Oleh karena itu, PKI berupaya keras memobilisasi kekuatan buruh dan tani. Kendala terbesar yang dihadapi PKI dalam hal ini adalah kenyataan kurangnya kesadaran politik rakyat dari kalangan tani sehubungan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata meraka.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tan Malaka dengan tegas mengatakan bahwa untuk menggalang *massa aksi* masih terlalu dini bagi PKI, sebab kepengurusan masih tercerai berai dan perlu disatukan dalam garis komando yang jelas.

Keberatan yang disampaikan Tan Malaka dari tempat persembunyiannya di luar negeri terbukti tidak diindahkan. Komite Penggalang Republik Indonesia yang khusus dibentuk oleh sejumlah tokoh puncak PKI untuk mengkoordinasikan pemberontakan bahkan telah menetapkan tanggal pemberontakan, yakni 12 November 1926 untuk Pulau Jawa, sedangkan untuk Pulau Sumatera waktu pelaksanaan pemberontakan belum ditetapkan.

---

[28] Poeze, Harry. A, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1925-1945* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal 62-77.

Akhirnya pada hari Jum'at tanggal 12 November 1926. pemberontakan PKI meletus di Jakarta, disusul dengan tindakan-tindakan kekerasan dan perlawanan di Banten dan Priangan, Jawa Barat, di Surakarta dan Kediri, Jawa Tengah, dan di beberapa daerah di Jawa Timur. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan di bawah koordinasi dan komando PKI pada beberapa daerah di Pulau Jawa tersebut, yang paling militan terjadi di Banten, suatu daerah yang dapat dikatakan relatif terpencil secara ekonomi dan politik, namun cukup dikenal pemerintah kolonial Belanda karena tradisi memberontak dan semangat keagamaan penduduknya.

PEMBERONTAKAN PKI/SAREKAT RAKYAT
1926/1927

No	Tempat	Waktu Kejadian
1.	Jakarta.	12 Nov s/d 14 Nov 1926
2.	Banten.	12 Nov s/d 5 Des 1926
3.	Priangan.	12 Nov s/d 18 Nov 1926
4.	Surakarta.	17 Nov s/d 23 Nov 1926
5.	Kediri.	12 Nov s/d 15 Des 1926
6.	Silungkang	1 Jan s/d 28 Feb 1927

Sumber : Buku Putih, Setneg, 1994.

Pemberontakan PKI di Banten sangat mencemaskan pemerintah Hindia Belanda. Rasa cemas tersebut timbul justru bukan karena PKI-nya, tetapi lebih disebabkan oleh semangat antipriayi dan antikolonial masyarakat Banten yang bermuara pada tradisi memberontak sejak tahun 1880-an. Sejarah mencatat, di Banten, dari tahun 1810 hingga 1870, sedikitnya terjadi 19 kali pemberontakan melawan kolonial Belanda[29].

Tradisi memberontak masyarakat Banten itu *diekstrapolasi* (dijadikan bahan perhitungan untuk bertindak) oleh PKI untuk mewujudkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial melalui upaya mengikat kerja sama dengan para ulama dan jawara.

Melalui kerja sama tiga kaki yang terjalin antara PKI, Ulama dan Jawara tersebut tidak berarti PKI berhasil mengomuniskan secara absolut para ulama dan jawara (pendekar;jagoan) di Banten.

---

[29] Williams, Michael Charles, *Communism, Religion and Revolt in Banten*, Athens, Ohio: Ohio University (Monographs in International Studies, South East Asia Series, No.86), 1990.

Persepakatan yang terjadi umumnya lebih disebabkan kesamaan persepsi tentang perlunya mengusir kolonial Belanda dari Banten demi mempertahankan legitimasi kepemimpinan lokal, yang telah berabad lamanya dimiliki oleh para ulama, priyayi, dan jawara. Jadi, dalam hal ini kepentingan elite lokal yang tergusur oleh penetrasi kolonial Belanda bertemu dengan semangat nasionalisme PKI karena mempunyai musuh bersama yaitu pemerintah kolonial.

Atas dasar kepentingan tersebut, kemudian sejumlah ulama seperti K.H. Ahmad Khatib dan K.H. Fachruddin tampil dengan garang dalam kancah perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Mereka didukung oleh ratusan ulama dan anggota masyarakat serta para jawara, seperti Tje Mamat, H. Asnawi, dan banyak lagi lainnya mengobarkan pemberontakan pada tahun 1926.

Keberhasilan PKI dalam memicu pemberontakan 1926 di Banten hanya sebatas keberhasilan memobilisasi orang-orang revolusioner dengan menjalin persekutuan yang erat dengan -dan tunduk kepada- kaum ulama.

Digerakkan oleh kharisma kepemimpinan para ulama dan jawara, masyarakat Banten terbukti dapat dengan mudah digerakkan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Khusus menyangkut kerja sama dengan para jawara, PKI mengusahakannya dengan gigih, sebab mereka tidak mempunyai faksi bersenjata dan hanya memiliki persenjataan yang sedikit jumlahnya untuk menunjang pemberontakan yang dilakukan[30].

Pemberontakan yang sejak dari awal sudah diperkirakan akan mengalami kegagalan itu terbukti dapat dengan mudah dipadamkan pemerintah kolonial. Penumpasan pemberontakan tersebut dipimpin oleh Kapten Infantri L.Th. Becking.

Pemerintah Hindia Belanda bahkan tercatat berhasil menindas pemberontakan hanya dalam waktu tiga hari saja. Hal itu dimungkinkan karena pemberontakan PKI tahun 1926 diorganisasikan secara kacau dan di tunggangi oleh pemimpin-pemimpin yang berselisih paham tentang tujuan pemberontakan itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa pemberontakan PKI tahun 1926-1927 dapat dengan mudah di potong dari bawah oleh pemerintah kolonial Belanda.

---

[30] Wlliams, Michael C, *Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah* (*Pergolakan Tiga Daerah,* Editor: Audrey R. Kahin, Grafiti, 1990), hal 60-65.

Pada kemudian hari, salah seorang tokoh pimpinan PKI, Semaoen, mengakui bahwa kegagalan pemberontakan tahun 1926/1927 lebih disebabkan oleh sikap masabodoh dan apatis masyarakat di kota-kota dan di perkebunan-perkebunan terhadap pemberontakan tersebut. Sejalan dengan pendapat Semaoen ini, sejarawan Harry J Benda berpendapat bahwa keputusan untuk memulai sebuah pemberontakan yang dipastikan akan gagal tersebut dapat dipahami sebagai sikap menyerah sebagian orang di kalangan kepemimpinan partai terhadap kekuatan-kekuatan yang tak dapat mereka tempatkan di bawah kontrolnya. Ditambahkannya, dalam hal ini keputusan untuk melakukan pemberontakan diambil dari posisi yang amat lemah dan bukannya dari rasa percaya diri akan kekuatan yang dimiliki; hal ini ditandai dengan adanya kemerosotan pada kekuatan dan disiplin komunis yang terus berlanjut sampai dengan munculnya sebuah pemberontakan yang abortive dan tidak terorganisasi yang pada gilirannya menghancurkan diri partai tersebut.[31]

Akibat pemberontakan tersebut para pemimpin PKI telah mengorbankan ribuan pengikutnya dan ribuan patriot yang bukan pengikut mereka tetapi dapat dihasut untuk ikut memberontak.

Khusus menyangkut pemberontakan PKI di Banten, pemerintah kolonial Belanda tercatat menggantung mati empat orang pemberontak, mengasingkan 99 orang pelaku pemberontakan ke Boven Digoel, dan memenjarakan ratusan orang lainnya untuk waktu yang cukup lama. Kebanyakan dari mereka yang diasingkan dan ditangkap bukanlah tokoh-tokoh utama pemberontakan, melainkan hanya peserta biasa yang ikut dalam pemberontakan akibat tekanan kemiskinan yang mereka alami. Adapun para tokoh pemberontak yang berhasil meloloskan diri dari penangkapan, kemudian melarikan diri ke berbagai tempat.Tje Mamat dan beberapa orang tokoh pemberontakan PKI di Banten lari ke Malaya.

Penangkapan yang dilakukan kolonial Belanda tidak terbatas pada tokoh yang terlibat pemberontakan di Banten saja. Pemerintahan tangan besi Hindia Belanda mengoptimalkan fungsi polisi rahasia, PID

---

[31] Benda, Harry J dan McVey, Ruth T, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents,* Seri Penerjemahan, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, 1960, hal. xxiii

(Politieke Inlichtingen Dients)[32], untuk mengawasi setiap gerak langkah tokoh-tokoh pergerakan.

Di Surakarta, Jawa Tengah, pemberontakan terjadi pada hari Rabu tengah malam tanggal 17November 1926. Pemberontakan tersebut menurut Ruth McVey tidak dikepalai oleh pemimpin reguler partai, tetapi oleh anggota perserikatan lokal dan sisa dari gerakan Moe'alimin. Akibat rendahnya mutu kepemimpinan dalam pemberontakan ini, maka malapetaka pun tak terhindarkan. Pihak kolonial dapat dengan mudah menumpas mereka sebab rencana pemberontakan dapat dengan mudah diketahui akibat banyaknya informasi yang bocor ke pihak Belanda. Sama halnya dengan pemberontakan PKI di Banten, pemberontakan PKI di Surakarta juga memanfaatkan penderitaan rakyat sebagai pemicu aksi. Selain dengan senjata, pemberontakan juga dilakukan melalui tindakan sabotase terhadap jaringan rel kereta api, pemutusan kabel listrik, kabel telepon, dan pemblokiran jalan-jalan. Pemberontakan PKI di Surakarta ini membuat pemerintah Hindia Belanda menangkap sedikitnya 700 orang yang dipersalahkan terlibat pemberontakan, 48 orang di antaranya dibuang ke Boven Digoel.

Secara akumulatif jumlah orang yang diciduk sehubungan pemberontakan PKI pada tahun 1926 di Jakarta, di Banten dan Priangan, Jawa Barat, di Surakarta dan Kediri, Jawa Tengah, dan di beberapa daerah di Jawa Timur, serta pemberontakan pada tahun 1927 di Silungkang, Sumatera Barat, tercatat 13 ribu orang ditangkap, sembilan orang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Di antaranya yang dihukum mati adalah Dirdja, Egom, Hasan Bakri dari Ciamis, Haji Sukri, dan lima orang kawannya dari Pandeglang. Selain itu pihak kolonial juga memenjarakan 4.500 orang setelah diadili, dan mengasingkan 1.038 orang ke Boven Digoel.

Berkaitan dengan itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda, de Graeff, juga mengeluarkan berbagai larangan administratif dan politis untuk mencegah bangkitnya kembali kaum komunis di Hindia Belanda. Reaksi keras pemerintah Hindia Belanda itu dikeluarkan dengan dalih untuk menjamin keamanan publik.

Kegagalan pemberontakan PKI, baik di Pulau Jawa maupun di Silungkang, Sumatera Barat, yang akan diuraikan dalam bab berikut,

[32] PID: Politieke Inlichtingen Dients, polisi rahasia yang tugasnya memata-matai kaum pergerakan nasional semasa pemerintahan Hindia Belanda.

mendatangkan sejumlah konsekuensi bagi gerakan dan perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Reakasi keras pemerintah kolonial Belanda terhadap pemberontakan PKI menimbulkan banyak ketakutan. Selain menyatakan PKI sebagai partai terlarang, Belanda kemudian melakukan penindasan terhadap unsur-unsur pergerakan nasional. Mereka tidak berlaku longgar lagi terhadap organisasi-organisasi politik pada masa itu. Meskipun PKI dilarang melakukan kegiatannya di Hindia Belanda, banyak tokohnya yang selamat dari penangkapan tetap melakukan kegiatan partainya secara sembunyi-sembunyi di Hindia Belanda. Sejumlah tokohnya yang melarikan diri ke luar negeri tetap meneruskan propaganda politiknya di negara pelarian masing-masing. Di antara mereka adalah Tan Malaka, Semaoen, Musso, Tje Mamat, dan Darsono.
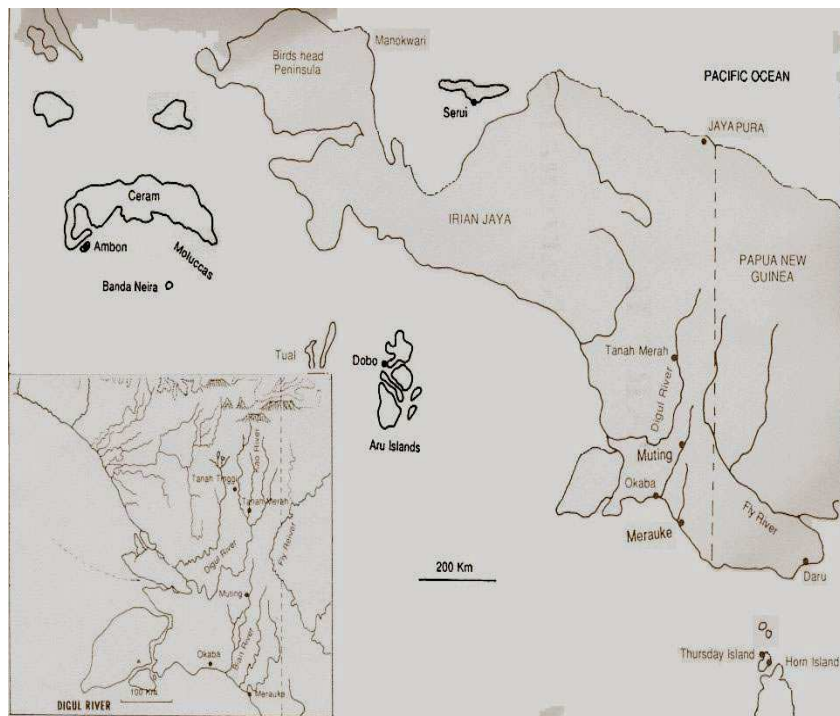
Peta Irian Jaya dan lokasi koloni pengucilan Boven Digoel

UPAYA-UPAYA MEMADAMKAN PEMBERONTAKAN

Banyak cara ditempuh pemerintah kolonial Belanda untuk mempercepat memadamkan pemberontakan PKI pada tahun 1926/1927. Selain mengerahkan personel militer untuk menggempur kantong-kantong pasukan pemberontak, pemerintah Hindia Belanda juga membayar informasi yang diberikan kepadanya jika informasi itu benar. Selain itu untuk memecah belah rakyat dengan pihak pemberontak, pemerintah kolonial Belanda juga mengumumkan nilai hadiah yang diberikan atas kepala orang yang dicarinya. Pengumuman ini antara lain dimuat dalam surat-surat kabar yang terbit waktu itu. Di bawah ini disalinkan beberapa berita dari koran Pandji Poestaka terbitan tahun 1927 mengenai hal tersebut:

Dari Bandoeng dikabarkan, oleh Negeri disediakan doea premie dari f 100 atas penangkapan Bapa Soeganda dan Wiranta. Kedoeanja terda'wa toeroet tjampoer dalam peroesoehan di Nagrek. (Bat.Nbld/PP, 1927, hal 135)

Di Djokja polisi telah menangkap seorang kominis, pelarian dari Makassar, bernama Soemardjono. Oentoek penangkapan kominis tsb disediakan premie f 50.Ia laloe dikirim kekantor polisi dan akan dikirimkan ke Digoel. (PP, 1927, hal 1598)

Toean Resident Solo oleh Negeri dikoeasakan mengeloearkan oeang sebanjak-banjaknja f 750, goena memberi hadiah pada pegawai Algemeene dan Veldpolitie jang waktoe timboel peroesoehan dalam boelan November itoe dan sesoedahnja setia dan berdjasa (J.B/PP, 1927, hal 225).

Taib, voorzitter PKI Sectie Siloengkang, dan commandant besar dari pemberontak soedah ditangkap pada 26 Februari di Singkarak. Premie jang didjanjikan f 150 soedah diberikan kepada jang berhak menerimanja (S.S/PP, 1927, hal 377).

Deli Crt. Mengabarkan, oleh veldpolitie di Laboean Roekoe dionderneming Tindjoan telah ditangkap seorang pemimpin kominis jang telah lama ditjari oleh politie bernama Jatoea. Atas penangkapan Jatoea itoe oleh zelfbestuur-zelfbestuur disediakan premie f 500, karena ia terda'wa djoega dalam perkara pemboenoehan. (PP,1927, hal 772)

Tentara marsose jang dikirimkan ke Soematera Barat karena disana ada peroesoehan kominis, 9 Juni kembali lagi ke Betawi (Bat.Nwbl/PP, 1927, hal 772)

Terlepas dari sikap represif pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontakan itu, sejarawan Dr. Onghokham berpendapat bahwa pemberontakan PKI tahun 1926-1927 dapat dikatakan sebagai suatu permulaan pemberontakan antikolonial, apalagi pemberontakan dilakukan melalui perlawanan bersenjata secara cukup merata, meskipun meletusnya tidak bersamaan. Lebih lanjut Dr. Onghokham menilai bahwa kekalahan pemberontakan tersebut ada kaitannya dengan periode-periode pertama gerakan nasional.

Sesungguhnya ada banyak gerakan waktu itu, ada ide-ide baru, ide-ide aneh, ada Islam yang sosialistis, Islam yang komunis, Islam yang marxistis. Pokoknya waktu itu mulai bermunculan berbagai macam gerakan di Hindia Belanda.

Juga dalam kurun itu, untuk pertama kalinya pada permulaan dekade 20-an, terjadi aksi pelemparan bom terhadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tengah berkunjung ke Solo. Dia dilempari bom, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang melemparkannya. Untuk zaman itu, usaha pembunuhan terhadap seorang gubernur jenderal adalah sesuatu hal yang luar biasa!

BAB IV

PEMBERONTAKAN SILUNGKANG

Komunisme, terutama sebagai suatu filsafat, suatu ideologi yang sangat kompleks, hanya mungkin dipakai sebagai simbol bagi banyak orang, untuk menyatakan ketidakpuasan sosial ekonomi. Justru yang tidak dapat dimengerti adalah pemberontakan komunis pada tahun 1926-1927 itu [33].

Dr. Onghokham

Seperti juga pada banyak daerah lainnya di Hindia Belanda, abad modern datang dengan hukumnya sendiri di Silungkang, Sawahlunto, Sumatera Barat.

Pada permulaan abad ke-20, Silungkang hanyalah suatu nagari yang terdiri atas sekitar 300 rumah tangga saja. Kenagarian Silungkang terletak di Kecamatan Sawahlunto, pada suatu lembah yang sempit, sehingga rumah-rumah penduduk kebanyakan didirikan di lereng-lereng bukit. Dengan kata lain, secara geografis Silungkang adalah suatu nagari yang tandus, punya sedikit dataran dan diapit oleh bukit. Di tengah lembah yang sempit mengalir sebuah sungai kecil berbatu-batu yang kurang menunjang pertanian. Kiranya inilah sebab mengapa kerja tani dan perladangan sedikit sekali dilakukan oleh rakyat Silungkang.

Berbeda dengan kondisi masyarakat pada berbagai daerah lainnya di Hindia Belanda, kondisi kehidupan masyarakat Silungkang relatif lebih maju dari segi ekonomi. Mata pencarian masyarakat Silungkang kebanyakan berdagang dan membuat serta menjual kain tenun hasil industri rumah tangga.

Pada awal abad ke-20, kain tenun Silungkang tidak hanya di pasarkan di Sumatera Barat dan ke banyak kota di Hindia Belanda, tetapi juga di ekspor ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Kenyataan tersebut membuat Silungkang waktu itu terkesan sebagai Kota dagang yang besar. Banyak brosur dan reklame kain tenun Silungkang yang disebarkan ke berbagai daerah untuk merangsang minat beli masyarakat. Beberapa pengusaha tenun Silungkang bahkan mengiklankan tenun produksinya dalam surat kabar.

---

[33] Suwardi, Purnama, *Sejarah Indonesia Modern dalam Dialog* (Jakarta, Cakrawala, 2000) hal 19.

Didorong oleh kemajuan perdagangan yang dicapai, tak pelak lagi cara berpikir masyarakat Silungkang pun dapat dikatakan relatif lebih maju dibandingkan dengan masyarakat kanagarian lainnya di Sumatera Barat.

Salah satu kesadaran terpenting yang ditumbuhkan sektor perdagangan bagi masyarakat Silungkang adalah pentingnya pendidikan bagi anak nagari.

Sampai dengan akhir tahun 1917, di Sumatera Barat sekolah tertinggi yang ada hanyalah Sekolah Raja di Bukittinggi. Sekolah-sekolah lain juga ada, tetapi jumlahnya masih terbatas.

Walaupun rakyat sangat membutuhkan pendidikan melalui sistem persekolahan, pemerintah Hindia Belanda memenuhinya secara berangsur-angsur, terutama sekali dengan memperhitungkan kebutuhan dan keuntungan bagi pihak Belanda sendiri.

Secara berurutan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di Sumatera Barat adalah sebagai berikut [34]:

No.	Thn	Nama Sekolah	Tempat
1.	1853	Sekolah Kelas Dua / Gouvernements Inlandsche School.	Padang
2.	1856	Sekolah Raja/Kweekschool.	Bukittinggi
3.	1910	Sekolah kelas Satu/Governements Inlandsche de Eerste Klasse.	Keresidenan dan Kabupaten
4.	1912	Sekolah Desa/Volkschool.	Padang
5.	1916	SekolahSambungan/Vervolgschool.	Padangpanjang
		Normaalschool.	Padangpanjang
6.	1918	Sekolah Normal KhususWanita.	Padangpanjang
7.	1921	Schakelschool	Padangpanjang

Para ulama dan kaum adat di Sumatera Barat juga banyak mendirikan sekolah. Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan bercorak keagamaan, berkat paham Wahabi atau pembaruan yang dibawa oleh kaum Padri, maka pendidikan atau sekolah agama di Sumatera Barat dapat dikatakan relatif lebih modern dibandingkan

---

[34] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan di Sumatera Barat* (Jakarta, P&K, 1997), hal 77.

dengan sekolah-sekolah serupa pada berbagai daerah lainnya di Hindia Belanda.

Sejumlah sekolah Islam seperti Adabiah (1909) di Padang, Madrasah School (1910) di Batusangkar, Madrasah Diniah (1915) di Padangpanjang, Arabiah School (1918) di Bukittinggi, dan Sekolah Thawalib (1918) di Padangpanjang, berperan penting dalam melahirkan kesadaran masyarakat tentang makna hidup merdeka dan pentingnya melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Kemajuan yang dicapai pada bidang pendidikan di Sumatera Barat umumnya dan di Silungkang khususnya, bukanlah pengaruh langsung dari politik etis Belanda. Kemajuan ini hanya merupakan penambahan dari unsur pendidikan sebelumnya yang lebih diarahkan kepada pendidikan agama Islam. Pada era itu, sekolah-sekolah Islam tersebut banyak melahirkan tokoh intelektual di Sumatera Barat. Beberapa tokoh terkemuka Silungkang juga mengenyam pendidikan pada sekolah-sekolah agama tersebut, khususnya sekolah Sumatera Thawalib.

Kembali ke politik etis. Di Minangkabau, politik etis hanya terasa berkat masuknya modal swasta yang menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat. Untuk mengatur perekonomian tersebut diperlukan tenaga khusus yang terdidik. Hal itu mendorong lahirnya elite intelektual atau setengah intelektual berdasarkan kebudayaan barat pada beberapa daerah di Sumatera Barat, seperti di Kotogadang dekat Bukittinggi, Padang, Solok, dan Silungkang.

Pergeseran nilai akibat penyerapan budaya barat melalui sekolah dan pergaulan tersebut, pada gilirannya mengubah pula cara berpikir masyarakat Minangkabau di lapangan pergerakan politik.

Khusus di Silungkang, hal ini dibuktikan dengan besarnya sambutan masyarakat terhadap berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1915 oleh Sulaiman Labai, Datuk Bagindo Ratu, dan Talaha Sutan Langit.

Anggota Sarekat Islam Cabang Silungkang tidak hanya berasal dari nagari Silungkang, tetapi juga berasal dari beberapa nagari di luar Silungkang.

Pada tahun 1918, Sarekat Islam Cabang Silungkang yang relatif progresif pernah melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan cara mengambil beras milik Belanda untuk

dibagi-bagikan kepada masyarakat sehubungan terbatasnya penjatahan beras yang diberikan pemerintah untuk Wilayah Silungkang [35].

Aksi pengambilan beras itu tentu saja menaikkan pamor Sarekat Islam di mata masyarakat, dan bersamaan dengan itu kesadaran serta keberanian untuk melawan kesewenang-wenangan pun secara bertahap mulai tumbuh membesar di hati setiap warga Silungkang.

Dalam pada itu, Ketua Sarekat Islam Silungkang, Sulaiman Labai, tercatat acapkali melakukan pertemuan dengan H. Datuk Batuah yang memompakan semangat anti- Belanda berdasarkan dalil Al Quran dan hadis.

H. Datuk Batuah adalah salah seorang pemimpin Sarekat Islam, sekaligus ulama berhaluan modern di Sumatera Barat pada waktu itu. Ia berguru antara lain kepada A. Karim Amarullah yang populer dipanggil Haji Rasul. Pada tahun 1922, H. Datuk Batuah merantau ke Jawa dan berkawan erat dengan Semaun yang keluar dari Sarekat Islam akibat melanggar disiplin partai. Datuk Batuah juga menjalin persahabatan dengan tokoh Islam berhaluan kiri, Haji Mohammad Misbach. Kedua tokoh itu mencoba menggabungkan ajaran Islam dan Komunis. Agitasi dan propagada yang dilakukan kedua tokoh itu kemudian bermuara pada pemberontakan PKI di Banten 1926 dan Pemberontakan Silungkang pada tahun 1927[36] . Adapun Semaun selanjutnya membentuk Sarekat Islam Merah.

Dipengaruhi dan di latarbelakangi perkawanan dengan Haji Misbach dan Semaun yang dikemudian hari menjadi salah seorang pemimpin PKI, H. Datuk Batuah bersedia membentuk Sarekat Islam Merah jika di Sumatera Barat waktunya sudah matang. Dalam upayanya *memerahkan* Sarekat Islam ia dibantu oleh seorang tokoh keturunan India, Natar Zainuddin, yang diusir dari Aceh oleh pemerintah kolonial Belanda karena kegiatan-kegiatan politik radikalnya.

Pada tahun 1923, Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Merah yang berafiliasi kepada PKI dan Sarekat Islam pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto.

---

[35] Nasution, A. Muluk, *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926 – 1927* (Jakarta, Mutiara, 1979), hal 47.

[36] Badrika, I. Wayan, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 2* (Jakarta, Erlangga, 1994), hal 151.

Pada tahun 1924, seiring dengan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam, Sulaeman Labai yang telah dipengaruhi ajaran komunisme yang dipompakan Datuk Batuah dan Natar Zainuddin, melebur Sarekat Islam Silungkang menjadi Sarekat Rakyat. Peleburan tersebut menandai mulai merambahnya dominasi PKI dalam kehidupan sosial-politik di Silungkang. PKI kemudian menangguk di air keruh. Rakyat dari berbagai lapisan sosial dan jenjang pendidikan mulai diprovokasi untuk menentang kolonial Belanda.

Sepanjang tahun 1926, suhu politik di Silungkang dapat dikatakan relatif panas akibat penangkapan massal para pemimpin Sarekat Rakyat, PKI, dan pemimpin partai-partai berhaluan kiri yang menggunakan azas perjuangan nonkooperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Masih dalam tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda juga melakukan pembrangusan terhadap penerbitan pers yang dinilai menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Pembrangusan terhadap pers tersebut didasarkan pada *pers breidel ordonnantie* yang diberlakukan dengan ketat untuk melumpuhkan perjuangan kemerdekaan.

Adapun *Pers Breidel Ordinantie* yang dikeluarkan itu merujuk kepada *wetboek van strafrecht* (KUHP) yang pada tanggal 15 Maret 1914 dilengkapi dengan ketentuan sebagai berikut:

Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan kepada pemerintah Belands atau Hindia Belanda, akan dihukum penjara selama 5-10 tahun.
Barang siapa, baik melalui tulisan, gambar maupun tindakan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara penduduk Belanda atau Hindia Belanda akan dihukum penjara selama 6 hari sampai 5 tahun. Usaha untuk melakukan kejahatan ini dapat dihukum.

Meskipun berada di bawah tekanan kondisi politik yang kurang menguntungkan, beberapa orang pengurus Sarekat Rakyat Silungkang tidak terpatahkan semangat perlawanannya. Mereka tetap berkoordinasi dengan PKI untuk menjalankan keputusan Prambanan. Kemudian hal itu bermuara pada ke ikutsertaan Sarekat Rakyat Silungkang dalam pemberontakan PKI di Sumatera Barat.

Namun demikian, perlu dicatat, pemberontakan yang terjadi di Sumatera Barat pada awal tahun 1927 itu tidaklah dapat dikatakan sebagai pemberontakan PKI semata, tetapi lebih merupakan

pemberontakan rakyat dalam melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Unsur PKI dalam pemberontakan tidaklah sebesar yang digambarkan selama ini oleh catatan sejarah. Jika dirunut, ternyata orang-orang yang memberontak tersebut berasal dari kaum cerdik pandai, ulama, dan tokoh masyarakat Minangkabau yang tidak punya pertalian dengan PKI.

Tidak terlepas dari persoalan ini, langkah-langkah persiapan pemberontakan di Silungkang memang dilakukan secara bertahap dan terencana. Paling tidak kenyataan itu dibuktikan melalui hasil rapat Sarekat Rakyat Silungkang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1926[37].

Rapat pimpinan cabang yang relatif panas itu menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pemberontakan dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 1927 tengah malam sehabis lonceng pukul 24.00 berbunyi.
2. Perencanaan pemberontakan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Komite Pemberontak dengan ketentuan semua SR (Sarekat Rakyat) di *Onder Afdeling* Sawahlunto/Sijunjung akan menerima instruksi-instruksi dalam waktu yang singkat.
3. Siapa yang membocorkan putusan ini kepada pihak musuh, imbalannya adalah nyawa si pelaku berikut nyawa keluarganya yang membocorkan tersebut.

Rapat Sarekat Rakyat pada hari Selasa tanggal 21 Desember 1926 juga berhasil menyusun Badan Komite Pemberontakan yang mencakup susunan Badan Komite Pemberontakan dengan pemimpin tertinggi; Thaib Ongah, (Sekretaris), M. Joesoef Sampono Kayo, (Bendahara/Perbekalan), Talaha gelar Rajo Sampono, (Komisaris), H. Djamaluddin, dan pemimpin Angkatan Perang dipegang oleh M. Thaib Ongah, sedangkan Komandan Barisan dan Strategi atau pengatur perlawanan adalah Rumuat dan Sersan Mayor Pontoh (anggota KNIL yang membelot).

Adapun Angkatan Perang Sarekat Rakyat Silungkang yang memiliki kekuatan 3.940 personil itu, antara lain bertugas merebut garnizun Sawahlunto, merebut Markas Polisi, merebut gudang senjata, merebut

---

[37] Pemda Tk. II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1833-1950*, (Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1990), hal 48

gudang dinamit Tambang Batubara Ombilin, melepaskan semua tahanan, dan memenjarakan pembesar-pembesar Hindia Belanda.

Perlawanan ini mereka rencanakan dilakukan pada empat front, yaitu front Muarokalaban, front Padangsibusuak, front Pamuatan, dan front Tanjuangampalu.

Sesuai dengan rencana, pada tanggal 1 Januari 1927 pukul 24.00, pasukan pemberontak mulai melakukan aksi. Namun demikian pada beberapa tempat pemberontakan mengalami kegagalan secara dini akibat adanya pengkhianatan. Bahkan pasukan inti yang terdiri atas 25 orang anggota militer/*KNIL* Sawahlunto yang dipimpin Sersan Mayor Pontoh dan Kopral Rumuat ditangkap dan dilucuti Belanda. Hal serupa juga dialami oleh beberapa anggota pasukan tempur lainnya.

Meskipun terjadi pengkhianatan, pemberontakan tetap dilakukan pada beberapa daerah lainnya di sekitar Silungkang. Pertempuran sengit antara lain terjadi di Lori, Auaduri, dan Muarokalaban serta di sekitar stasiun kereta api Sawahlunto.

Secara keseluruhan pemberontakan Silungkang menewaskan sekitar 600 orang pemberontak dan melukai ratusan lainnya. Pada pihak kolonial jumlah korban tewas juga tidak sedikit. Pada kemudian hari, Kantor Berita Aneta seperti dikutip koran Pandji Poestaka, hal 102, terbitan 1927, mewartakan bahwa di Silungkang juga terdapat pengadilan komunis yang telah menjatuhkan hukuman mati pada dua orang opas dan enam orang lainnya. Hukuman mati itu dilakukan malam hari tanggal 2 dan 3 Januari 1927.

Pemberontakan Sarekat Rakyat di Silungkang dipatahkan dengan mudah oleh pasukan pemerintah Hindia Belanda hanya dalam beberapa hari saja. Dalam hitungan minggu riaknya sepenuhnya dapat ditenangkan.

Para pemberontak yang tidak seluruhnya merupakan penganut komunisme, kemudian ditangkap dan diadili oleh hakim tunggal yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda. Pengadilan sepihak tersebut antara lain tercatat mengadili sekitar 4.000 orang yang terlibat dalam pemberontakan.

Banyaknya jumlah orang yang ditangkap membuat penjara Sawahlunto seakan seperti neraka.

Hal tersebut setidaknya dengan gamblang dituturkan oleh salah seorang tokoh pemberontakan, *A. Moeloek Nasution*.

Menurutnya penjara yang hanya berkapasitas untuk 250 orang hukuman, di isi oleh lebih dari 5.000 orang. Makanan yang diberikan

untuk para tahanan pun hanya senilai sekitar dua sen saja, dengan rincian sebagai berikut:

½ kati (ons) beras no.4 tambah jagung	f 0,008
Lauk (ikan asin) dan sayuran	f 0,008
Ekstra makanan hari Kamis dan Minggu	f 0,004
Jumlah	f 0,02

Mereka yang ditangkap tidak seorang pun luput dari penganiayaan. Pada minggu pertama, setelah pecah pemberontakan, lebih dari 1.400 orang yang ditangkap, dengan rincian 406 disekap di penjara Sijunjung, 200 orang di penjara Durian dan sisanya di penjarakan di Solok.

Vonis hakim tunggal atas pelaku pemberontakan Silungkang terdiri atas hukuman gantung sampai mati, dibuang ke Boven Digoel, hukuman seumur hidup, penjara 28 tahun, 25 tahun, dan sebagainya.

Pemberontak yang mendapat keringanan hukuman hanyalah orang-orang yang mampu membayar belasting (pajak) dan denda yang tinggi, dan yang menyerahkan diri atas kemauan sendiri.

Tokoh-tokoh pemberontak yang dihukum gantung berjumlah lima orang, yaitu Kamaruddin Mangguluang, M. Joesoef Sampono Kayo, Mohammad Zen dan Pokiah Ibrahim yang populer dipanggil Pokiah Ain.

Patut dicatat dan direnungkan, hakim menganjurkan kepada Kamaruddin Mangguluang agar meminta grasi kepada Ratu Belanda, Wilhelmina, sehubungan vonis mati yang diterimanya.

Kamaruddin Mangguluang menjawab anjuran tersebut dengan mengatakan,“ *Bukan saya yang patut minta ampun pada Wilhelmina, melainkan dialah yang mesti minta ampun kepada saya.”*

Selain itu, Kammaruddin Mangguluang meminta kepada Hakim agar hukuman mati dijalaninya di Pasar Silungkang. Ia juga meminta agar dagingnya di potong-potong dan dikirimkan kepada Ratu Wilhelmina. Sudah barang tentu permintaan Kamaruddin Mangguluang itu ditolak oleh hakim.

Selanjutnya pemberontakan komunis tahun 1926 dan 1927 itu membuat pemerintah Belanda memandang politik etis tidak lagi populer untuk dijalankan. Pemberontakan yang dilakukan orang-orang komunis dibantu oleh masyarakat dari berbagai paham yang berhasil dipengaruhinya itu dapat dikatakan merupakan pukulan telak yang mematikan politik etis.

Pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan beragam tindakan represif yang ditujukan untuk melumpuhkan perlawanan rakyat. Propaganda yang memberi *cap komunis* terhadap semua kekuatan yang melawan kekuasaan kolonial Belanda merupakan upaya untuk mengesahkan kematian perdana dan kematian perdata atas *élan vital* perjuangan.

Di bandingkan dengan pemberontakan di Banten yang dipadamkan oleh pasukan pemerintah kolonial dalam beberapa hari saja, perlawanan rakyat Silungkang memang lebih menumpahkan darah. Namun demikian, satu hal perlu dicatat, baik dalam pemberontakan di Banten maupun di Silungkang, peranan golongan non-komunis seperti guru, ulama, dan tokoh adat jauh lebih besar ketimbang peran orang-orang berhaluan komunis. Setidaknya hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah orang nonkomunis yang ditangkap dalam hubungan kedua pemberontakan itu.

Hal membanggakan dari tokoh-tokoh pemberontakan Silungkang ini adalah kenyataan tidak larinya mereka dari tanggungjawab atas perbuatannya. Hal itu tidak saja dibuktikan dengan berani oleh Kamaruddin Mangguluang, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa tokoh lainnya seperti diberitakan dalam koran Pandji Poestaka[38]:

"Pakih Ain dan Mohamad Zen gelar H. Radjo Dilangit, pemimpin-pemimpin hoeroe hara di Siloengkang jang dihoekom mati oleh Landraad Sawahloento, telah memasoekkan revisie atas poetoesan Landraad itoe.[39] (Kedoea orang ini dahoeloe telah menerangkan dimoeka hakim bahwa mereka soedah rela dihoekoem mati, tetapi mereka meminta soepaja pesakitan jang lain-lain minta dibebaskan karena menoeroet keterangannja, mereka berdoealah jang haroes memikoel segala kesalahan itoe, sebab jang lain-lain itoe berboeat sesoeatoenja karena adjakannya. Red. P.P). Demikian poela Hadji Mohamad Noer Ibrahim dan Hadji Imam Samad, jang dihoekoem oleh Landraad Padang dengan 7 dan 6 tahoenpoen, soedah memasoekkan revisie. (Sin.Sum)".

Berkaitan dengan pemberontakan Silungkang ini, Presiden pertama RI, Soekarno, memberikan penilaian sebagai *"Pemanasan untuk menghadapi perjuangan revolusi kemerdekaan yang lebih luas",* sedangkan Bung Hatta menilainya sebagai "*Refleksi kehendak rakyat Indonesia kepada dunia luar, bahwa rakyat Indonesia sungguh-sungguh ingin merdeka dari penjajahan"*

---

[38] Poestaka,Pandji, *Kroniek*, (koran Pandji Poestaka, 1927), hal 1017.
[39] Ibid, hal 1017.

Oleh pemerintah, peristiwa pemberontakan itu kemudian ditetapkan menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.39/1958, PP No.20/1960 dan PP No.5/1964. Melalui Keputusan Pemerintah tersebut para pelakunya diberikan gelar Perintis Kemerdekaan dengan mendapatkan hak tunjangan.

Setelah terjadinya pemberontakan Banten dan Silungkang, aktivitas pergerakan politik memang dibatasi dengan ketat dan tokoh-tokohnya banyak yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Walaupun demikian semangat melawan penindasan ternyata tidak pernah padam. Berbagai cara kemudian ditempuh untuk mencapai Indonesia merdeka. Pencapaian pertama yang terpenting adalah *Proklamasi Kebangsaan Indonesia* melalui *Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928*.

BAB V

EKSPLORASI BOVEN DIGOEL

AWAL PENJAJAHAN BELANDA DI IRIAN

Daerah Irian Jaya pada dasarnya baru dianggap pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari tanah jajahannya pada tahun 1823. Pada tahun 1848, Belanda kembali mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan Irian sebagai jajahannya. Untuk mempertegas perbatasan wilayah kekuasaan Jerman dan Australia di sebelah timur, maka dibuat batas-batas wilayah. Dengan adanya pernyataan resmi Belanda yang menyebutkan Irian sebagai jajahannya, maka persiapan-persiapan melalui perundang-undangan dan eksploitasi berkelanjutan disusul dengan langkah-langkah militer kolonial Belanda untuk memetakan Irian, dengan gencar dilaksanakan dalam kurun waktu 1907-1915 [40].

Namun demikian kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas daerah ini baru bersungguh sungguh diwujudkan pada akhir abad ke-19, dimulai dengan pembukaan pos Belanda di Daerah Manokwari dan Fak-Fak pada tahun 1898. Untuk mendirikan pemerintahan di Papua Barat itu, Parlemen Belanda mengesahkan pengeluaran anggaran sebesar 115 ribu gulden. Pada tahun 1902 Belanda juga membangun pos di Merauke, dan seperti juga Pos di Manokwari dan Fak-Fak, Pos Belanda di Merauke dipimpin oleh seorang *controleur* [41].

Belanda mulai tertarik untuk mengenal daerah pedalaman Irian sekitar tahun 1895. Salah satu faktor yang mendorong kolonial Belanda melakukan eksplorasi atas Irian, bersumber dari hasil penelitian yang mereka peroleh, yang menyebutkan adanya daerah yang mengandung emas.

Antara tahun 1900 dan 1914, lebih dari 140 ekspedisi, baik ekspedisi ilmiah, turne atau patroli, telah dilakukan oleh sejumlah ahli geografi, peneliti ilmu alam, pegawai-pegawai pamongpraja, dan militer Belanda dalam usaha mencari deposit emas itu.

---

[40] Paprindey, Elias, *Lintasan Peristiwa Sejarah Bangsa Indonesia Menuju Prolog Trikora di Papua Barat* (Jayapura, 2000), hal 2-5.

[41] Pigay BIK, Decki Natalis, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal 118.

EKSPLORASI DIGOEL

Memasuki abad ke-20, Boven Digoel atau Digoelatas yang terletak sekitar 300 km memudiki Sungai Digoel, tetap merupakan daerah terpencil yang berbahaya. Daerah tersebut di huni oleh berbagai suku, mulai dari suku Muyu hingga suku Kaya-Kaya yang masih memiliki kebiasaan mengayau atau memenggal kepala manusia. Bahkan sampai pada permulaan abad ke-20 kawasan sepanjang tepian Sungai Digoel memang dihuni oleh berbagai suku yang masih primitif.

Nama *Digoel* sendiri berasal dari kata *Dugu* yang dalam bahasa suku *Maring* berarti *sungai di tengah hutan rimba yang berawa-rawa*.

Daerah yang berawa-rawa itu dapat dikatakan sulit ditempuh. Selain ditutupi oleh hutan belantara, daerah yang terletak di tepian Sungai Digoel ini juga terkenal karena buaya serta nyamuk malarianya yang mematikan.

Secara geografis, Daerah Boven Digoel terletak di Kecamatan Mandobo, Kabupaten Merauke, Irian Jaya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, secara administratif Irian termasuk dalam Keresidenan Maluku sesuai dengan keputusan Gubernur Timur Besar yang dimuat dalam Bijblad No.14377.

Khusus kawasan selatan Irian, *Zuid Nieuw Guinea*, sejak tahun 1902 diputuskan pemerintah Belanda menjadi satu *afdeling* tersendiri, tetapi kemudian keputusan tersebut dihapus dan dipersempit dengan membentuk *onderafdeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *controleur* dan di bawahnya berada apa yang disebut *bestuurresort* di Boven Digoel dan empat *bestuurresort* di Merauke.

Eksplorasi pertama atas Daerah Boven Digoel dilakukan pada tahun 1905, ketika Sungai Digoel diarungi oleh kapal uap *Valk* dengan menempuh jarak 540 kilometer dari muara sungai. Eksplorasi tersebut tercatat mencapai suatu daerah yang terletak sekitar 30 kilometer dari hilir sungai, daerah mana kemudian dinamakan Tanahtinggi.

Pada tahun 1909 penjelajahan kembali dilakukan dengan menggunakan kapal uap *Zwaluw*. Kapal uap tersebut tidak hanya memudiki Sungai Digoel, tetapi juga mengarungi cabang-cabangnya seraya memetakannya untuk kepentingan eksplorasi sumber daya alam, sekaligus untuk mempasifikasi penduduk asli Irian.

Sejak itu pemerintah kolonial Belanda acapkali mengirimkan misi-misi eksplorasi memudiki Sungai Digoel. Salah satu eksplorasi

terpenting adalah ekspedisi yang dilakukan oleh militer Belanda bersama para misionaris Katolik pada tahun 1912 dan 1913. Ekspedisi yang sekaligus eksplorasi, juga disertai misi penyebaran agama Katolik itu dimungkinkan karena Gubernur Jenderal Idenburg melalui suatu surat yang dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 1912 menetapkan garis-garis pemisah wilayah pengembangan agama di Irian. Ia menetapkan, penyebaran agama Katolik dilakukan di Wilayah Selatan Irian dan agama Protestan penyebarannya dilakukan di Wilayah Utara Irian [42].

Penetapan garis pemisah wilayah penyebaran agama itu tidak terlepas dari strategi pemerintah kolonial untuk melegitimasi kekuasaannya yang tidak terbatas. Bila pihak elite politik Belanda sendiri melakukan suatu kebijaksanaan politik yang berkedok moralitas puritan secara leluasa khususnya pada Era Ratu Wilhelmina, maka di koloni mereka, politik represif tersebut dapat dilancarkan tanpa kritik dan tantangan yang berarti.

Penyebaran agama Katolik di hulu Sungai Digoel sesungguhnya erat kaitannya dengan aktivitas organisasi penyebaran agama Katolik, *Missionarissen van het Heilige Hart* (Misi Hati Suci) yang membuka pusat penyebaran agama di Merauke. Misi Katolik Roma itu masuk ke kawasan selatan Irian pada tahun 1892 atau dua tahun lebih dahulu dibandingkan pembukaan pos pemerintah [43].

Pada tahun-tahun awal berdirinya, berbagai upaya yang dilakukan *Missionarissen van het Heilige Hart* memang tidak banyak hasilnya. Namun demikian, penyebaran agama Katolik yang mereka lakukan terhadap suku Muyu di hulu Sungai Digoel dapat dikatakan relatif berhasil. Pada tahun 1933, misi Katolik di Kawasan Selatan Irian tercatat berhasil membaptis 7.100 orang.

Secara umum aktivitas penyebaran agama yang mereka lakukan terkait pula dengan upaya peningkatan kesehatan penduduk, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, pengembangan ekonomi, dan pembangunan permukiman-permukiman percontohan bagi penduduk asli Irian.

---

[42] Kuruwaib, A., *Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke Periode 1927-1969* (Merauke, cetak stensil, 1989), hal 13.

[43] Bachtiar, H.W., *Sejarah Irian Jaya* (Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Editor: Koentjaraningrat, dkk., Jakarta Penerbit Djambatan, 1994, hal 57.

Pada tahun 1926, pemerintah Hindia Belanda kembali mengirimkan tim eksplorasi ke hulu Sungai Digoel. Tim yang dipimpin Asisten Bestur Marks dan dokter. A. Kalthofen tersebut berhasil memilih suatu tempat bernama Tanahmerah untuk dijadikan pos pemerintah Hindia Belanda.

Atas dasar laporan berbagai tim ekspedisi yang menghulu Sungai Digoel, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengetahui dengan pasti bahwa daerah Tanahmerah memang sangat sukar ditembus manusia. Barang siapa yang berhasil memasuki daerah itu, akan sulit untuk keluar kembali dengan selamat. Tempat itu dinilai cocok untuk dijadikan lokasi pengasingan bagi mereka yang melawan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda berkeyakinan bahwa orang-orang yang akan diisolasi atau diasingkan di Boven Digoel tidak akan dapat keluar hidup-hidup jika melarikan diri.

Daerah Boven Digoel merupakan penjara alam yang efektif untuk membungkam aktivitas pergerakan menentang Belanda. Keterpencilannya diharapkan mampu mematahkan semangat dan meruntuhkan morel para perintis kemerdekaan.

PEMBUKAAN KAMP DIGOEL

Berdasarkan laporan-laporan tim ekspedisi, selanjutnya pemerintah Hindia Belanda membuka kamp isolasi Boven Digoel di kawasan Tanahmerah sekitar 300 km dari muara Sungai Digoel. Legalitas pembukaan Kamp Digoel didasarkan kepada *Exorbitante Rechten* yang dituangkan dalam *Indische Staatsregeling Pasal 37* yang intinya memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuang atau mengasingkan orang-orang yang dianggap pengacau ketentraman dan ketertiban umum ke suatu tempat yang khusus ditunjuk untuk waktu yang tidak terbatas.

Proses pengasingan menurut peraturan pemerintah Hindia Belanda dilakukan setelah mendengar pendapat Dewan Hindia (*Raad van Indie*). Orang yang akan dibuang juga diberi hak untuk membela diri. Bahkan *Volksraad* juga diberi kesempatan mengkaji atau mengkritik keputusan pembuangan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya proses hukum itu tidak dijalankan. Pembuangan umumnya cukup dilakukan dengan berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal saja [44].

---

[44] Amran, Rusli, *Cerita-Cerita Lama dalam Lembaran Sejarah* (Jakarta, Balai Pustaka, 1997).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penggagas pembentukan kamp isolasi atau kamp pengucilan Digoel di antaranya adalah para ilmuwan orientalis yang sehari-harinya berkantor di *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenchappen* (sekarang Museum Nasional) seperti, Profesor B.J.Oschrijke, Dr. D.A. Rinkes dan Maijer Ranneft.

Gagasan untuk membangun koloni pengucilan itu timbul sehubungan dengan semakin memanasnya kondisi politik di Hindia Belanda berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi politik seperti Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Serikat Buruh, Sarekat Rakyat, dan lain-lain.

D.A. RINKES

Berbagai kegiatan gerakan nasional di Hindia Belanda pada dua dekade pertama abad ke-20 itu memang terkait dengan perubahan internasional, khususnya kebangkitan gerakan rakyat di Cina, Turki, dan juga di India. Keberhasilan Revolusi Bolsyevik di Rusia pada tahun 1917 juga merupakan momentum penting yang memberi dorongan

terhadap berbagai gerakan rakyat terjajah dalam menentang kolonialisme.

Selain dimaksudkan untuk mematahkan semangat perlawanan para tokoh pergerakan, pembangunan kamp isolasi Digoel juga tidak terlepas dari maksud Belanda untuk memperluas koloninya ke Irian. Setidaknya hal itu jelas tergambarkan dalam pidato Maijer Ranneft di *Volksraad.* Dia mengatakan bahwa Digoel dibangun dalam usaha mempasifikasi Irian dengan membuka hutan-hutan perawan untuk perkebunan karet, kopi, dan tanaman ekspor lainnya. Tenaga-tenaga untuk membuka hutan dan menanam karet tersebut dilakukan oleh orang buangan yang berasal dari unsur-unsur komunis –orang-orang mana terkena *exorbitante rechten* dari pemerintah kolonial.

Pada hari Kamis tanggal 18 November 1926, seminggu setelah pemberontakan PKI di Banten dan beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa, Gubernur Jenderal de Graeff memerintahkan pembukaan koloni isolasi Digoel dengan tujuan tunggal, yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketenangan dalam daerah-daerah yang terancam.

Tugas untuk membuka koloni isolasi tersebut diserahkan kepada Kapten L.Th Becking, seorang perwira Belanda yang memimpin penumpasan pemberontakan PKI di Banten.

Setelah meletusnya pemberontakan di Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 1927 Kapten Becking dengan menumpang kapal pemerintah *Fomalhout* dikirim ke hulu Sungai Digoel untuk mencari dan mendirikan kamp tawanan, jauh dari Pulau Jawa.

Pada tanggal 16 Maret 1927 Kapten L. Th. Becking beserta 120 prajurit dan 60 pekerja paksa, mulai membuka hutan belantara di tepian Sungai Digoel untuk dijadikan koloni pengucilan bagi orang-orang yang dinilai pemerintah Hindia Belanda sebagai orang komunis pengacau dan pengganggu ketertiban umum [45].

Dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Jenderal yang dikeluarkan pada hari jum'at tanggal 10 Desember 1926, Boven Digoel ditetapkan menjadi satu wilayah pemerintahan yang berpusat di Tanahmerah.

[45] Bachtiar, H.W., *Sejarah Irian Jaya* (Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Editor: Koentjaraningrat, dkk., Jakarta Penerbit Djambatan, 1994), hal 59.

PENJARA DIGOEL DAN ORANG BUANGAN

Selain membangun pos Tanahmerah, Kapten L.Th. Becking juga melakukan perjalanan ekspedisi menyusuri beberapa sungai di Wilayah Selatan Irian. Sungai-sungai yang disusurinya antara lain Sungai Mandobo, Sungai Kau, Sungai Muyu, Sungai Birin, dan anak Sungai Alice di Wilayah Irian Timur.

Bersandar kepada laporan hasil ekspedisi tersebut, kolonial Belanda sampai pada suatu ketetapan yaitu menjadikan pos Tanahmerah sebagai pusat koloni isolasi bagi para pemberontak.

Dengan demikian, pembukaan Boven Digoel dengan Ibu Kotanya Tanahmerah sebagai koloni isolasi atau pengucilan dimaksudkan antara lain untuk:

1. Menyembunyikan sekaligus mengasingkan para pejuang agar mereka tidak lagi menyuarakan gagasan-gagasan perlawanan mereka.
2. Menjauhkan pengaruh para pejuang terhadap rakyat.
3. Memutuskan kontak politik para pejuang, baik kontak politik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Mematahkan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda melalui pengucilan total yang meruntuhkan morel para pejuang.

Gelombang pertama tawanan politik yang diberangkatkan ke Tanahmerah, Boven Digoel adalah orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Banten tahun 1926 dan pemberontakan Silungkang pada tahun 1927.

Rombongan pertama tawanan politik yang didigoelkan itu berjumlah 823 orang, termasuk di dalamnya 15 orang wanita dan 10 orang keturunan Cina. Mereka tiba di koloni isolasi Boven Digoel pada tanggal 3 Mei 1927.

Menurut daerah asalnya rombongan pertama digoelis kebanyakan berasal dari Pulau Jawa yakni sejumlah 692 orang, dari Sumatera sebanyak 97 orang, dan sisanya 34 orang berasal dari Maluku.

Adapun dari segi umur komposisi para digoelis tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Jumlah
1.	< 20 tahun	9 Orang
2.	20 thn s/d 29 thn	422 Orang
3.	30 thn s/d 39 thn	279 Orang
4.	40 thn s/d 49 thn	81 Orang
5.	> 50 tahun	32 Orang

Sumber : A.Kuruwaib, Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke,1989.

Berdasarkan pekerjaannya, 823 digoelis rombongan pertama itu antara lain terdiri atas 383 orang pegawai, 79 orang petani, dan 361 orang sisanya adalah para guru, sopir, pedagang, dan anggota Sarekat Rakyat/PKI.

Pada bulan Februari 1929 jumlah populasi koloni Digoel mencapai 2100 orang, terdiri atas 1170 orang pria, 430 orang wanita, dan 500 orang anak-anak.

Menurut dr. R. Broers yang pernah bertugas di Boven Digoel, pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah kolonial sehubungan pembukaan koloni pengucilan Boven Digoel adalah sekitar dua juta gulden setiap tahunnya. Pada tiga bulan pertama tahun 1928 pemerintah kolonial mengeluarkan biaya sampai 320 ribu gulden untuk keperluan pembangunan tempat pengasingan, dan 160 ribu gulden untuk anggaran rutinnya[46].

Pada tahap awal pembangunannya, koloni isolasi Boven Digoel dibangun asal jadi saja. Para tawanan, di bawah ancaman senapan dipaksa membuka lahan untuk tempat tinggal mereka sendiri. Kerja paksa membangun koloni Digoel yang dilakukan selama dua bulan itu antara lain mencakup pembangunan barak, gudang, stasiun radio, kantor pos, rumah sakit, dan tempat mandi besar (*badvlot*) untuk tentara dan tawanan pada aliran Sungai Digoel.

Sebelum kapal pengangkut rombongan pertama orang buangan tiba, dilakukan pembukaan tanah suatu daerah yang letaknya kurang lebih 20 meter di atas permukaan air sungai. Pembukaan lahan di kawasan berlereng curam di daerah rimba Tanahmerah itu dilakukan oleh 120 orang serdadu dan 60 orang hukuman. Mereka membuka dan membersihkan daerah tersebut dari pepohonan yang tumbuh rapat.

---

[46] Kuruwaib, A., *Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke* (Merauke, Cetak Stensil, 1989), hal 35.

Pekerjaan yang dipimpin Kapten L. Th. Becking dan Letnan Drejer itu berlangsung sekitar dua bulan, menghasilkan tanah kosong seluas kira-kira 0,3 km X 0,5 km. Lahan itulah yang kemudian dijadikan tempat pengasingan Boven Digoel, kamp konsentrasi yang diakui banyak pihak sebagai yang pertama di dunia!

Setelah rombongan interniran pertama tiba di Digoel, mereka kemudian diwajibkan membangun rumah-rumah untuk rombongan berikutnya, serta membuat dan membuka jalan. Berkaitan dengan pembukaan jalan dan pembuatan rumah ini, koran *Pandji Poestaka* waktu itu memberitakan sebagai berikut[47]:

…Pada hari-hari jang pertama, mereka itoe mengoeroes dan mengatoer baraknja masing-masing dan akan menjelesaikan barak bagi saudara-saudaraja jang akan menjoesoel sedikit waktoe lagi. Kajoe dan ramoe-ramoean jang lain, soedah banjak disediakan.

Kampoeng jang akan diboeat oentoek mereka itoe, djaoehnja kira-kira 3 K.M dari barak sekarang. Oentoek djalannja sodah dirambah, lebarnja 3 M. lebih. Djika djalan itoe soedah siap, laloe akan dimoelaikan memboeat kampoeng itoe menoeroet tjontoh jang soedah diboeat. Tiap-tiap orang akan mendapat soeatoe pekarangan; disitoe nanti didirikan seboah roemah menoeroet tjontoh poela. Kemoedian masing-masing akan diberi sebidang tanah oentoek perladangannja.

Kapten Becking berdjandji hendak memberikan segala toendjangan jang boleh diberikannja, asal sadja mereka itoe menjatakan soeka bekerdja. Kepada orang interneran itoe diberi tahoekan poela, bahwa tiap-tiap seminggoe sekali akan dibagikan makanan mentah dan keperloean-keperloean jang lain…

Di koloni pengasingan ini, tempat orang-orang buangan dipisahkan oleh sebuah jurang dari tempat kesatuan militer yang ditugaskan menjaga mereka.

Kesatuan Militer yang bertugas pada masa awal koloni Digoel terdiri atas 80 personel yang terbagi dalam empat regu. Mereka selain bertugas mengawasi para interniran dan menjaga keamanan, juga bertugas melakukan patroli ke hutan-hutan sekeliling koloni untuk mengamankan Tanahmerah.

Secara keseluruhan, daerah pengasingan Digoel terbagi dalam beberapa bagian, di antaranya adalah Tanahmerah di Boven Digoel atau Digoelatas, Gudangarang (tempat penyimpanan batu bara),

[47] Poestaka, Pandji, *Orang-Orang Kominis Sampai Ke Tanah Merah (Boven Digoel),* (Pandji Poestaka, 1927), hal 562.

Markas/zone Militer yang juga menjadi tempat para petugas pemerintah, dan Penjara Tanahtinggi.

Boven Digoel atau Tanahmerah terbagi dalam tiga bagian terpisah, yakni:

1. Kawasan untuk pemerintah sipil, terletak dekat pelabuhan, dipisahkan oleh jalan kerikil dan di kiri-kanannya dibangun rumah-rumah serta kantor pemerintah.
2. Kawasan Militer, terdiri atas dua bangsal, Kantor Komandan, gudang, dan dapur umum.
3. Kawasan penjara, terdiri atas rumah-rumah tahanan, kantor pegawai pemerintah, Balai Pertemuan, bengkel, dan mesjid.

Penjara Digoel dikelilingi kawat berduri yang memisahkannya dari Markas Militer. Pemasangan kawat berduri tersebut lebih dimaksudkan untuk melindungi aparat militer kolonial dari serangan para digoelis dan penduduk setempat yang masih kanibalistis.

Menurut digoelis, I.F.M. Chalid Salim, Kamp Militer Digoel terdiri atas beberapa barak militer, kantor komandan garnisun, gudang amunisi, stasiun radio, penjara, dan dapur umum. Semuanya dibangun dengan tergesa-gesa pada tahun 1927.

Militer Belanda yang bertugas di Digoel terdiri atas tujuh peleton infantri yang dikomandoi oleh seorang perwira Eropa atau pribumi berpangkat sersan. Selain bertugas melakukan penjagaan, baik di Tanahmerah, Gudangarang, dan Tanahtinggi, mereka secara berkala juga melakukan patroli ke seluruh Wilayah Digoel. Salah seorang anggota patroli tersebut, Petrus Komayap, berpendapat bahwa tantangan terberat sewaktu melakukan patroli di sekitar Wilayah Digoel adalah sikap tidak bersahabat suku Kaya-Kaya, ancaman nyamuk malaria, dan serangan buaya di rawa-rawa sekitar Kawasan Digoel yang disisir.

Khusus untuk orang buangan yang dinilai kolonial Belanda sebagai keras kepala dan sulit diperbaiki, pemenjaraannya dilakukan di kamp Tanahtinggi sekitar 40 kilometer lebih ke hulu dari Boven Digoel. Kamp Tanah tinggi terletak di atas bukit di pinggir Sungai Digoel yang dikelilingi rawa-rawa dan jurang dalam. Luas keseluruhan kamp Tanahtinggi adalah 1200 meter persegi. Saat ini yang tersisa dari kamp ini hanyalah pondasi Pos Penjagaan peninggalan tahun 1926/1927 yang mencakup areal 9 m X 15 m. Tempat tinggal para tahanan politik di Tanahtinggi terletak sekitar satu setengah meter dari pos penjagaan,

tepatnya di ceruk jurang sedalam sembilan meter. Seperti juga di Boven Digoel dan Gudangarang, tempat ini merupakan sarang nyamuk malaria. Banyak digoelis yang meninggal dunia akibat penyakit malaria di kamp Tanahtinggi. Kamp Tanahtinggi yang terletak sekitar 40 kilometer dari kamp Tanahmerah ditempuh melalui jalur sungai dengan waktu tempuh sekitar tiga jam perjalanan.

Para digoelis yang selamat, kemudian hari melukiskan Tanahmerah sebagai daerah malaria yang paling buruk di Papua. Sementara Tanahtinggi digambarkan sebagai tempat di mana orang dipaksa dan dikutuk untuk hidup setengah mati di tengah lecutan penyakit demam malaria.

DERITA HIDUP PARA DIGOELIS

Gambaran memprihatinkan kondisi yang dialami para digoelis setidaknya tercermin dari surat seorang digoelis kepada Bung Hatta yang intinya menyebutkan bahwa Digoel tidak lagi sebuah tempat. Kematian terus-menerus tersenyum kepada kami. Ia menjadi timbunan penderita paru-paru dan penderita malaria, penderita sakit jiwa dan setengah gila, di bawah panas menyengat matahari khatulistiwa yang tak kenal ampun, dikelilingi oleh rawa-rawa yang tak sehat di tengah-tengah hutan belantara yang tak bisa ditembus.

Seorang digoelis lainnya, Mohammad Ihsan mengatakan bahwa penyakit malaria adalah wabah paling menakutkan di Digoel. Kematian terbanyak akibat malaria menurutnya terjadi antara bulan Juli 1928 hingga bulan Juli 1929. Ditambahkannya, pada tahun itu seseorang dapat terserang malaria sampai empat kali [48]. Seorang digoelis lainnya, Mohamad Bondan, mencatat bahwa dari bulan Juni 1928 hingga bulan Desember 1930 terdapat 161 kasus penyakit demam hitam di koloni Digoel. Penyakit demam hitam merupakan sejenis penyakit malaria yang mengakibatkan terjadinya pendarahan

[48] Hasjmy, A., *Tanah Merah-Digoel Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hal 107.

DENAH KOMPLEKS PENJARA BOVEN DIGOEL
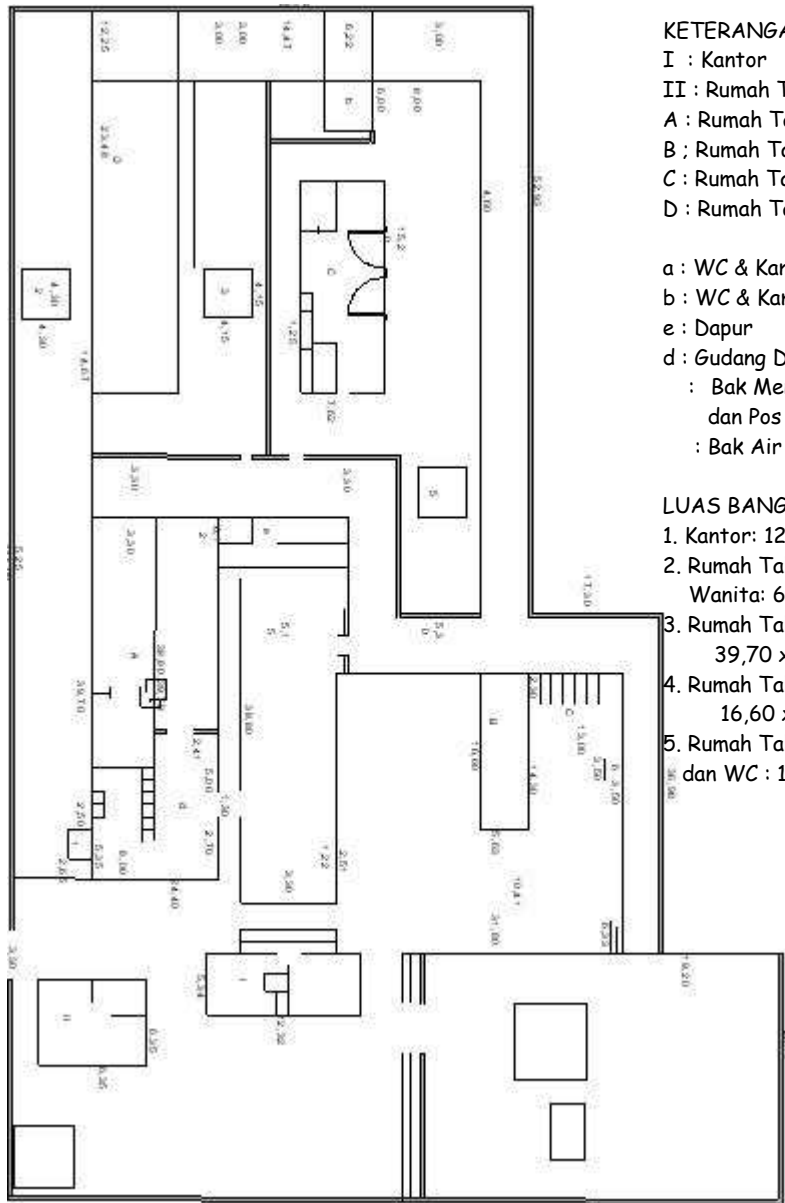
6. Rumah Tahanan D :
 23,48 x 8,06 = 189,249
7. WC/Kamar Mandi a :
 6,12 x 5,15 = 31,518
8. WC/Kamar Mandi b :
 6.22 x 6.00 = 37.32

10. Bak Menara Air 1 :
 2,65 x 2,50 = 6,625
11. Bak Air 2 : 4,30 x 4,30 = 18,49
12. Bak Air 3 : 4,15 x 4,15 = 7,223
13. Bak Menara Air 4 dan Pos
 Jaga: 1,23 x 1,05 = 1,29

14. Bak Menara Air 5 dan Pos
 Jaga : 3,95 x 3,95 = 15,603
15. Bak Air 6 : 5,50 x 3,50 = 12,
16. Gudang Dalam Tanah :
 5 x 2,4 x 1,83 = 22,293

di dalam tubuh sehingga menyebabkan air seni penderita berwarna hitam. Tidak seluruh penderita penyakit demam hitam dapat diobati di rumah sakit Tanahmerah. Sedikitnya 20 orang penderita terpaksa dikirim ke Ambon untuk berobat. Masih menurut catatan Mohamad Bondan, kasus kematian tertinggi akibat penyakit di Digoel terjadi pada tahun 1931, yakni mencapai 44 kasus kematian[49].

Untuk mengatasi serangan penyakit malaria yang menelan banyak korban itu, pihak kolonial Belanda menugaskan dr. W. Mooij dan dr. J. Gosling serta dr. L.Y.A Schoonheyt. Kerja keras ketiga dokter itu (meskipun tidak sepenuhnya berhasil) memberantas penyakit malaria setidaknya lumayan untuk menekan angka kematian yang diakibatkannya.

Meski mengakui bahwa dokter diperlukan oleh warga Digoel, sikap para tahanan terhadap dokter-dokter yang bertugas tidaklah simpatik. Dokter yang umumnya datang dua minggu sekali untuk memeriksa kesehatan para tahanan. Pada suatu ketika mesin perahu motor mati dan ketika dokter yang naik perahu tersebut melemparkan tali ke arah orang-orang buangan agar membantunya melabuh, tali tersebut dibiarkan saja oleh orang-orang buangan yang berada di tepi Sungai Digoel. Orang-orang buangan tersebut malah bersorak gembira ketika perahu motor sang dokter hanyut ke hilir [50].

Dalam pada itu, tokoh-tokoh yang dinilai paling keras kepala oleh kolonial Belanda ditempatkan di Tanahtinggi. Pada masa awal pembukaannya, 125 orang tahanan di tempatkan di Tanahtinggi. Kebanyakan dari mereka adalah para tokoh komunis yang terlibat pemberontakan 1926/27 antara lain, Aliarcham, Sardjono, Ngadiman, dan Winanta.

Salah seorang mantan opsir tentara Belanda yang bertugas mengantar makanan ke kamp Tanahtinggi, Petrus Komayap, berkata, " *Kalau soal makanan mereka memang setengah mati sebab jatah makanan untuk tawanan di Tanah Tinggi sangat dibatasi. Mereka umumnya mendapat penjatahan untuk lima hari. Sedangkan jatah pakaian mereka terima tiap tiga bulan sekali."* [51]

---

[49] Bondan, Molly, *Spanning a Revolution!* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal 124.

[50] Bijkerk, J.C., *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat Yang Lebih Baik* (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1988), hal 41.

[51] Wawancara: Tanggal 15 Desember 1991.

Jumlah penghuni kamp Tanahtinggi memang menurun tajam dari waktu ke waktu. Pada tahun 1927 jumlahnya tercatat 125 orang, tahun 1934 turun menjadi 80 orang terdiri atas 70 orang pria, empat orang wanita, dan enam orang anak-anak. Pada tahun 1939 jumlahnya tinggal 38 orang saja. Penyusutan jumlah penghuni kamp Tanahtinggi tersebut bukan saja disebabkan yang bersangkutan meminta ampun kepada pihak kolonial, melainkan juga disebabkan meninggalnya banyak tawanan akibat penyakit malaria, paru-paru, dan kekuarangan gizi.

Salah seorang tokoh terkemuka penghuni Tanahtinggi yang meninggal dunia akibat malaria adalah Aliarcham, ia merupakan salah seorang pemimpin PKI dalam pemberontakan 1926/1927. Sesungguhnya Aliarcham sempat dievakuasi ke Tanahmerah di bawah pengawasan dr. Schoonheyt, tetapi dalam perjalanan kira-kira satu kilometer menjelang Tanahmerah, ia meninggal dunia. Hal serupa juga dialami Marco Kartodikromo. Tokoh perintis pers nasional ini tiba di Digoel pada tanggal 21 Juni 1927 bersama dengan 63 orang buangan lainnya. Ia dibuang ke Digoel lantaran aktifitas politik dan ketajaman buah penanya dalam menggugat kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Tokoh pers berhaluan kiri itu meninggal dunia akibat penyakit malaria yang dideritanya pada tahun 1932.

Pemerintah kolonial Belanda menamakan orang-orang buangan di Tanahtinggi sebagai *kelompok naturalis*. Kelompok tersebut dinilai berhaluan keras dan menolak kerja sama dengan pemerintah Belanda. Rata-rata mereka adalah pemimpin politik dari berbagai aliran. Pengasingan di Tanahtinggi dimaksudkan untuk memutuskan hubungan mereka dengan pengikut masing-masing. Oleh pemerintah, mereka yang ditawan di kamp Tanahtinggi diberi makan sekedar cukup untuk hidup. Kebutuhan lainnya harus diusahakan sendiri oleh para tawanan. Sebidang tanah sempit disediakan untuk mereka gunakan menanam sayuran. Hasilnya tidak boleh diperdagangkan, apalagi dibawa masuk ke wilayah pemerintah dan wilayah militer.

DAFTAR NAMA TAHANAN
TANAH TINGGI

No.	Nama	Nomor Tahanan	Daerah Asal
1.	Budisucitro	1	Jawa Barat
2.	Sarjono	8	Priangan, Jawa Barat
3.	Ali Archam		Jawa Tengah
4.	Haji Khatib		Banten
5.	Dahlan		Jawa Barat
6.	Winata		Jawa Barat
7.	Rakun alias Sukirno	380	Madiun, Jawa Timur
8.	Cokrosumarto	47	Yogyakarta
9.	Kusmeni	62	Yogyakarta
10.	Subeti	457	Surabaya
11.	Gusti Johan Idrus	210	Kalimantan
12.	J. Woworuntu	1271	Manado
13.	Sumedi	185	Priangan, Jawa Barat
14.	H. Mansyur	676	Priangan, Jawa Barat
15.	Kacung	198	Jakarta
16.	Harjosupartoalias Ngadiman	589	Jember, Jawa Timur
17.	Surip	889	Pekalongan, Jawa Tengah
18.	Haji Datuk Batuah	505	Sumatera Barat
19.	Liman	21	Karawang, Jawa barat
20.	Moh. Toha alias Sutisno	393	Madiun
21.	Moh. Isa	1022	Banten
22.	Sudarso	365	Palembang
23.	Sumanto	461	Surabaya
24.	Suleman	773	Semarang
25.	Sujadi	884	Tegal, Jawa Tengah
26.	Jayadireja	23	Karawang
27.	Ditawilastra	35	Priangan, Jawa Barat
28.	Moh. Gaos	733	Semarang
29.	Joyodisastro	855	Blitar, Jawa Timur
30.	Suwiryo	576	Pekalongan, Jawa Tengah
32	Suradi	1297	Solo, Jawa Tengah
33.	Alibasah Winata	508	Jawa Barat
34.	Moh Isa Gelar Sutan Saidi	-	Sumatera Barat
35.	Suratmaji	943	
36.	Kartodanujo	131	
37.	Sunardi	148	
38.	Musirin	462	
39.	Puradisastra / Suleman Oli	1346	
40.	Kusno Gunoko	10	Kediri
41	Amin Kartosaputro	118	

No.	Nama	Nomor Tahanan	Daerah Asal
42.	Suratno	188	
43.	Nutokalimun	238	
44.	Prawiromiharjo	509	
45.	Nurati	878	
46.	Arif Fadillah	1220	
47.	Achmad Subrata	17	Priangan, Jawa Barat
48.	Kasmeni	46	Yogyakarta
49.	Ongko.D	117	Surabaya
50.	Prawiroharjo (O.O)	201	Kediri, Jawa Timur
51.	Sugeng	309	Jember, Jawa Timur
52.	Nurut	341	Sulawesi
53.	Udin	346	Sulawesi
54.	Ranuwisastro	367	Banyumas, Jawa Tengah
55.	Hasan Mangkuto	390	Madiun
56.	Yusuf	418	Ponorogo, Jawa Timur
57.	Wiro Sudarmomiharjo	510	Yogyakarta
58.	Abdul Mutalib	578	Pekalongan, Jawa tengah
59.	Abdul Wiryosuparto	713	Semarang
60.	Suwitodiharjo	856	Blitar, Jawa Timur
61.	R. Safiudin	880	Pekalongan, Jawa tengah
62.	Hadiwardoyo	932	Madiun
63.	Hasanuddin	1009	Banten
64.	Mitrosentono	1149	Klaten, Jawa Tengah
65.	Mangkudun Sati	1246	Sumatera Barat
66.	Daniel Kamu	1308	Manado
67.	Kadirun	784	Semarang
68.	Heruyuwono		Jawa Barat
69.	Diposukarto		
70.	Surodisastro		
71.	Walmin Reksosiswoyo		
72.	Dulrachman		Jakarta
73.	Mohammad Senan		
74.	Hasanuddin		Padang, Sumatera Barat
75.	Udin Sutan Sati		Bukittinggi, Sumatera Barat

Sumber: Molly Bondan, *Spanning a Revolution*, Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Diseret oleh perjalan waktu, Tanahmerah terus berkembang menjadi kota kecil. Dalam kawasan koloni isolasi ini, selain dibangun kantor pemerintah, juga dibangun perumahan dan Rumah Sakit Wilhelmina serta mesjid. Misi Katolik juga tercatat membangun dua sekolah di Tanahmerah. Selain itu, di Tanahmerah juga dibangun Balai Pertemuan Rakyat, beberapa toko milik pedagang Cina, warung makanan, dan lapangan sepak bola serta lapangan tenis.

Perkembangan daerah Tanahmerah tersebut bukan berarti efektif memupus rasa sepi dan terasing yang dialami para digoelis. Tekanan mental tetap mereka rasakan. Semuanya itu bermuara pada gangguan kejiwaan bagi mereka yang tidak tahan menderita. Tekanan tersebut juga acapkali memicu perkelahian sesama digoelis. Adakalanya perkelahian tersebut berakhir dengan kematian.

Perkelahian sesama tawanan sering pula terjadi di Tanahtinggi. Pada hari Rabu sore tanggal 24 Agustus 1932 misalnya, Mangkoedoem Sati dari Sumatera Barat mandi darah akibat 23 luka bacokan. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 1934 perkelahian antara Soewardjo dari Jawa dengan Idroes dari Sumatera berakhir dengan dibantainya kedua orang tersebut secara beramai-ramai oleh para interniran.

Pada tahun 1933, seorang psikiater Indonesia, dr. Muhammad Amir, menulis laporan mengenai perubahan perilaku orang-orang buangan. Laporan tersebut menyebutkan ada 30 kasus yang mengindikasikan kasus gila atau psikopat berat [52].

Berbagai cara diupayakan Belanda untuk meredam konflik sesama tawanan di Boven Digoel. Selain mengupayakan pembentukan tim kesebelasan sepak bola, tim kesenian, juga dilakukan pemutaran film secara berkala. Rutinitas kehidupan para digoelis pun diatur sedemikian rupa agar mereka dapat menghalau rasa sepi yang menghantui kehidupan sehari-hari.

Secara kronologis, rutinitas keseharian para digoelis dimulai dengan kegiatan berbaris dan apel pagi sekaligus melaporkan diri sebelum menghadapi tugas masing-masing. Di Digoel, umumnya setiap tawanan diberi pekerjaan dan di gaji 40 gulden setiap bulannya dengan syarat harus membelanjakan penghasilannya di toko pemerintah.

Kepada mereka juga diberikan seperangkat barang kebutuhan mendasar secara cuma-cuma seperti, tikar, selimut, kelambu, alat-alat

---

[52] Bijkerk, J.C., *ibidem*, hal 40.

dapur, dan perabot rumah tangga lainnya. Kursi dan meja mereka dapatkan dengan cara membeli atau membuatnya sendiri.

Para interniran dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan masing-masing. Dan untuk mengkoordinasikan mereka, ditunjuk seorang tokoh pemimpin komunis, Sardjono, sebagai kepala kampung.

Derita hidup yang dialami para digoelis waktu itu telah menjadi wacana umum pada kalangan orang-orang pergerakan. Hal itu menjadi pembicaraan dan perhatian yang luas akibat banyaknya surat-surat para digoelis dan juga tulisan-tulisan yang menceritakan kondisi kehidupan di Boven Digoel yang berhasil diselundupkan ke Jawa. Selain itu, kunjungan para wartawan dan swasta asing atau orang Belanda sendiri, juga melahirkan banyak cerita menakutkan mengenai koloni isolasi Digoel.

Cerita-cerita seputar kekejaman yang dialami para digoelis tersebut mendatangkan ketakutan bagi sementara tokoh pergerakan. Dalam kaitan itu timbul istilah ancaman *didigoelkan* dalam wacana politik dan perjuangan di Hindia Belanda.

Pada tahun 1933 Soekarno ditengarai beberapa pihak juga merasa khawatir dirinya akan didigoelkan sehubungan aktivitas politik yang dilakukannya [53]. Dalam kaitan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tercatat menerima empat pucuk surat bertanggal 30 Agustus, 7, 21, dan 28 September, dari Soekarno yang berisikan antara lain permohonan agar dirinya dilepaskan dari penjara dan sebagai imbalannya Soekarno berjanji akan menghentikan semua kegiatan politiknya.

Sejauh ini banyak pihak meragukan keabsahan surat-surat yang ditulis oleh Soekarno itu. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa pada akhirnya Dewan Hindia Belanda menyetujui agar Soekarno dijatuhi hukuman tahanan pada suatu tempat di luar Boven Digoel. Jika Soekarno diasingkan di Digoel, Dewan Hindia Belanda merasa khawatir Soekarno akan mengorganisasikan perlawanan para interniran di Boven Digoel. Mengenai penahanan Ir. Soekarno di penjara Sukamiskin Bandung, pada tanggal 4 Desember 1931, digoelis Marco Kartodikromo, menulis[54]:

---

[53] Ingleson, John, *Jalan ke Pengasingan-Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta LP3ES, 1988) hal 241.

[54] Kartodikromo, Mas Marco, Pergaulan Orang Buangan di Boven Digul,

"Kami dengar di Digoel bahwa telah ada seorang pemimpin intellectnyang mengorbankan dirinya, sampai dihukum 4 tahun lamanya. Kalau tidak salah (sebab penulis sendiri masih belum mengetahui, hanya membaca keterangan dalam surat) orang intellect yang dihukum tadi buinya di Sukamiskin Bandung, yaitu buinya hukuman kulit putih. Tidur setidaknya masih memakai kasur, sekalipun isi kasur itu jerami. Makannya saban hari masih nasi putih dengan ikan. Makan pagi masih dapat roti dengan mentega. Kerja setidak-tidaknya masih duduk di kursi menghadap meja tulis (Pembaca jangan salah faham, bukannya disini penulis membentangkan perkara makanan, tetapi soal sengsara dibui). Rasa-rasanya, kalau kami yang dihukum seperti Ir. Soekarno, barang kiranya tujuh atau 8 tahun rasanya tahan juga. Hanya kerugianlah yang ada pada kita, yaitu tidak dapat meneruskan cita-cita. Hukuman Ir. Soekarno bilamana dibandingkan dengan hukuman orang politiek atau pemimpin 'buruh' jauh benar bedanya"

PROTES KAUM LIBERAL

Keras dan memprihatinkannya kondisi hidup di koloni pengucilan Digoel mengundang perhatian banyak pihak, terutama dari kaum liberal Belanda. Salah satu perhatian besar diberikan oleh anggota Dewan Hindia Belanda, W. P. Hillen, yang mengunjungi Tanahmerah pada tahun 1930. Didasarkan pada pengamatan langsung dan serangkaian wawancara yang dilakukannya terhadap para digoelis, Hillen menyimpulkan bahwa perlakukan dan pelayanan bagi para tawanan di Boven Digoel sangat tidak manusiawi dan tidak bertanggung jawab.

Ia mendesak agar para tawanan segera dipulangkan ke ke daerah asal masing-masing. Setidaknya ia berkesimpulan bahwa 412 dari 610 interniran yang diwawancarainya harus dibebaskan sebab mereka ternyata tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI atau Sarekat Rakyat [55]. Kebanyakan dari mereka hanyalah petani dan pedagang yang termakan provokasi PKI/Sarekat Rakyat agar melakukan konfrontasi tajam melawan pemerintah Hindia Belanda.

(Jakarta, KPG, 2002), hal 167.

[55] Shiraishi, Takashi, *Hantu Digoel-Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta, LKIS, 2001), hal 38-42.

Penulis dengan latarbelakang Penjara Tanah Merah
Boven Digoel, Desember 1991

Berkaitan dengan laporan anggota Dewan Hindia Belanda itu, Gubernur Jenderal de Graeff pada akhirnya memang mengakui bahwa kebijaksanaan *pendigulan* tokoh-tokoh gerakan nasional yang dilakukannya memang mengalami kegagalan total. Apalagi kemudian hari banyak di antara digoelis tampil dalam kancah perjuangan menuju Indonesia merdeka secara lebih berani dan terorganisasi. Digoel bagi mereka ternyata bukan sekedar koloni pengucilan belaka, melainkan merupakan *centre of excellence* yang mematangkan tekad untuk melawan kolonialisme dan kesewenang-wenangan.

Protes keras W. P. Hillen kemudian dijawab dengan pemulangan secara bertahap para digoelis ke daerah asal masing-masing. Sejak itu jumlah penghuni kamp isolasi Digoel memang terus menyusut. Penyusutan jumlah orang buangan juga terkait erat dengan kondisi keuangan pemerintah kolonial akibat *malaise* (resesi) 1930-an. Dari tahun 1929 hingga tahun 1933 keuangan pemerintah Hindia Belanda menurun tajam dari 523,4 juta gulden menjadi 256,7 juta

gulden sehingga dipandang perlu melakukan penghematan di segala bidang [56].

Pada akhir tahun 1936, masih terdapat 697 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak di tempat-tempat pengucilan pada berbagai daerah di Irian, 419 di antaranya berada di koloni Digoel.

Walaupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda akhirnya berkeinginan menutup Tanahmerah dan Tanahtinggi yang dinilainya memalukan dan merendahkan martabat kekuasaan Belanda, ternyata para gubernur dan residen dari daerah-daerah tertentu menentang keras keinginan tersebut dengan alasan: jika orang-orang buangan sampai dikembalikan ke daerah masing-masing, mereka dikhawatirkan akan kembali mengorganisasikan perlawanan terhadap pemerintah.

Berbeda dengan pandangan W. P. Hillen atas kondisi koloni Digoel, mantan dokter yang pernah bertugas di Digoel, L. A Schoonheyt justru berpendapat keadaan orang-orang buangan *sangat baik.* Pendapat yang ditulis Schoonheyt dalam buku karangannya tentang Digoel itu dicemooh keras oleh Soetan Sjahrir.

Menurut Soetan Sjahrir satu-satunya alasan untuk memaafkan segala omong kosong yang ditulis oleh tuan dokter itu ialah bahwa ia sendiri seorang eksdigoelis, artinya pernah tinggal di Digoel dan oleh sebab itu menjadi lemah syarafnya, kalau bukan sakit jiwa. Sjahrir menambahkan, kadang-kadang Schoonheyt seperti mengawur dalam tulisannya yang penuh hal-hal yang bertentangan. Lagi pula nadanya kadang-kadang sadistis [57].

Boleh jadi akibat didukung oleh pendapat-pendapat seperti itu dan didasarkan atas kepentingan politiknya, Gubernur Jenderal De Jonge dan para penggantinya tetap mempertahankan keberadaan koloni isolasi Digoel sampai berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia.

[56] Bijkerk, J.C., *Ibidem*, hal 48.

[57] Sjahrir, Soetan, *Renungan dan Perjuangan* (kumpulan surat terjemahan H.B. Jassin, Jakarta, Penerbit Djambatan dan Dian Pustaka, 1990).
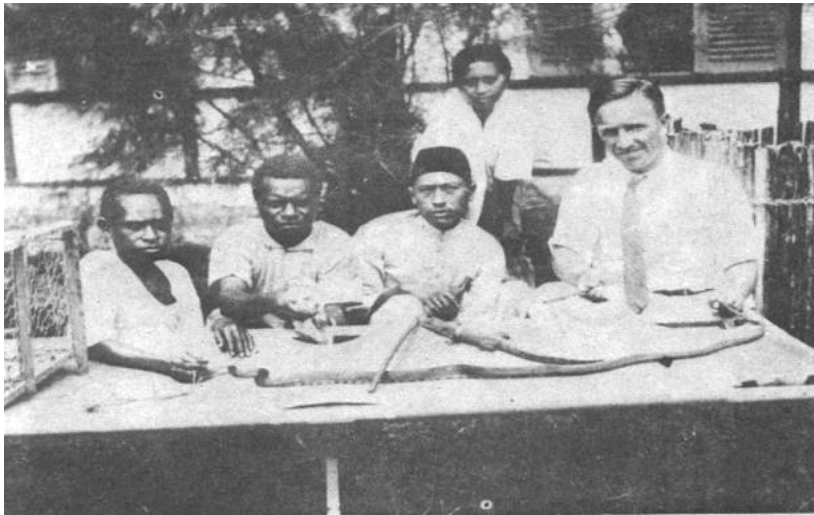
Dr. L.J.A. Schoonheyt, di rumahnya memelihara berbagai binatang buas seperti ular python dan buaya.

Kembali kepersoalan derita hidup para digoelis. Salah seorang digoelis yang dipulangkan pada tahun 1936, Mohammad Sa'ad Datuk Rajo Timbua, mengatakan bahwa tekanan terberat selama diinternir di Digoel adalah perasaan sepi dan terasing. Digoelis asal Selayo, Solok, yang terlibat dalam pemberontakan Silungkang tahun 1927 itu, kepada anak-cucunya bercerita bahwa kesedihan terdalam yang dirasakan selama menghuni koloni pengasingan Digoel adalah menyaksikan meninggalnya kawan-kawan seperasaian akibat dikayau suku Kaya-Kaya, penyakit malaria, tuberkulosa dan demam hitam, serta hilangnya ingatan beberapa digoelis akibat kesepian yang mereka rasakan. Ia sendiri berhasil bertahan karena rajin berlatih silat dan tafakur kepada Tuhan, memohon perlindungan. Mohammad Sa'ad Datuk Rajo Timbua yang taat menjalankan ajaran agama dipulangkan ke kampung halamannya Selayo, Solok, tahun 1936. Dia sempat menyaksikan Indonesia merdeka, bahkan ikut berjuang selama Perang Kemerdekaan I dan II. Datuk Rajo Timbua meninggal dunia di kampung halamannya sebagai Perintis Kemerdekaan pada tahun 1968.

Populasi Interniran di Digoel

No.	Catatan Bulan	Total	Tanah Tinggi
1.	Mei 1930	1.308 Orang	70 Orang
2.	Januari 1931	1.178 Orang	82 Orang
3	Januari 1932	793 Orang	69 Orang
4.	Januari 1933	553 Orang	66 Orang
5.	Januari 1934	440 Orang	60 Orang
6.	Januari 1935	416 Orang	60 Orang
7.	Januari 1936	419 Orang	71 Orang
8.	Januari 1937	446 Orang	62 Orang

Sumber: Takashi Shiraishi, Hantu Digoel*, 2001.*

KOLONI DIGOEL SEHARI-HARI

Ada tradisi menarik di Digoel, yakni tradisi menyambut kedatangan para interniran oleh panitia yang dibentuk sesama digoelis. Penyambutan biasanya diiringi dengan mengumandangkan lagu-lagu yang populer waktu itu. Selesai penyambutan, para tawanan yang baru tiba dibawa ke tempat yang diperuntukkan bagi mereka. Barang bawaan mereka biasanya diangkut oleh orang Kaya-Kaya dengan upah satu kelip (lima sen) untuk tiap koper atau peti. Beberapa penduduk asli dari suku Kaya-Kaya dan suku Muyu juga ada yang bekerja untuk para digoelis. Perjanjian kerja dengan mereka biasanya mencakup waktu dua bulan saja.

Kampung atau pos Tanahmerah yang dibagi dalam tiga bagian, terbagi pula dalam dua bagian besar yang dipisahkan oleh jalan selebar kira-kira dua meter. Pada sebelah kanan jalan terdapat Kampung B dan pada sebelah kirinya adalah Kampung A. Rumah-rumah pada kedua kampung yang di huni para interniran umumnya beratap seng, sehingga pada siang hari udara di dalam rumah luar biasa panasnya. Adapun dinding rumah terbuat dari kulit kayu, dan lantainya dari tanah liat. Para pendatang baru yang belum memiliki rumah, biasanya di tampung di rumah kawan senasib-seperasaian sampai mereka dapat membangun rumah sendiri secara bergotong-royong dengan memanfaatkan kayu hutan.

Sesampai di Boven Digoel, orang-orang buangan biasanya akan diperiksa kembali oleh petugas militer setempat. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengklasifikasikan tingkat hukuman yang diterima sesuai dengan kadar “kejahatan” masing-masing. Mereka yang dinilai berbahaya biasanya dinetralkan dahulu di penjara Digoel, sedangkan

mereka yang dinilai sulit untuk diperbaiki, langsung dikirim ke Tanahtinggi.

Penjara Digoel pada waktu itu relatif tidak memenuhi syarat sebagai tempat penyekapan. Sel-sel penjara Digoel sangat kecil dan terbatas jumlahnya. Sel tersebut berukuran 2 m X 3 m saja, sehingga hanya cukup untuk sekedar bergerak satu arah. Tempat tidur dalam sel penjara Digoel terbuat dari kayu dan dianyam dengan rotan yang di atasnya dialas dengan sehelai tikar bekas. Bagi para tahanan, bantal merupakan kemewahan yang sulit diperoleh di penjara Digoel.

Di tengah-tengah kawasan penjara terdapat rumah penjara dengan ruang utama berukuran 5 m X 8 m, tinggi enam meter. Selain itu kompleks penjara Digoel juga dilengkapi sel bawah tanah berukuran 2 m X 3 m untuk menyekap tawanan yang melakukan pelanggaran.

Setelah ditempatkan di penjara Digoel dan melewati pemeriksaan yang ketat, para tawanan akan di bagi-bagi penempatannya. Ada di antaranya yang ditempatkan di Gudangarang, ada yang tetap di dalam penjara, ada yang di tempatkan di sebelah penjara di seberang cabang Sungai Digoel yang lebih dikenal dengan nama Sungai Wet, dan ada pula yang dikirim ke Tanahtinggi.

Sejak koloni Digoel dibuka, terutama pada masa awal pembangunannya, Administratur Digoel yang pertama, Kapten L. Th. Becking, mewajibkan setiap orang buangan berkerja di bawah pengawasan pemerintah dengan gaji 31.50 gulden tiap bulannya. Tetapi tidak lama kemudian aturan penggajian tersebut diubah atas perintah Gubernur Jenderal yang menyebutkan bahwa setiap orang buangan diperbolehkan memilih bekerja untuk pemerintah atau tidak.

Setiap orang buangan mendapat tunjangan f 0.72 (tujuh puluh dua sen) setiap hari dalam bentuk bahan pangan. Dan bagi para tahanan yang bersedia bekerja untuk pemerintah diberi upah f 0.30 (tiga puluh sen) per hari dalam bentuk uang tunai.

Pembangunan dan pengembangan koloni pengucilan Boven Digoel sebagai kawasan penjara baru dilakukan secara serius oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1933 sampai tahun 1935. Kawasan Penjara yang dibangun tersebut mencakup areal seluas hamper 7.400 meter persegi dan dilengkapi dengan empat pos penjagaan berbentuk menara dengan tinggi masing-masing delapan meter. Selain itu juga dibangun beberapa rumah untuk tempat tinggal pejabat Belanda dan interniran yang tergolong berpengaruh dan disegani.

Seperti telah diuraikan, berkaitan dengan *malaise*, besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk mempertahankan kelangsungan koloni isolasi Digoel akhirnya menjadi pembicaraan serius di *Volksraad*. Atas desakan *Volksraad* itulah kemudian W. P. Hillen dikirim ke Digoel untuk melihat langsung kondisi Digoel dan melaporkan secara rinci mengenai perlu tidaknya koloni Digoel dipertahankan.

Laporan Hillen menyebutkan bahwa dari segi pertanian koloni Digoel bukanlah tempat yang tepat untuk bercocok tanam. Di bidang sosio-ekonomi upah yang diberikan kepada para pekerja terlalu tinggi dibandingkan upah untuk pekerjaan yang sama di Jawa. Dan di atas semuanya itu, ternyata orang-orang yang dibuang ke Digoel majoritas bukanlah orang-orang yang berbahaya. Mereka dianjurkan agar segera dipulangkan ke daerah masing-masing, sehingga pengeluaran pemerintah dapat ditekan. Laporan Hillen kepada *Volksraad* tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberhentian Kapten Infantri L. Th. Becking dan administrasi Militer di Digoel selanjutnya digantikan oleh sipil.

Meskipun koloni pengucilan Boven Digoel tidak dapat dikatakan sebagai kamp konsentrasi untuk membunuh orang seperti yang dibuat Jerman semasa Perang Dunia II, fakta menunjukkan di Digoel secara kejiwaan beberapa orang memang terlumpuhkan. Sedikitnya ada 30 kasus kejiwaan akibat runtuhnya moral orang yang dialami oleh orang buangan Digoel. Selain itu juga terjadi sejumlah pelarian dari koloni Digoel.

Apabila dicermati, tindakan-tindakan pelarian yang dilakukan sejumlah digoelis, maka tampak betul kehendak untuk bebas merdeka sangat besar. Sejumlah pelarian yang dilakukan, menunjukkan betapa tinggi intensitas manusia dalam melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan pihak kolonial lewat pendigoelan orang-orang yang belum tentu sepenuhnya bersalah. Setidaknya kenyataan itu dapat dikonfrontasikan dengan laporan Hillen yang menyebutkan ratusan di antara digoelis tidak tahu-menahu soal komunisme, apalagi politik. Kebanyakan mereka adalah petani dan pedagang yang terseret kedalam *elan vital* pergerakan akibat terprovokasi oleh PKI.

Pada sisi lain, bagi tokoh-tokoh politik yang diasingkan di Digoel, masa pembuangan yang dijalani dapat dikatakan merupakan masa perenungan dan pengapungan dalam kaitan pembelajaran dan pencerahan diri ke arah perjuangan yang lebih tajam dan berani, kemudian hari. Banyak di antara mereka justru bertambah cerdas dan

tercerahkan melalui pembelajaran antarsesama di Boven Digoel. Kursus-kursus politik dan bahasa yang mereka laksanakan semakin membekali mereka dengan pengetahuan tentang arti penting kemerdekaan.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, para digoelis diungsikan ke Australia. Mereka ditahan dalam perkampungan penjara yang disediakan di Liverpool dan Cowra, New South Welsh, Australia. Akan tetapi, kemudian atas desakan Partai Buruh dan unsur-unsur kiri di Australia, ruang lingkup mereka diperluas walaupun bukan berupa pembebasan penuh. Di Australia para digoelis itu, dengan bantuan banyak simpatisan dari Partai Buruh Australia, mendirikan organisasi perjuangan seperti *Partai Kebangsaan Indonesia* dan *Central Komite Indonesia Merdeka* (*Cenkim*) pada hari Jum'at tanggal 21 September 1945 yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia [58]. Sejumlah tokoh terkemuka penghuni koloni isolasi Digoel membidani kelahiran organisasi itu, di antaranya adalah Djamaluddin Tamim, Mohammad Bondan, Sardjono, dll.

Dalam pada itu, mantan digoelis lainnya seperti Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir tampil di depan barisan pemimpin nasional setelah Indonesia merdeka. Bersama-sama dengan Ir. Soekarno mereka dikenal sebagai tritunggal (tiga serangkai) yang memimpin Republik Indonesia pada masa –masa awal kemerdekaan.

Digoelis lain seperti Sayuti Melik dan Osa Maliki kemudian aktif dalam dunia politik. Tempat mereka di dalam peta sejarah nasional Indonesia cukup terhormat.

Lalu bagaimanakah nasib ratusan digoelis lainnya yang bahkan namanya saja sudah tidak lagi diingat orang? Bagaimanakah memberi ukuran terhadap perjuangan mereka?

Boleh jadi itulah tugas terbesar sejarah dalam melacak dan menempatkan mereka secara proporsional dalam lembaran sejarah nasional. Setidaknya mereka telah berbuat pada saat orang lain memikirkannya saja belum! Tidaklah menjadi soal sekecil apapun pengorbanan yang telah mereka persembahkan. Digoel telah menyemaikan benih-benih kesadaran hidup merdeka dan bermartabat kepada bangsa ini.

---

[58] Reid, Anthony & O'Hare, Martin, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1995) hal 11-13.

BAB VI

SENARAI RIWAYAT ORANG-ORANG BUANGAN

Senarai kisah sebagian para digoelis yang diturunkan dalam Bab ini selain menunjukkan betapa beragamnya latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik tiap individu, juga menunjukkan intensitas pertumbuhan kesadaran membangsa mereka di atas panggung sejarah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Cap sebagai orang kiri atau komunis yang dilekatkan pada tiap individu oleh pihak kolonial, perlu kembali dikaji kebenarannya sebab kebanyakan digoelis yang dinilai berhaluan kiri, umumnya tiba di koloni Digoel dalam kondisi berkecukupan, sampai-sampai mereka disebut sebagai *communo-capitalist* [59].

Sebutan sebagai digoelis memang sempat merepotkan banyak bekas orang buangan Digoel dalam mengembangkan karier politiknya ke depan sebab apa pun latar belakang politik mereka sebelumnya, keberadaan mereka di Digoel acapkali dinilai sebagai *dibesarkan dalam lingkungan kaum komunis di Digoel.*

Apa yang dialami oleh Ketua Umum DPP PNI, Osa Maliki Wangsadinata, pada pertengahan dekade 60-an merupakan salah satu contoh kasus mengenai kehati-hatian sementara pihak terhadap para mantan digoelis [60].

Dalam suatu dialog dengan Sartono pada hari Rabu tanggal 16 Maret 1966, Osa Maliki diingatkan oleh Sartono untuk tidak sembarangan menuduh lawan politiknya, Surachman, sebagai orang komunis sebab Sartono juga bisa menuduh Osa Maliki sebagai komunis yang pernah dibuang Belanda ke Boven Digoel. Menanggapi komentar tersebut, Osa Maliki menjawab bahwa hal itu berlainan sama sekali. Komunis pada masa kolonial tidak sama dengan komunis sekarang (1965), karena dulu Osa berjuang untuk kemerdekaan.

Diseret oleh perjalanan waktu, pada akhirnya baik mereka yang komunis dan dicap kiri oleh pemerintah kolonial, tampil dalam

---

[59] Bijkerk, J.C., *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat Yang Lebih Baik* (Jakarta, Penerbit Djambatan,1988),hal 45-49.

[60] Widyanto, P, *Osa Maliki dan Tragedi PNI* (Jakarta, Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991), hal 14.

gelanggang politik nasional Indonesia sebagai tokoh-tokoh demokrat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Paham komunisme yang pada awalnya mempengaruhi mereka, akhirnya mereka tinggalkan.

Pilihan untuk keluar dari jerat komunisme tersebut tentunya telah diperhitungkan dengan matang sebab biar bagaimana pun pada masa awal ketertarikan mereka terhadap komunisme, pelajaran dan paham yang didapat hanya sepenggal-sepenggal saja.

Tan Malaka, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, bahkan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir, pada tahun-tahun awal perjuangan, terutama pada masa muda mereka, juga menaruh perhatian besar terhadap paham komunisme dan sosialisme.

Pasang-surut perjuangan kemudian menyadarkan mereka tentang tidak cocoknya komunisme di Indonesia. Tan Malaka dan pengikut-pengikutnya kemudian mendirikan Partai Murba yang lebih mengutamakan nasionalisme.

Mr. Iwa Koesoema Soemantri tampil dalam pentas kepemimpinan nasional sebagai nasionalis dan humanis. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, dan terakhir Rektor Universitas Pajajaran, Bandung.

Soekarno tampil sebagai nasionalis terkemuka, Bung Hatta senantiasa dikenang sebagai demokrat sejati, dan Soetan Sjahrir diingat orang sebagai tokoh sosial demokrat dan humanis.

Banyak argumentasi diberikan para pakar mengenai perubahan ideologi politik tokoh-tokoh pergerakan tersebut, tetapi jika kita berkaca pada kenyataan menyangkut komunisme dan marxisme dewasa ini, terbukti bahwa sebagai ideologi komunisme memang sudah usang, sebagai kekuatan komunisme dapat dikatakan sudah runtuh. Yang tersisa darinya hanyalah komunisme sebagai falsafah. *Communisto-Phobi* harus di atasi dengan pencerdasan dan pencerahan, bukan dengan kekerasan seperti pendigoelan.

Sejarah membuktikan kepada kita, pendigoelan atau apapun istilahnya sangatlah menghina martabat manusia.

Arsip Nasional pernah meminta agar para digoelis yang tersisa menuliskan pengalaman masing-masing selama menjalani pembuangan di Tanahmerah. Berkotak-kotak kisah pengalaman para digoelis tersebut hingga kini masih tersimpan dalam Arsip Nasional dan belum

lagi dibukukan. Penggunaannya baru sebatas untuk kepentingan penelitian dan penulisan sejarah[61] .

Ada beberapa tokoh yang selama menjalani masa pengasingan di Digoel berhasil menuliskan pengalaman getir mereka dan kemudian menerbitkannya. Tulisan-tulisan tersebut antara lain berupa roman, karya filsafat, atau pun kumpulan surat menyurat dari Digoel. Beberapa nama yang patut dikemukakan di sini adalah Abdoel Xarim M.S, seorang tokoh komunis dari Sumatera Timur yang menulis beberapa roman mengenai Digoel. Salah satu tulisannya yang cukup mendapat perhatian berjudul, *Pandoe Anak Boeangan*, kemudian Wiranta yang juga berhaluan kiri dari Bandung, Jawa Barat, menulis roman berjudul, *Boeron dari Digoel.*

Sedangkan Mohammad Hatta, selama periode Digoel yang dijalaninya (1935-1936), menyusun buku filsafat, *Alam Pikiran Yunani* , buku tersebut kemudian menjadi referensi pokok pelajaran filsafat pada berbagai universitas dan sekolah tinggi. Selama pengasingan di Digoel, Hatta, juga aktif menulis artikel untuk berbagai harian di Hindia Belanda.

Salah seorang digoelis lainnya yang kemudian hari menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, Soetan Sjahrir, selama masa pengasingan di Digoel aktif mengirimkan surat-surat yang berisi renungannya yang mendalam mengenai perkembangan politik, sosial, filsafat, dan budaya di Hindia Belanda serta kaitannya dengan perkembangan dunia waktu itu. Kumpulan surat-surat Soetan Sjahrir kepada istri Belandanya itu kemudian dibukukan dengan judul *Indonesische Overpeinzingen* yang kemudian diterjemahkan oleh H.B. Jassin dengan judul *Renungan dan Perjuangan*.

Adik kandung H. Agus Salim, yang didigulkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena kegiatan politiknya, membukukan pengalamannya selama di Digoel. Tulisan I.F.M. Chalid Salim itu berjudul, *Lima Belas Tahun Digul Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea.*

Terlepas dari buku-buku yang ditulis para digoelis serta tulisan menyangkut pengalaman mereka yang dihimpun oleh Arsip Nasional, sesungguhnya tidak banyak kisah tentang para digoelis ditulis orang.

Berikut adalah riwayat singkat orang-orang buangan di Boven Digoel yang disarikan dari berbagai sumber.

---

[61] Toer, Pramoedya Ananta, *Cerita dari Digul* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia,2001).

Abdul Rakhman, digoelis ini merupakan salah seorang yang ditahan pemerintah Hindia Belanda karena keterlibatannya dalam pemogokan dan huru-hara tahun 1926-1927. Setelah sekitar tiga tahun berada di kamp isolasi Digoel, ia dan tiga orang kawannya berhasil melarikan diri dari Sungai Digoel. Dengan susah payah mereka menempuh hutan rimba liar yang tak bersahabat untuk mencari kebebasan. Pada hari pertama pelarian gangguan menyusahkan yang mereka alami datang dari para pengejar Belanda. Berhadapan dengan ganasnya kondisi alam, akhirnya patroli Belanda membiarkan mereka. Dalam pelariannya kemudian, keempat orang itu berjumpa dengan suku Kaya-Kaya yang bersahabat dan mendapat pertolongan dari mereka. Selanjutnya Abdul Rakhman dan ketiga kawannya kembali meneruskan pelarian dengan cara menghindari suku-suku primitif yang mengganggu mereka dengan ancaman senjata. Pada siang hari mereka bersembunyi di hutan. Pada malam hari mereka mencari jalan dengan penuh kesulitan. Dalam pelarian, salah seorang dari rombongan terkena tombak suku primitif. Orang yang terkena tombak itu kemudian meninggal dunia akibat tiadanya pengobatan. Setelah menempuh hutan-belantara, naik turun gunung dengan segala rintangan dan ancaman, Abdul Rakhman dan dua orang kawannya akhirnya sampai di Pantai Selatan New Guinea Belanda dekat Merauke dalam keadaan mengenaskan. Pakaian mereka compang-camping dan tubuh mereka luka-luka akibat semak duri. Mereka ditolong oleh orang-orang Melanesia yang tinggal di kawasan pantai itu. Para nelayan Melanesia kemudian memberikan tumpangan kepada mereka dalam sebuah perahu penangkap ikan menuju Selat Tores dan Pulau Thursday. Di Pulau Thursday, ketiga orang digoelis itu ditolak oleh pemerintah Australia, kendati pun penduduk setempat menyambut ketiganya bagaikan pahlawan karena keberanian menempuh marabahaya untuk mendapatkan kembali kebebasan sebagai manusia. Meskipun banyak pihak di Australia menaruh perhatian dan memberi tekanan kepada pemerintah agar memberikan suaka politik kepada mereka. Pemerintahan Buruh *Scullin* tetap mengembalikan mereka ke kamp konsentrasi Belanda di Digoel. Pada tahun 1943, Abdul Rakhman itu diungsikan kembali ke Australia, di mana ia tidak perlu mencari izin atau suaka [62] .

[62] Lockwood, Rupert, *Armada Hitam* (Jakarta, Gunung Agung,1983).

Addoe'l Xarim M.S, dilahirkan di Idi Rayeuk, Aceh, pada tahun 1901. Semula ia bernama Abdoelkarim bin Moehamad Soetan. Pendidikannya ditempuh sampai sekolah menengah Belanda. Selanjutnya ia bekerja sebagai juru gambar pada Dinas Pekerjaan Umum di Lhokseumawe, dan aktif dalam organisasi Perhimpunan Pegawai Bumiputra Dinas Pekerjaan Umum (*Vereeniging van Indlandsche Personelen bij de Openbare Werken/VIPBOW*) tersebut.
Keterlibatannya dalam dunia politik terjadi menjelang tahun 20-an, pada saat ia menjadi Ketua Cabang *Nationaal Indische Partij* Lhokseumawe. Tahun 1920 ia pindah ke Padang dan selanjutnya aktif dalam dunia kewartawanan. Abdoe'l Xarim M.S adalah pendiri majalah *Penyedar,* sekaligus editor surat kabar *Hindia Sepakat* di Sibolga dan *Oetoesan Ra'yat* di Langsa. Di Kota ini ia bergabung dengan PKI. Akhir tahun 1924 menjadi anggota Badan Pekerja Nasional PKI. Setelah pemberontakan PKI 1927 dipadamkan, Xarim dibuang ke Boven Digoel bulan Mei 1927. Pengasingan di Digoel dijalaninya selama lima tahun. Setahun setelah dibebaskan, ia menerbitkan buku *Pandu Anak Buangan* yang menceritakan dinamisme kehidupan di Digoel. Pada tahun 1934 Abdoel Xarim memproduksi film mengenai Koloni Digoel. Menurut koran Pandji Poestaka tahun 1934 hal 698, film Digoel yang dibuat Abdoel Xarim itu dinilai pihak kolonial sebagian besar tidak dapat dipakai untuk dipertunjukkan dan sebagian lagi juga tidak dapat diputar dengan proyektor. Oleh karenanya film tersebut telah dikembalikan kepada yang berhak. Berkaitan dengan itu, permintaan ganti rugi sebesar f 1600 yang diajukan Xarim karena filmnya tidak boleh dipertunjukkan, juga ditolak pihak kolonial. Menjelang pendudukan Jepang Xarim kembali ditangkap Belanda karena dinilai bersimpati pada Jepang. Ia dan beberapa tokoh lainnya dibuang ke Jawa, dan baru bebas setelah Jepang menduduki Hindia Belanda. Selanjutnya dia berkolaborasi dengan Jepang sebagai Pemimpin Dinas Propaganda dan memimpin perekrutan Heiho di Medan. Ia juga aktif dalam Peta (Pembela Tanah Air). Pada awal revolusi, Xarim menjadi penghubung antara para pemuda dengan pemimpin-pemimpin republik di Jawa. Pada tanggal 18 November 1945, ia diangkat menjadi Ketua PKI Sumatera Timur. Xarim juga terlibat dalam Revolusi Sosial di Daerah ini. Dalam hal ini ia dinilai gagal menerapkan strategi dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur pada tahun 1946. Tahun 1952, Abdoe'l Xarim M.S keluar dari PKI, dan meninggal dunia di Medan tahun 1960.

Achmad Djunaedi, H, lahir pada tanggal 8 Maret 1896, di Bojong, dekat Ciamis, Jawa Barat. Ia bergabung dengan Sarekat Islam pada tahun 1914 dan selanjutnya memimpin SI Cabang Keresidenan Ciamis. Achmad Djunaedi ditahan pemerintah kolonial pada awal tahun 1918 sehubungan dengan Peristiwa *Afdeling B* di Garut, kemudian dibuang ke Sumatera Barat. Tahun 1922 Achmad Djunaedi dibebaskan untuk kemudian kembali aktif di kancah politik sampai menjadi Ketua PKI Priangan Timur. Kiprahnya dalam lingkungan PKI menyeretnya terlibat dalam pemberontakan 1926. Pemberontakan tersebut dengan mudah dipatahkan pasukan kolonial, diikuti dengan penangkapan dan pembuangan banyak tokoh PKI ke Boven Digoel. Achmad Djunaedi merupakan salah seorang pemimpin PKI yang dibuang ke Boven Digoel pada tahun 1927. Masa pembuangan dijalaninya selama sebelas tahun. Tahun 1938 ia kembali ke Ciamis dan terlibat dalam kegiatan gerakan bawah tanah. Hal serupa juga dilakukannya selama masa penjajahan Jepang (*Harian Rakyat*, 10 November 1964).

A.J. Patty, seorang Kristen, lahir pada tahun 1894 di Ambon. Ia gagal menyelesaikan pendidikan kedokteran di Stovia dan selanjutnya bekerja sebagai kerani di perusahaan swasta. Di samping bekerja sebagai wartawan pada koran *Insulinde/NIP* pada tahun 1920, A. J. Patty juga tercatat menjadi anggota Insulinde/NIP pada tahun 1920. Antara tahun 1919-1920, ia berkampanye di antara para serdadu Ambon. Pada tahun 1922-1923 mendirikan *Sarekat Ambon* dalam kalangan masyarakat Ambon di Batavia. Pada bulan April 1923 A.J Paty pulang ke Ambon. Akan tetapi, pada bulan Oktober 1924 Paty dibuang dari Ambon sehubungan dengan kegiatan politik yang dilakukannya. Ia kemudian dikirim ke Boven Digoel. Masa pengasingan di Digoel dijalaninya sampai tahun 1942. Selanjutnya ia diungsikan ke Australia bersama lebih kurang 400 digoelis lainnya. Di Australia, A. J. Patty, bersama-sama dengan sekelompok orang bekas buangan Digoel mendirikan *Partai Kebangsaan Indonesia*. Partai Kebangsaan Indonesia itu didirikannya jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Berkaitan dengan kegiatannya itu, Belanda mencoba memulangkan kembali sebagian mereka ke Boven Digoel, tetapi A. J. Patty berhasil melayangkan imbauan kepada *Trades and Labour Council* di Mackay, Australia, agar membantunya mendesak pemerintah Australia mencegah tindakan pemulangan tersebut.

Burhanuddin, lahir di Padang pada 30 April 1909. Pendidikan formal ditempuhnya di Bandung hingga tahun 1923. Pada tahun 1928, ia memasuki Partai Nasional Indonesia. Tahun 1932, Burhanuddin menjadi Pengurus Pimpinan Umum Pendidikan Nasional Indonesia. Setahun kemudian ia menjadi Sekretaris Umum PNI. Dibawa oleh kegiatan politiknya, pada tahun 1935 ia dibuang ke Boven Digoel bersama-sama dengan Bung Hatta, Soetan Sjahrir, Maskoen, dan Moerwoto. Masa pembuangan di Digoel dijalaninya sampai di evakuasi ke Australia pada tahun 1943. Selama di Australia ia aktif dalam organisasi yang didirikan sesama digoelis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, di Australia ini pula Burhanuddin tercatat melakukan kerja sama dengan Vander Plas, di mana ia bertindak sebagai penasihatnya , sekaligus bekerja di Malay Departement. Pada akhir tahun 1945, Burhanuddin kembali ke Indonesia. Ia menjadi Menteri Penerangan Negara Indonesia Timur pada tahun 1948. Sejak itu pamornya di dunia politik terus merosot.

Datuk Batuah, H,dilahirkan di Kotolaweh, Padangpanjang, Sumatera Barat, pada tahun 1895. Setelah menamatkan Sekolah Kelas Dua, ia belajar di Mekah dari tahun 1909 sampai tahun 1915. Setelah itu, Datuk Batuah kembali ke Padangpanjang dan berguru kepada Haji Rasul (Syekh Abdul Karim Amarullah) serta membantu gurunya itu di sekolah Sumatera Thawalib. Pada tahun 1922, dia dipilih menjadi penasihat organisasi pelajar Sumatera Thawalib. Pada tahun 1922, Haji Datuk Batuah berkunjung ke Pulau Jawa seraya menjalin hubungan dengan tokoh Islam yang menjadi agitator dan propagandis komunis, Haji Mohammad Misbach, dan pemimpin ISDV, Semaun. Setahun kemudian, tepatnya pada permulaan tahun 1923, Haji Datuk Batuah pergi ke Sigli, Aceh. Di sana ia berkenalan dengan tokoh berdarah campuran India yang dilahirkan di Sumatera Barat, Natar Zainuddin. Waktu itu Natar Zainiddin yang telah menerima ajaran komunis di Jawa, bekerja sebagai kondektur kereta api di Aceh. Pertemuan itu besar pengaruhnya dalam diri Haji Datuk Batuah sebab perasaan anti-Belanda yang telah lama dipendamnya seakan mendapatkan jalan keluar melalui ajaran komunis yang dipompakan, tidak saja oleh Haji Misbach dan Semaun, tetapi juga oleh Natar Zainuddin. Perkawanan Haji Datuk Batuah dengan Natar Zainuddin semakin kental ketika Natar Zainuddin diusir Belanda dari Aceh sehubungan dengan kegiatan-kegiatan politiknya pada tahun 1923. Natar Zainuddin kemudian bergabung dengan Haji Datuk Batuah di Padangpanjang pada tahun

1923 itu juga. Selanjutnya mereka mendirikan Pusat Komunisme Islam di Padangpanjang. Selain itu, Datuk Batuah juga menerbitkan harian *Pemandangan Islam*, dan Natar Zainuddin menerbitkan harian *Djago-Djago*. Kedua orang itu juga mendirikan *Klub Debat Internasionale* yang banyak diikuti oleh pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatera Thawalib. Kendatipun ditantang keras oleh Haji Rasul, faham komunis yang diajarkan Haji Datuk Batuah kepada murid-muridnya di Sumatera Thawalib memang relatif berhasil, terbukti dengan dilangsungkannya aksi demonstrasi menentang tindakan Abdul Muis yang telah memencilkan kepemimpinan komunis dalam Sarekat Islam. Aksi Datuk Batuah tersebut berlanjut dengan didirikannya sebuah Seksi Komunis di Padangpanjang pada tanggal 4 November 1923, tetapi tujuh hari kemudian Datuk Batuah bersama-sama dengan Natar Zainuddin ditangkap Belanda karena dianggap berbahaya. Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin merupakan tokoh yang untuk pertamakalinya membawa dan menyebarkan ajaran komunis di Sumatera Barat. Kedua tokoh itu kemudian dibuang ke Boven Digoel setelah pemberontakan Silungkang dilumpuhkan.

H.Iljas Jakub, dilahirkan di Asamkumbang, Bayang, Painan, Sumatera Barat pada tahun 1903. Ayahnya adalah seorang pedagang tekstil. Ia menyelesaikan sekolah dasar pada sekolah pemerintah, kemudian bekerja sebagai calon jurutulis di Tambang Batubara Ombilin, Sawahlunto, dari tahun 1917 sampai tahun 1919. Iljas Jakub berhenti bekerja karena tidak senang melihat perlakuan sewenang-wenang orang Belanda yang menjadi atasannya terhadap kuli-kuli Tambang Batubara Ombilin. Selanjutnya Iljas Jakub memperdalam pengetahuan agama Islam. Pada tahun 1921, Iljas Jakub pergi ke Mekah untuk berhaji dan belajar. Pada tahun 1923 beliau berangkat ke Mesir dan mengambil pelajaran sebagai mahasiswa tidak penuh di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Di Mesir, Iljas Jakub belajar ilmu politik yang diselenggarakan *Hizb al Wathan,* sebuah partai politik yang didirikan oleh Mustafa Kamil. Tampaknya persentuhannya dengan *Hizb al Wathan* inilah yang kemudian mempengaruhi garis politik dan perjuangannya. Terlebih lagi ia dan Mukhtar Luthfi yang merupakan kawan akrab acapkali menghadiri rapat-rapat partai dan diskusi-diskusi informal yang dilakukan para pemimpin partai tersebut di Kairo. Di Mesir, Iljas Jakub sangat dihormati dalam liungkungan mahasiswa Indonesia dan Malaya. Dalam kaitan ini, Iljas bahkan diangkat menjadi Wakil Ketua Perkumpulan *Al-Jamiat al Khairiyah*, sebuah organisasi

sosial mahasiswa Indonesia dan Malaya di Mesir. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua *Difa'al Wathan*, sebuah organisasi politik. Di tengah kegiatannya yang beragam di Mesir, dia juga pernah memimpin bulanan mahasiswa *Seruan Azhar* dan sebuah majalah politik untuk konsumsi Indonesia dan Malaya, *PilihanTimur*. Iljas Jakub kembali ke Indonesia pada tahun 1929.

H. Iljas Jacoub (1903-1958)

Masih dalam tahun 1929, ia berkunjung ke Pulau Jawa dan mengadakan hubungan dengan PNI dan tokoh-tokoh Sarekat Islam. Hubungan tersebut mendatangkan pengaruh besar dalam dirinya, khususnya menyangkut pemikiran mengenai partai yang cocok dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Ia berpendapat bahwa partai yang cocok untuk Indonesia adalah partai yang memadukan dasar-dasar Islam dan kebangsaan. Setahun kemudian, Iljas Jakub ikut serta mendirikan

Persatuan Muslimin Indonesia atau *Permi* yang beranggotakan para bekas murid dan guru-guru yang tidak lagi mempunyai hubungan langsung dengan Sumatera Thawalib. Untuk memperluas pengaruh dan jumlah anggotanya, Permi aktif menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi pada waktu itu, termasuk kerja sama dengan para pedagang besar *Pasagadang* di Padang. Sokongan dari para pedagang besar pribumi itu memungkinkan Permi mendirikan *Islamic College* pada tanggal 1 Mei 1931 di Padang. Seiring dengan pertumbuhan Permi, tarik-menarik dua unsur di dalam tubuhnya, yaitu unsur Islam dan unsur kebangsaan meningkat tajam. Keduanya saling berupaya menarik anggota ke dalam kelompok masing-masing. Akan tetapi, melalui Kongres Permi pada tahun 1932, kelompok Iljas Jakub-lah yang menang, sehingga mulai saat itu Iljas Jakub dapat dengan leluasa mengembangkan ide politiknya. Kegiatan berupa kursus-kursus dan diskusi-diskusi politik yang radikal serta kegiatan debat publik yang dilakukan Permi tidak luput dari pantauan polisi rahasia Belanda, PID.

Pada tahun 1933, pemerintah Belanda menggunakan *hak istimewa* untuk membatasi kegiatan Permi. Belanda lalu menangkap sejumlah tokoh Permi seperti Mukhtar Luthfi, Djalaluddin Thaib, dan Iljas Jakub. Setelah ditangkap mereka dibuang ke Boven Digoel. Iljas Jakub menjalani masa pengucilan di Digoel dari tanggal 7 September 1933 sampai dievakuasi ke Australia pada tahun 1942. Pada tahun 1946, beliau kembali ke Sumatera Barat. Pada mulanya Belanda menolak memberinya izin untuk kembali ke Indonesia, tetapi setelah ditandatanganinya *Perjanjian Linggajati* akhirnya Iljas Jakub diizinkan pulang ke Indonesia untuk selanjutnya kembali bergabung dengan pemimpin-pemimpin republik di Minangkabau. Pada tahun 1950, ia menolak dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera Tengah untuk mengganti Gubernur Muhammad Nasrun. Pergantian Gubernur tersebut merupakan konsekunsi dari sengitnya konflik antara DPR Sumatera Tengah dengan pihak eksekutif. Di satu sisi pihak legislatif dalam sidangnya yang diselenggarakan dari tanggal 3 s/d 12 April 1950, menilai eksekutif tidak akan berhasil memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk para pejuang pasca perang. Di lain sisi, pihak eksekutif waktu itu menilai legislatif terlalu mengada-ada dengan tuntutan agar pemerintah daerah memperbaiki kondisi sosio-ekonomi dalam waktu tiga setengah bulan saja.

Berkaitan dengan itu Gubernur Sumatera Tengah, Muh. Nasrun, sempat menentang DPR Sumatera Tengah dengan mengatakan, "DPR

Sumatera Tengah bubar atau saya pergi"[63].

Iljas Jakub pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau, dan Jambi) dari tahun 1948 sampai 1951. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jenazahnya dimakamkan di desa Kapencong, antara kampung kelahirannya Asamkumbang dan kampung isterinya Koto Barapak.

Pada tahun 1999 melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 074/TK/Tahun 1999, tanggal 13 Agustus 1999, H. Iljas Jacoub ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

Mas Marco Kartodikromo, digoelis ini dilahirkan di Cepu, 25 Maret 1890. Hampir sepanjang hidupnya Marco menyuarakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda. Ia bersama-sama Angkatan Muda di Solo menceburkan diri dalam bidang jurnalistik. Majalah yang dipimpinnya, *Doenia Bergerak*, terbit dari tahun 1914 sampai tahun 1915. Sewaktu memimpin Doenia Bergerak, ia terkena persdelict mengenai empat artikel yang ditulis justru oleh empat orang Belanda. Hal itu tidak mematahkan semangatnya. Selanjutnya ia bahkan tampil lebih berani. Dalam Doenia Bergerak No. 45 dengan gamblang dituliskannya pendiriannya mengenai *persdelict* tersebut sebagai berikut:

"Kalau kami ini seorang jang berharta, soedah barang tentu empat orang journalist jang terseboet di atas itoe dadanya kami hiasi bintang emas, boeat tanda tjakap dengan keberaniannja.Tetapi dari sebab kami ini seorang jang miskin, djadi bintang emas itoe hanja kami ganti poedjian dan oetjapan banjak terima kasih".

Banyak tulisan dihasilkan Marco. Pada umumnya tulisan-tulisannya itu tidak terlepas dari praktik politik menentang kolonialisme. Di antara sekian banyak tulisannya, yang terpenting adalah *Babad Tanah Djawa,* suatu tulisan yang dengannya Marco berkeinginan menumbuhkan daya kritis dan konsepsi yang koheren orang-orang Jawa terhadap dunia dan sejarahnya. Tulisan Marco lainnya yang banyak mendapat perhatian adalah *Student Hidjo* dan *Mata Gelap*.

---

[63] Departemen Penerangan, Propinsi Sumatera Tengah (Djakarta, Departemen Penerangan, 1954), hal 300-555.

Pada tahun 1925, tokoh yang kemudian diakui sebagai salah seorang Perintis Pers Nasional itu berujar bahwa bunuh diri adalah kematian yang terhormat bagi pergerakan ketimbang kehabisan anggota-anggotanya secara perlahan-lahan. Pada zamannya, Marco Kartodikromo merupakan salah seorang propagandis utama faham komunis di Hindia Belanda. Pergerakan berhaluan komunis yang dilakoninya mengalami kehancuran dalam pemberontakan PKI di Banten dan Silungkang pada tahun 1926-27. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh pihak kolonial Belanda hanya dalam beberapa minggu saja.

Sesudah karier singkat yang melejitkan namanya sebagai jurnalis radikal berhaluan kiri, Marco ditangkap oleh pihak berwenang kolonilal Belanda. Aktivitas politik dan ketajaman penanya membuat Marco dibuang oleh pemerintah kolonial ke Boven Digoel pada tahun 1927. Mas Marco Kartodikromo tiba di Digoel pada tanggal 21 Juni 1927 bersama dengan 63 orang buangan gelombang pertama.

Di koloni pengucilan Boven Digoel, pemerintah Hindia Belanda memasukkan Mas Marco Kartodikromo ke dalam golongan tahanan keras kepala dan sulit diatur. Penggolongannya ke dalam Kelompok Naturalis berkonsekuensi pada kerasnya perlakuan yang diterima. Kelompok tersebut dinilai berhaluan keras dan menolak kerja sama dengan pemerintah Belanda. Rata-rata mereka adalah pemimpin politik dari berbagai aliran. Pengasingan di Tanahtinggi dimaksudkan untuk memutuskan hubungan mereka dengan pengikut masing-masing. Oleh pemerintah, mereka yang ditawan di kamp Tanahtinggi diberi makan sekedar cukup untuk hidup. Kebutuhan lainnya harus diusahakan sendiri oleh para tawanan. Sebidang tanah sempit disediakan untuk mereka gunakan menanam sayuran. Hasilnya tidak boleh diperdagangkan, apalagi dibawa masuk ke wilayah pemerintah dan wilayah militer. Hal seperti ini tidaklah menggoyahkan sikap politik Marco Kartodikromo.

Di Digoel ia menulis buku mengenai dinamisme hidup para interniran. Buku itu diberinya judul, *"Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel"*.

Pada tahun 1933, Soekarno ditengarai beberapa pihak juga merasa khawatir dirinya akan didigoelkan sehubungan aktivitas politik yang

dilakukannya[64]. Dalam kaitan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tercatat menerima empat pucuk surat bertanggal 30 Agustus, 7, 21, dan 28 September, dari Soekarno yang berisikan antara lain permohonan agar dirinya dilepaskan dari penjara. Sebagai imbalannya Soekarno berjanji akan menghentikan semua kegiatan politiknya.

Sejauh ini banyak pihak meragukan keabsahan surat-surat yang ditulis oleh Soekarno itu. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa pada akhirnya Dewan Hindia Belanda menyetujui agar Soekarno dijatuhi hukuman tahanan pada suatu tempat di luar Boven Digoel. Jika Soekarno diasingkan di Digoel, Dewan Hindia Belanda merasa khawatir Soekarno akan mengorganisasikan perlawanan para interniran di Boven Digoel.

Berkaitan dengan pemenjaraan Soekarno di bui Sukamiskin Bandung, pada tanggal 4 Desember 1931, Mas Marco Kartodikromo menulis[65], *"Kami dengar di Digoel bahwa telah ada seorang pemimpin intellectnyang mengorbankan dirinya, sampai dihukum 4 tahun lamanya. Kalau tidak salah (sebab penulis sendiri masih belum mengetahui, hanya membaca keterangan dalam surat) orang intellect yang dihukum tadi buinya di Sukamiskin Bandung, yaitu buinya hukuman kulit putih. Tidur setidaknya masih memakai kasur, sekalipun isi kasur itu jerami. Makannya saban hari masih nasi putih dengan ikan. Makan pagi masih dapat roti dengan mentega. Kerja setidak-tidaknya masih duduk di kursi menghadap meja tulis (Pembaca jangan salah faham, bukannya disini penulis membentangkan perkara makanan, tetapi soal sengsara dibui). Rasa-rasanya, kalau kami yang dihukum seperti Ir. Soekarno, barang kiranya tujuh atau 8 tahun rasanya tahan juga. Hanya kerugianlah yang ada pada kita, yaitu tidak dapat meneruskan cita-cita. Hukuman Ir. Soekarno bilamana dibandingkan dengan hukuman orang politiek atau pemimpin 'buruh' jauh benar bedanya"*

Wartawan legendaris dari kancah pergerakan nasional Indonesia itu, meninggal dunia sebagai orang buangan pada tahun 1932 di Digoel

---

[64] Ingleson, John, Jalan ke Pengasingan-Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934 (Jakarta LP3ES, 1988) hal 241.

[65] Kartodikromo, Mas Marco, Pergaulan Orang Buangan di Boven Digul, (Jakarta, KPG, 2002), hal 167

akibat penyakit malaria dan paru-paru yang dideritanya. Ia dikebumikan di Digoel bersama pergerakan yang diyakininya. Salah satu pesannya dari Koloni Pengucilan Boven Digoel yang patut direnungkan adalah:

"Wahai kalian, kaum cendekiawan dan kaum nasionalis, kami mohon kalian tidak terlalu keras menilai kami orang buangan, sampah masyarakat kalian, kaum buangan politik di Digoel. Kepada kalian orang Indonesia kami tujukan kata-kata ini. Renungkanlah, untuk apa kami telah berjuang dan menderita. Ingatlah bahwa kami telah berkorban untuk Ibu Indonesia."

Maskoen Soemadiredja. Digulis keturunan *menak* ini lahir di Bandung pada tanggal 25 Mei 1907 dari pasangan Raden Umar Soemadiredja dengan Nyi Raden Umi. Ia mendapat pendidikan yang cukup baik. Maskoen antara lain tercatat pernah menempuh pendidikan di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) selama tujuh tahun, dan setelah itu dia melanjutkan studi ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Pada bulan Oktober 1927, Maskoen Soemadiredja mendaftarkan diri menjadi anggota PNI. Keanggotaan tersebut menyeretnya ikut aktif dalam pendidikan politik yang diselenggarakan PNI. Dalam kurun waktu ini dia bersama-sama pemuda pergerakan lainnya aktif mendengarkan ceramah-ceramah politik dalam forum pendidikan kader yang berlangsung empat kali seminggu di rumah Soekarno di Ciateul. Turut mengajar dalam pendidikan politik PNI ini antara lain Mohamad Hatta dan Ali Sastroamijoyo.

Diseret oleh perjalanan waktu, selanjutnya Maskoen dipercaya menjadi propagandis dan pengurus (sekretaris II) PNI Cabang Bandung. Bersamaan dengan itu, pemikirannya tentang nasionalisme juga semakin menguat. Kemajuan ini bermuara pada kenyataan diterimanya Maskoen menjadi pembimbing dalam kursus politik yang diselenggarakan Klub Debat PNI Cabang Bandung. Sejarawan Nina H. Lubis berpendapat, dalam kurun ini sikap nasionalisme Maskoen sangat jelas, terutama ketika ia mengritik bangsa Indonesia atau bangsa asing yang tidak mau menghormati lagu Indonesia Raya. Maskoen menyebut mereka manusia dengan jiwa kerbau. Kritik ini dilontarkan dalam Rapat Umum PNI Cabang Bandung tanggal 15 September 1929. Kegiatan-kegiatan politik dan kritik-kritik keras Maskoen ini pada gilirannya membuatnya ditangkap oleh Pemerintah Hindia

Belanda bersama-sama dengan Ir. Soekarno dan Gatot Mangkoepradja pada tanggal 29 Desember 1929. Majelis Hakim *Landraad* Bandung menjatuhan vonis 20 bulan penjara kepada Maskoen sebagai pesangon atas berbagai kegiatan politiknya dalam menentang kolonialisme.

Pada tahun 1932, beberapa saat setelah bebas dari penjara Sukamiskin, Bandung, Maskoen bergabung dengan PNI-Baru. Di partai ini Maskoen dipercaya menjadi Bendahara II Pengurus Pusat PNI-Baru. Berkat PNI-Baru Maskoen memperoleh kesadaran baru untuk mengganti strategi pengerahan massa sebagai bentuk agitasi politik terhadap pemerintah kolonial dengan upaya-upaya strategis menanamkan kesadaran berbangsa melalui pendidikan politik. Tentunya kegiatan ini dinilai berbahaya dan merongrong kekuasaan oleh pemerintah kolonial. Alhasil pada tanggal 24 Februari 1934, Maskoen kembali ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda. Beberapa bulan kemudian ia dibuang ke Boven Digul. Tentang penderitaan yang dialami para pejuang kemerdekaan di Boven Digoel, Pak Maskoen –seperti diceritakannya kepada sejarawan Anhar Gonggong- memang menyebutkannya sebagai *penderitaan yang tidak ada samanya.* Diperlukan ketabahan yang sangat handal untuk bertahan menghadapi siksaan di dalam tempat pembuangan kaum pejuang yang membahayakan itu. Pak Maskoen menceritakan bahwa pada suatu ketika ia dan tiga orang kawannya 'diperintahkan' untuk mengambil sesuatu di hutan. Mereka berangkat berempat dengan bekal makanan, yang tentu saja terbatas. Setelah empat hari empat malam berjalan, dan kemudian hendak pulang, tetapi kesasar. Celakanya, persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka berusaha untuk mendapatkan binatang, biasanya biawak yang cukup besar, untuk dimakan bersama. Tetapi seharian mereka tidak memperolehnya.

Di tengah sama-sama kelaparan itu, merekapun berunding. Keputusannya, kalau pada esok hari mereka tidak menemukan binatang untuk dimakan bersama, maka dengan sangat sedih-pedih, mereka bersepakat bahwa salah seorang di antara mereka harus rela menjadi 'korban' yang disantap. Kesepakatan kanibalis itu (akan) dilakukan melalui undian di antara mereka. Semalaman mereka berusaha untuk menggunakan panca indra untuk memantau adanya binatang yang mungkin ditangkap. Tetapi tidak berhasil. Pagi hari menjelang siang hari sebagai batas untuk melakukan perjanjian kanibalis

itu, mereka disertai rasa khawatir dan rasa lapar dan amat capek mencari binatang yang mungkin dimakan. Nah, menjelang siang hari itu, mereka berhasil menemukan seekor biawak yang lumayan besar. Mereka berhasil menangkapnya! Termenung, kemudian… menangis terharu. Dan berangkulan. Dan dengan itu kesepakatan kanibalis itu tidak jadi dilakukan!

Pada saat militer Jepang menguasai Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Maskoen dan kawan-kawan dibawa ke Australia sebagai tawanan Pemerintah Hindia Belanda. Di Australia, Maskoen berhasil menunjukkan kepada pemerintah Australia bahwa para "*Digulisten*" (tawanan politik yang dibuang ke Boven Digul) bukanlah pendukung fasisme, mereka adalah para pejuang kemerdekaan. Oleh karena itu, Pemerintah Australia meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk segera membebaskan Maskoen dan kawan-kawan. Setelah dibebaskan dari Kamp Tawanan Cowra, Maskoen dipekerjakan di bagian Percetakan dan Unit Film *Netherlands Indies Government Information Service* (NIGIS). Di unit film ini Maskoen memberikan komentar dalam film dokumenter "*Indonesia Calling*" yang mendokumentasikan pemogokan buruh menentang Belanda.

Selain itu ia juga mendirikan majalah *Penyuluh* sebagai media perjuangannya untuk menuntut Indonesia berparlemen. Di negara kanguru ini Maskoen dan kawan-kawan mendirikan Sibar (Sarikat Indonesia Baru) pada tahun 1943. Dalam kurun itu organisasi tersebut akrtif menyebarluaskan faham kebangsaan kepada orang-orang Indonesia di Australia. Mereka antara lain juga tercatat berjaya mengorganisasikan sekaligus menggerakkan pemogokan kaum buruh yang bekerja di kamp-kamp tawanan dan pelabuhan untuk menghambat kepentingan Belanda atas Indonesia. Ia juga pernah menyelenggarakan rapat umum di Melbourne sebagai reaksi atas pidato Van Mook yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pada bulan Februari 1946, Maskoen dan kawan-kawan menolak dipulangkan ke tanah air oleh Belanda karena mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka dipulangkan oleh Pemerintah Australia dengan kapal Manoora. Sekembali di tanah air, berbagai jabatan dipegang oleh Maskoen. Di antaranya adalah menjadi Sekretaris Departemen Penerangan untuk menyusun siaran-siaran luar

negeri bersama Mr. Moh. Zein. Pada tahun 1947, Maskoen ditarik ke Departemen Dalam Negeri sebagai Kepala Direktorat Politik. Selepas dari jabatan ini berturut-turut ia memegang jabatan sebagai Kepala Keamanan di Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, Pakem Kejaksaan Agung, Panitia Kotum Haji, Ketua Badan Pembina Pahlawan Pusat di Depsos, dan Anggota Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan.

Setelah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, Maskoen Soemadiredja menjadi Ketua Umum Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Jauh tahun setelah Maskoen Soemadiredja wafat, tepatnya pada tahun 2004, pemerintah menganugerahinya penghargaan tertinggi "pahlawan nasional".

Mohamad Bondan, lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 Januari 1910. Sejak usia 19 tahun ia sudah keluar-masuk penjara sehubungan dengan aktivitas politik menantang kolonial Belanda yang dilakukannya.Mohamad Bondan turut memelopori pendirian PNI Baru. Kegiatannya di PNI Baru dan tulisan-tulisannya pada harian Daulat Rakyat membuatnya kembali ditangkap Belanda, dan selanjutnya bersama-sama dengan Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Maskoen, dan Moerwoto dibuang ke Boven Digoel pada tahun 1934. Masa pengucilan di koloni Digoel dijalaninya hingga ia dievakuasi ke Australia sehubungan terjadinya penaklukan Hindia Belanda oleh Jepang. Di Australia, Mohamad Bondan dan sesama eksdigoelis lainnya membentuk Central Komite Indonesia Merdeka, Cenkim. Dalam organisasi perjuangan itu ia menjabat sebagai Sekretaris. Bondan tetap tinggal di Australia sampai tahun 1947, dan memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan Indonesia di negara itu. Selama di Australia ia juga memperoleh mandat dari Sjahrir untuk mendirikan perusahaan dagang di Sydney, guna membantu Republik dalam hal ekonomi. Dalam menjalankan perusahaan dagang yang bergerak dibidang ekspor-impor itu, Bondan dibantu oleh C.H Campbell seorang pengusaha sekaligus anggota Partai Komunis Australia. Berkaitan dengan itu, pada tahun 1946 Perdana Menteri Sjahrir secara resmi mengangkat Campbell menjadi Kepala Perwakilan Dagang Sementara Republik Indonesia di Australia. Sayangnya ia tidak mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Australia sehubungan dengan jabatannya itu. Setelah pulang ke tanah air, Bondan bekerja di

lingkungan pemerintahan, yakni di Departemen Tenaga Kerja. Setelah pensiun ia bergerak dibidang usaha penerbitan.

Mohammad Hatta, kemudian tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia ini dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menempuh pendidikan di *Europeesche Lagere School* pada tahun 1909. Setelah tamat pada tahun 1916, masuk MULO di Padang. Setelah menamatkan pendidikan di *Prins Hendrik School* pada tahun 1921 di Batavia, Mohammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menimba pengetahuan di *Rotterdamese Handelshogeschool*. Pada tahun itu juga Hatta menjadi anggota *Indische Vereeniging* yang kemudian berubah nama menjadi *Perhimpunan Indonesia*. Aktivitasnya dalam *Perhimpunan Indonesia* mengantarnya ke kursi ketua organisasi itu untuk periode 1926-1930. Dibawa oleh kegiatan-kegiatan Perhimpunan Indonesia, Hatta menghadiri Kongres Anti Kolonial, di Brussel pada tahun 1927. Pada tahun 1928, ia diadili di Mahkamah di Den Haag sehubungan dengan kegiatannya dalam Perhimpunan Indonesia. Dalam sidang pengadilan tersebut kepada hakim, Hatta berkata, *Di dunia ini cuma ada satu negara yang dapat disebut sebagai negaraku. Ia maju dan berkembang karena usaha dan usaha itu adalah usahaku.* Pernyataan tersebut disitirnya dari pendapat *Rene de Clerck* dan dibuktikan pewujudannya oleh Hatta secara bersungguh-sungguh hampir sepanjang hidupnya. Setelah mengikuti persidangan selama dua minggu, Hatta dibebaskan dari segala tuduhan. Pada tahun 1932, tokoh besar ini pulang ke tanah air. Sejak itu aktivitasnya di dunia pergerakan meningkat tajam. Beliau bersama-sama dengan Soetan Sjahrir bahu-membahu menyuarakan arti penting kedaulatan rakyat dan penghargaan atas martabat manusia. Banyak tulisan mereka mengenai hal itu dimuat di harian *Daulat Rakyat* yang mereka dirikan. Tulisan-tulisan tersebut umumnya sarat dengan muatan politik. Sasaran pokoknya adalah pengupayaan Indonesia merdeka. Pada 25 Februari 1934, Hatta ditangkap oleh kolonial Belanda dan di masukkan ke penjara Glodok. Januari 1935, beliau bersama-sama dengan Soetan Sjahrir, Bondan, Maskoen, dan Moerwoto diasingkan ke Boven Digoel. Selama di Digoel, Hatta yang dikenal kaya gagasan dan rajin menulis memberikan pelajaran kepada sesama orang buangan tentang masalah-masalah politik, filsafat dan ekonomi. Selama periode Digoel ia menulis buku, *Alam Pikiran Yunani,* yang hingga hari ini masih merupakan buku referensi penting mata kuliah filsafat. Atas desakan berbagai pihak di Belanda dan Hindia Belanda, pada tahun 1936 Hatta

dan Sjahrir dipindahkan ke Bandaneira. Masa pengasingan di Bandaneira dijalaninya hingga masuknya Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Bung Hatta, Bung Karno, dan dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil Marsekal Terauchi ke Dalat, Saigon, untuk membahas langkah-langkah persiapan kemerdekaan Indonesia. Sehari sebelum proklamasi, Hatta bersama Bung Karno diculik pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok. Tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atas nama seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya Bung Hatta menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1956, atas kemauan sendiri meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI.
Selama sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Indonesia, selain tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Hatta juga beberapa kali menjadi Perdana Menteri RI. Pada 27 Desember 1949, Bung Hatta menerima penyerahan kembali kedaulatan Republik Indonesia dari Ratu Juliana. Tokoh besar yang terkenal karena kejujuran, keberanian, kebesaran jiwa, keteguhan sikap dan keyakinan itu menuangkan pemikiran-pemikirannya ke dalam banyak buku. Setelah tidak lagi berada di orbit pemerintahan, perhatiannya terhadap perkembangan bangsa dan negara tetap besar. Bung Hatta meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980.

Mukhtar Luthfi, merupakan salah seorang tokoh Permi yang paling menonjol dan dikenang. Ia dilahirkan di Balingka, Bukittinggi, pada tahun 1900. Tahun 1908, Muchtar Luthfi masuk sekolah Sambungan (Gauvernement) di Kota Padangpanjang. Setamat sekolah Gauvernement, ia melanjutkan pendidikan agama di Maninjau di bawah asuhan Dr. Haka (Haji Rasul/ayah Buya Hamka). Sejak awal Muchtar Luthfi dikenal cerdas dan keras hati. Itu sebab mengapa banyak guru menyenanginya. Tidak terkecuali H. Rasul yang akrab diimbaunya sebagai Ammi Danau atau paman dari danau. Selama di Maninjau, Muchtar Luthfi secara sembunyi-sembunyi membaca semua buku koleksi Ammi Danau. Selanjutnya, serba bacaan itu mendorong perkembangan rasa keagamaan dan kebangsaannya. Untuk mengembangkan cakrawala berfikirnya, selanjutnya Muchtar Luthfi memperdalam pendidikan keagamaan di Kairo, Mesir.

Selama menimba ilmu di Mesir, ia dan seorang rekannya, Iljas Jacub yang kemudian sama-sama didigoelkan, terpengaruh oleh ide-ide

nasionalis radikal. Selama di Mesir, mereka menerbitkan Surat Kabar *Seruan Azhar* dan *Pilihan Timur* yang menyuarakan ide-ide perjuangan Islam dan Kebangsaan menuju Indonesia Merdeka. Ide-ide tersebut kemudian mereka suarakan melalui Persatuan Muslimin Indonesia, Permi, yang dibentuk oleh keluarga para pelajar sekolah Sumatera Thawalib.

Tokoh yang dijuluki sebagai *"Soekarno dari Sumatera"* lantaran kepiawaiannya berpidato itu, memang berpikiran cerdas dan kata-katanya pun tajam dan bernas. Dalam suatu kesempatan di Bandung pada tahun 1932, ia berujar, *"Biar Minangkabau hancur asal saja Indonesia Merdeka"*. Berkaitan dengan kepiawaian H. Muchtar Luthfi berpidato, Buya Hamka dalam bukunya *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* menyebutkan, *"Di waktu itu pernah dia ke Jawa dan bertemu dengan Bung Karno sebagai pendiri PNI dan pernah diberi orang nama julukan 'Sukarno Sumatera', karena ahlinya berpidato, fasihnya berkata, menurut corak 'Nasional cara Sumatera' yang diberi inti Islam"*.

Di bawah bendera Persatuan Muslimin Indonesia, Permi, Muchtar Luthfi dan kawan-kawan menitikberatkan perjuangan organisasinya kepada perjuangan politik dalam menentang penjajahan. Perjuangan tersebut ditempuh melalui penyelenggaraan kursus-kursus, sekolah-sekolah, dan pidato-pidato di depan umum. Bersama-sama dengan Iljas Jacub, ia memimpin Islamic College di Padang. Tujuan perguruan yang memiliki 13 cabang dengan sejumlah murid yang tersebar di Sumatera Barat itu adalah untuk mendidik kader. Berkaitan dengan kegiatan pendidikan kader tersebut, Muchtar Luthfi mengemukakan, *"Bukan anggota partai saja yang harus diberi pengetahuan politik, tetapi kepada pelajar-pelajar di bawah lingkungan Permi itulah yang harus disuntikkan cara-cara berpolitik"*. Pendidikan diyakininya harus mejadi persemaian ideologi, yang menjadi kader-kader Permi di belakang hari. *"Apabila pelajar-pelajar dan pemuda-pemuda tidak diberi teori politik sejak di bangku sekolah, kelak ia akan tidak begitu mengindahkan soal politik tanah airnya"*. Begitulah pendapat Muchtar Luthfi seperti yang dikutip dari buku Pusaka Indonesia karangan Tamar Jaya[66].

Dalam Kongres Sumatera Thawalib di Bukittinggi, pendapat H.

---

[66] Djaya, Tamar, *Pusaka Indonesia* (Jakarta, Kementerian P.P. dan K, 1951), hal 370.

Muchtar Luthfi mendapat penegasan dengan dibentuknya Dewan Pengajaran dan Pendidikan Permi untuk mengurus dan mengawasi sekolah-sekolah Sumatera Thawalib. Dewan pelajaran dan pendidikan Permi ini mempunyai tugas mengorganisir sekolah-sekolah agama Sumatera Thawalib dan Diniah School di Sumatera.

Pada permulaan dekade 30-an kiprah perjuangan Muchtar Luthfi cukup dikenal luas. Ia hadir dan aktif dalam berbagai pertemuan politik baik di Sumatera maupun di Jawa. Pada tahun 1932, ia aktif berpidato atas nama Permi dalam rapat-rapat Partindo yang dipimpin oleh Bung Karno. Dalam rapat-rapat politik itu, Muchtar luthfi dicatat sejarah aktif menyerukan persandingan antara azas Islam dengan Kebangsaan. Ketajaman pikiran dan pandangan Muchtar Luthfi diakui oleh Bung Karno, setidaknya hal ini dibuktikan melalui surat Bung Karno untuk pengurus Pembela Islam Bandung pada 10 Oktober 1932, yang antara lain menyatakan, *"…kalau saudara-saudara ada pertanyaan ini dan itu tentang soal Islam-Kebangsaan maka saudara H. Muchtar Luthfi dengan segala senang hati bersedia menerima kedatangan di saya punya rumah".*

Pandangan tajam ke depan, dan sikap kritis politik, serta kepiawaian berpidato Muchtar Luthfi kemudian menyeretnya ke pengasingan di belantara Digoel. Ia diasingkan ke Boven Digoel dengan SK. No. 15, tanggal 19 Juli 1934[67]. Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan sedikitnya ada tiga belas alasan penangkapan dan pengucilan Muchtar Luthfi ke Boven Digoel. Di antaranya adalah lantaran yang bersangkutan merongrong pemerintah melalui pidato-pidato dan buah penanya yang provokatif. Ia juga dituduh tanpa henti menghasut rakyat agar memberontak melawan pemerintah kolonial. Aksi politik Muchtar Luthfi dan kawan-kawan waktu itu dinilai pemerintah Hindia Belanda mengganggu keamanan umum, dan dapat merubuhkan pemerintah. Memperlengkap alasan penangkapan dan pengucilan singa podium dari Sumatera itu, pemerintah kolonial

---

[67] Berkaitan dengan pengasingan H. Mochtar Luthfi, harian Pandji Poestaka tahun 1934, hal l757 memberitakan: *Pemimpin Permi, toean Mochtar Loetfi. Seperti telah oemoem, toean Mochtar Loetfi tidak lama lagi akan berangkat ke Digoel, tempat mengasingkannja. Moengkin isterinja akan toeroet djoega. Konon kabarnja orang-orang boeangan ditanah merah itoe telah siap mendirikan seboeah roemah ketjil oentoek tempat pemimpin jang ditjintainja itoe.*

Belanda juga memfitnahnya sebagai propagandis PKI dalam pemberontakan 1924. Tentu saja tuduhan itu tidak benar. Sejak awal H. Muchtar Luthfi dikenal sangat anti komunis. Penolakannya atas faham komunis dituangkannya dalam buku berjudul *Al-Himatul Muchtar*. Buku yang berisi penolakan atas komunisme dan mengkritisi kolonisasi Belanda atas Indonesia itu, mendatangkan ketidak senangan pemerintah kolonial. Buku tersebut disita dan penulisnya dicari, tapi H. Muchtar selamat melarikan diri ke Malaya dengan cara menyamar.

Permi yang dipimpinnya dibubarkan pada tahun 1936. Muchtar Luthfi dibebaskan dari koloni isolasi Digoel pada tahun 1942 dan di evakuasi ke Australia. Selama di Australia, ia dan beberapa kawannya aktif di Central Komite Indonesia Merdeka, *Cenkim*[68]. Banyak pejuang dan mantan digoelis di Australia didekati oleh Van der Plas seorang mantan pemegang otorisasi pemerintah kolonial di Makassar sebelum invasi Jepang atas Hindia Belanda. Mereka dibujuk agar mau pulang ke Indonesia dan bekerjasama membantu Belanda. H. Muchtar Luthfi dan beberapa tokoh eksdigoelis menerima tawaran Van der Plas sebagai salah satu strategi untuk melawan kolonial Belanda dari dalam.

Setelah proklamasi kemerdekaan, ia memilih menetap di Makassar. Dia pernah menjadi penasihat residen Makassar untuk urusan Islam. Pada bulan Desember 1946, memenuhi bujukan Van der Plas, H. Muchtar Luthfi ikut serta dalam konferensi pembentukan Negara Indonesia Timur di Denpasar, Bali. Hal itu kemudian menyeretnya menjadi anggota parlemen Negara Indonesia Timur. Kenyataan itu membuat dirinya dituduh mengkhianati bangsa dan negara. Tuduhan itu tentu saja tidak benar, sebab selama menjadi anggota parlemen NIT, H. Muchtar Luthfi, gigih menyerukan tuntutan agar Lagu Indonesia Raya, Bendera Merah Putih, dan Bahasa Indonesia digunakan secara resmi. Tuntutan itu sesungguhnya menunjukkan keberaniannya menafikan keberadaan NIT, sekaligus melecehkan bujuk rayu Van der Plas.

Khusus berkenaan dengan taktik perjuangan berupa penetrasi dari dalam yang dilakukan H. Muchtar Luthfi dan kawan-kawan pada era NIT itu, pakar sejarah Islam dari Suleyman Damirel University, Isparta, Turki, Dr. Goksoy, dalam seminar tahunan AMSS di Herndon,

[68] Reid, Anthony & O'Hare, Martin, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Gramedia,1995), hal 11-13.

Virginia, Amerika Serikat, pada October 1996, mengatakan[69]:

"Furthermore, they proposed the establishment of a Ministry for Religious Affairs in East Indonesia. Van Mook responded that such a ministry would be unacceptable to a modern (secular) state. He recommended to the Muslim delegates the establishment of a Council for Muslim Affairs. Therefore, later in the Provisional Parliament of East Indonesia, these Muslim members pressed strongly for the appointment of a religious leader (Emir-Agama) by the Government and the establishment of a High Council under his chairmanship. During a meeting, on May 6, 1947, H. Muchtar Luthfi put forward a motion for the establishment of a Supreme Council for Religious Affairs (Madjlis Luhur Agama) under the presidency of a State Mufti (Mufti-Negara) who would be Minister of State at the same time. However, the motion was rejected by the Christian, Hindu and some "secular" Muslim members of the Parliament, who opposed to the linking of religious affairs with that of the state."

Tuntutan pembentukan Majlis Luhur Agama dan Mufti Negara itu tentunya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan NIT sebagai negara boneka. Jadi dalam hal ini H. Muchtar Luthfi melakukan perjuangan melalui penetrasi dari dalam organ NIT yangkeberadaannya bertentangan dengan cita-cita NKRI. Tindakan berani Muchtar Luthfi itu memupus dugaan sementara pihak yang menuduh dirinya pengkhianat.

Pasca NIT, H. Muchtar Luthfi aktif mengembangkan syiar Islam di Makassar. Di kota itu ia sempat membangun mesjid Jami Makassar yang pada zamannya pernah dianggap sebagai mesjid terbesar di Indonesia. Selain itu ia juga aktif mengetuai Partai Masyumi Wilayah Sulawesi. Kepemimpinannya di Masyumi membuat dirinya dekat dengan rakyat. Ia tiada henti mengunjungi banyak daerah di Sulawesi untuk menyebarkan dan membangun simpati rakyat terhadap Masyumi.

---

[69] Dr. Göksoy, *The Policy of the Dutch Colonial Government towards Islam in Indonesia* (Herndon Virginia, USA,the annual AMSS conference's paper, Oktober 1996).

Muchtar Luthfi tewas ditembak Belanda di rumahnya di Makassar pada 10 Agustus 1950. Mengenai tewas tertembaknya Haji Muchtar Luthfi, Buya Hamka menulis bahwa setelah Tentara Nasional Indonesia masuk ke Makassar, memberontaklah bekal tentara KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz (1950). H. Muchtar Luthfi yang beberapa hari sebelum huru-hara itu, menyatakan sikap tegas anti KNIL, ketika huru-hara itu mati ditembak Belanda dalam rumahnya. Maka kembalilah cemerlang namanya dalam riwayat perjuangan[70].

Masihkah Haji Muchtar Luthfi cemerlang namanya dalam riwayat perjuangan seperti dikemukakan Buya Hamka?

Pada kenyataannya, dewasa ini sedikit saja orang muda di Sumatera Barat yang mengetahui sepak-terjang perjuangannya, hal serupa juga berlaku pada tingkat nasional. Haji Muchtar Luthfi yang berjuang tanpa pamrih demi tegaknya Islam dan bangsa, nyaris hilang dalam pusaran sejarah. Di Sumatera Barat namanya jarang disebut, apalagi dalam buku-buku pelajaran sejarah. Sepengetahuan penulis, nama Muchtar Luthfi hanya terabadikan sebagai nama jalan di Kota Padangpanjang dan Makassar. Dinamisme hidup dan perjuangannya harus dikenalkan kembali kepada publik melalui kajian-kajian historis dan bahkan bila perlu melalui sinetron. Naif rasanya menjadikan H. Muchtar Luthfi hanya sekedar objek dari sejarah yang tercecer. Padahal, lantaran kegigihan perjuangan dan kepiawaiannya berorasi, dia kemudian menjadi satu-satunya orang yang pernah dijuluki Sukarno van Sumatera.

Thomas Najoan, digoelis asal Manado ini dibuang ke Boven Digoel karena perannya sebagai Ketua Serikat Kereta Api, VSTP (*Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel*), sekaligus salah seorang pemuka PKI dalam pemberontakan 1926. Ia adalah orang yang selalu optimistis dan penuh humor. Najoan alias Liantoe yang oleh kawan-kawan seperasaiannya di Digoel dijuluki *Raja Pelarian*, karena pernah dua kali

---

[70] Hamka, Dr, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (Jakarta, Firma Tekad, 1963), hal 237.

melarikan diri dari Boven Digoel. Pada pelarian pertama, ia bersama tiga orang rekannya pernah sampai di Thursday Island, Australia. Kemudian ditangkap dan diserahkan kembali kepada pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan perjanjian antara pemerintah Belanda dan Australia yang melarang pemberian suaka politik kepada para pelarian komunis. Menurut digoelis Burhanuddin, pada pelarian yang ketiga, Najoan bersama Saleh Rais dan Mustadjab disergap dan dibunuh oleh orang dari suku Kaya-Kaya Mapi, pribumi yang kanibalis di Kawasan Digoel. Pelarian yang berujung maut itu dilakukannya sewaktu Jepang sudah menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942. Sedangkan menurut I.F.M. Chalid Salim, pelarian ketiga itu dilakukan Thomas Najoan seorang diri. Ia diduga hilang dan mati di rimba belantara Irian. Dalam suatu kesempatan, Soetan Sjahrir pernah bertanya kepadanya mengenai tujuannya melarikan diri. Dengan lucu dia menjawab, yang pertama lari untuk mencari Lenin, tetapi yang ketemu Oom Bintang. Yang kedua kali ingin bertemu Stalin, tetapi yang ketemu Oom Bintang juga. Oom Bintang adalah polisi asal Ambon yang bertugas di Tanah Merah.
Anggota Dewan Hindia Belanda, W.P. Hillen, ketika berkunjung ke Digoel pada tahun 1930 pernah mewawancarai Najoan. Menurut Hillen, Najoan memperlihatkan kejiwaan yang abnormal. Boleh jadi hal itu ditimbulkan oleh tekanan perasaan sepi dan terasing yang acapkali dikeluhkan Najoan kepada sesama interniran.

Natar Zainuddin,tokoh berdarah campuran India, dilahirkan di Sumatera Barat, dan pernah bekerja sebagai kondektur kereta api di Aceh. Persentuhannya dengan komunisme diperolehnya di Jawa jauh tahun sebelum 1923. Natar Zainuddin akrab berkawan dengan Haji Datuk Batuah, seorang Guru Sumatera Thawalib yang menerima ajaran komunis dari Haji Misbach dan Semaun, sewaktu yang bersangkutan berkunjung ke Jawa pada tahun 1922. Pada tahun 1923, Natar Zainuddin diusir dari Aceh oleh penguasa Belanda. Dia dipulangkan ke Sumatera Barat dan selanjutnya bergabung dengan Haji Datuk Batuah. Mereka mendirikan *Pusat Komunisme Islam* di Padangpanjang pada tahun 1923. Selain aktif memberikan pelajaran di *Klub Debat Internasionale* yang didirikannya bersama Haji Datuk Batuah, Natar menerbitkan harian *Djago-Djago* sebagai media propagada komunisme, terutama untuk murid-murid dan guru-guru muda *Sumatera Thawalib*. Natar Zainuddin dan Haji Datuk Batuah merupakan tokoh yang pertama kali membawa ajaran komunisme ke Sumatera,

khususnya Sumatera Barat. Pada hari Minggu tanggal 11 November 1923, Natar dan Datuk Batuah ditangkap Belanda sehubungan dengan kegiatan-kegiatan politiknya. Pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 1925, Natar Zainuddin mulai diasingkan ke Timor, dan selanjutnya dipindahkan ke koloni pengucilan Boven Digoel pada tahun 1927.

Osa Maliki Wangsadinata, dilahirkan di Padalarang, Jawa Barat, pada tanggal 30 Desember 1907, ia adalah putra dari seorang pengurus mesjid. Ia mengenyam pendidikan guru dan selanjutnya aktif mengajar di Sekolah Taman Siswa Bandung. Meskipun berprofesi sebagai guru, Osa Maliki tercatat aktif dalam kegiatan politik. Ia menjadi anggota Sarekat Islam Merah sejak usia 17 tahun. Ketika pemberontakan PKI 1926/1927 dipatahkan Belanda, dan PKI, Sarekat Rakyat, serta semua organisasi *onderbouwnya* dilarang, Osa Maliki termasuk di antara ribuan orang yang ditangkap. Ia dipenjarakan selama empat tahun dan dibuang ke Digoel selama delapan tahun. Selepas masa pembuangan di Digoel pada tahun 1939, ia kembali aktif mengajar di Perguruan Taman Siswa ,di Bandung. Selama pendudukan Jepang, ia mengepalai Seksi Propaganda Hokokai Jakarta, tetapi akhirnya dipenjarakan juga oleh Kenpetai selama empat bulan. Sejak tahun 1946 Osa Maliki aktif di PNI. Tahun 1956 ia masuk dalam jajaran Dewan Pimpinan Partai. Bersama-sama dengan Hardi SH, Osa Maliki yang akhirnya dikenal sebagai tokoh politik yang religius dan antikomunis, membawa partainya ke dalam barisan Orde Baru setelah melalui perseteruan panjang melawan kelompok Ali-Surachman yang didukung PKI. Namun begitu, pada masa selanjutnya tragedi PNI memang tidak dapat dihindari akibat pemfusian partai dan intervensi kekuasaan Rezim Soeharto. Ketua Umum DPP PNI itu meninggal dunia pada saat format politik Orde Baru sedang disusun dan dikembangkan.

H. Oedin Rahmani, dilahirkan tanggal 5 Januari 1901. Setelah menamatkan pendidikan Sekolah Agama di Maninjau, Sumatera Barat, pada tahun 1916, ia menjadi guru agama di Thawalib, Diniah dan Mubalig Islam. Sebagai seorang guru sekaligus mubalig, Oedin Rahmani memiliki kepekaan yang mendalam terhadap nasib bangsa. Kepekaan ini pula yang menyebabkannya ikut mendirikan *Persatuan Muslim Idonesia*, Permi, di Sumatera Barat pada tahun 1923. Setahun kemudian ia menjadi anggota Sarekat Rakyat. Keanggotaannya dalam Sarekat Rakyat tidak berlangsung lama. Pada tahun 1928, ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII.

H. Oedin Rahmani dengan kawan-kawan seperjuangan di Permi memang menitikberatkan perjuangan politiknya untuk menentang penjajahan. Di bawah bendera Permi ia menyelenggarakan kursus-kursus atau sekolah-sekolah, pidato-pidato di depan umum, dan perdebatan politik. Hal tersebut tentunya mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda, sehingga dikirimlah suatu Komisi Khusus didampingi jaksa agung ke Sumatera Barat, untuk menilai kondisi yang ada. Pemantauan yang dilakukan Komisi Khusus dan Jaksa Agung itu bermuara pada dikeluarkannya Surat Keputusan No. 15 yang dikeluarkan pada hari kamis tanggal 19 Juli 1934, yang berintikan antara lain pembuangan Oedin Rahmani dan Akhmad Khatib Datuk Singo Rajo ke Boven Digoel. H. Oedin Rahmani menjalani masa pembuangan di Boven Digoel hingga masuknya tentara Jepang. Pada tahun 1943, beliau dipindahkan ke Cowra, New South Welsh, dan beberapa tempat di Australia. Pada akhir tahun yang sama, H. Oedin Rahmani, diangkat menjadi anggota tentara Australia yang bergerak di belakang front. Jiwa memberontak H. Oedin Rahmani terhadap kesewenang-wenangan tampaknya memang tidak pernah padam. Pada tahun 1958, ia ikut pula dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).

Sayuti Melik, atau nama lengkapnya Mohammad Ibnu Sayuti dilahirkan di Desa Kadilobo, Rejondani, Sleman, di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, pada tanggal 25 November 1908. Pendidikannya dimulai dari Sekolah *Ongko Loro* (Angka Dua) di Desa Srowolan sampai kelas IV, dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Tahun 1920-1924 dilanjutkan ke Sekolah Guru di Solo. Beberapa bulan sebelum studinya selesai, Sayuti ditangkap intel Belanda, PID, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Waktu ditangkap ia baru berusia 17 tahun. Penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus belajar secara otodidak. Dalam kurun waktu itu Sayuti mulai tertarik pada bidang politik. Pada awalnya ia sangat tertarik mengikuti pelajaran dan ceramah-ceramah tokoh reformis Islam sekaligus pendiri Muhammadiyah, K. H. Ahmad Dahlan, namun kemudian ia ternyata lebih memilih berguru kepada Haji Misbach seorang tokoh Islam yang menjadi propagandis komunis.

Pada tahun 1926 Sayuti Melik kembali ditangkap Belanda dengan tuduhan membantu pemberontakan PKI. Setahun kemudian, ia dibuang ke Boven Digoel dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Sayuti Melik boleh jadi merupakan tokoh pejuang yang paling sering

ditangkap. Tahun 1936 ia ditangkap oleh Inggris dan dipenjarakan di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari Wilayah Inggris itu, ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Batavia untuk disel di Penjara Gang Tengah pada tahun 1937-1938.
Pada masa pendudukan Jepang, Sayuti Melik kembali di penjarakan dengan tuduhan menyebarkan pamflet PKI, dan baru dibebaskan menjelang proklamasi. Pada saat-saat seputar proklamsi, Sayuti Melik dan beberapa tokoh pemuda lainnya memiliki peran penting dalam perumusan naskah proklamasi. Ia dicatat sejarah sebagai pengetik naskah proklamasi. Pada tahun 1946 atas perintah Amir Sjarifuddin, Sayuti Melik ditangkap oleh Pemerintah Republik Indonesia karena dianggap terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, namun demikian setelah diperiksa oleh Mahkamah Tentara, Sayuti dinyatakan tidak bersalah. Sewaktu Belanda melancarkan Agresi Militer II, dia ditangkap lagi oleh Belanda dan di penjarakan di Ambarawa. Pembebasannya dilakukan setelah selesai KMB. Tahun 1950 Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR-GR sebagai Wakil Angkatan 45. Tahun 1965, ia kembali ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena fitnah PKI sehubungan dengan tulisannya berjudul, *Belajar Memahami Soekarnoisme* yang dimuat bersambung setiap hari oleh semua Koran di seluruh Indonesia, kecuali Koran PKI atau pendukung komunisme. Berbagai penghargaan telah diperolehnya sehubungan aktivitas perjuangannya. Ia juga menjadi pinisepuh Golkar, dan Anggota DPR/MPR 1971-1977. Sayuti Melik meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1986.

Sandjojo, digoelis ini berasal dari Solo. Ia merupakan salah seorang anak buah dr. Tjipto Mangoen Koesoemo sejak dibentuknya *National Indische Partij* pada tahun 1919. Selain cukup dekat dengan dr. Tjipto, ia juga relatif akrab dengan tokoh Islam berhaluan komunis di Solo, Haji Misbach. Sebagai digoelis, Sandjojo dapat dikatakan yang paling berhasil melarikan diri dari Boven Digoel. Setelah menempuh hutan rimba dan naik turun gunung, Sandjojo dan kelompoknya berhasil menyeberangi Selat Tores dengan kapal dan mencapai Thursday Island tanpa diketahui oleh polisi Australia. Di Thursday Island, Sandjojo, sempat menetap untuk beberapa lama. Ia dan kawannya bahkan tercatat pernah membuka sebuah rumah potong rambut untuk menyambung hidup. Sayangnya kebebasan yang dirasakan Sardjono di Thursday Island tidaklah berlangsung lama. Suatu hari seorang dari mereka berkirim surat meminta uang kepada keluarganya di Jawa.

Surat tersebut jatuh ketangan penguasa Hindia Belanda, dan sebagai akibatnya bukan uang yang mereka terima melainkan justru seorang agen polisi rahasia Hindia Belanda yang dikirim dari Jawa. Dibantu oleh pihak kepolisian Australia, akhirnya seluruh pelarian rombongan Sardjono ditangkap dan diserahkan kembali kepada polisi Hindia Belanda. Mereka semua kemudian dikembalikan ke Digoel dan ditempatkan di kamp Tanahtinggi agar jera melarikan diri.

Sardjono, Ketua PKI dari tahun 1924-1926. Ia adalah salah seorang pemimpin dalam pemberontakan PKI 1926 dan di digoelkan pada tahun 1927. Beberapa tahun sebelum pemberontakan meletus, Sardjono hanyalah seorang tokoh kecil dan tidak berpengaruh dalam kepengurusan PKI, perannya baru menonjol ketika Semaun dan Darsono dalam Kongres PKI di Semarang, menolak untuk dipilih menjadi pemimpin PKI. Akibat penolakan kedua tokoh itu, maka Sardjono ditampilkan sebagai kuda hitam ke permukaan. Sardjono dinilai sebagai orang yang keras kepala, sehingga ditempatkan di Gudangarang dan kemudian dipindahkan ke kamp Tanahtinggi. Bersama-sama dengan tiga kelompok garis keras lainnya di kamp Tanahtinggi, mereka mendiskusikan masa depan komunisme di Hindia Belanda pada tahun 1935. Diskusi tersebut bermuara pada kesepakatan *Konvensi Anti Pendigoelan*, yang intinya bersepakat untuk tidak menyerah. Namun Sardjono kemudian mengakhiri sikap kerasnya pada tahun 1937, dengan argumentasai *tujuan menghalalkan cara*, sehingga ia dan kelompoknya meminta di pindahkan ke Tanahmerah. Di tengah masa pembuangan, ada berita mengejutkan mengenai Sardjono yang datang dari Nederland, di mana Partai Komunis Nederland memutuskan untuk mencalonkan Sardjono menjadi anggota *Tweede Kamer* dari *Staten Generaal* (Dewan Kerajaan Belanda). Berita yang seakan seperti ledakan bom pada siang bolong itu sempat menjadi wacana sehari-hari orang buangan. Rata-rata mereka menganggap berita tersebut sebagai lelucon belaka. Wedana Tanahtinggi bahkan kemudian menyapa Sardjono dengan panggilan *Tuan Anggota Dewan* sehubungan semakin merebaknya berita pencalonan Sardjono itu. Pengangkatan Sardjono menjadi anggota *Tweede Kamer* pada akhirnya memang tidak terlaksana, sebab Partai Komunis Belanda tidak memiliki cukup anggaran dan uang jaminan untuk memberangkatkan Sardjono ke Belanda. Posisi yang diperuntukan bagi Sardjono di *Tweede Kamer* selanjutnya diisi oleh *Schalker.*

Masa pembuangan Sardjono di Boven Digoel berakhir pada tahun 1943. Ia selanjutnya diungsikan ke Australia. Di negara kanguru itu Sardjono dan kawan-kawan berupaya keras menjalin kerja sama dengan *Partai Buruh Australia* dan tokoh-tokoh komunis Australia. Bersama dengan Djamaluddin Tamim, Bondan, dan sejumlah mantan digoelis lainnya, ia ikut mendirikan organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak Indonesia untuk merdeka. Dalam organisasi bernama *Central Komite Indonesia Merdeka* (Cenkim) yang didirikan pada 21 September 1945 itu Sardjono hanya kebagian peran kecil saja[71].

Soetan Sjahrir, lahir tanggal 5 Maret 1909 di Padangpanjang, Sumatera Barat, putra kedelapan dari Muhammad Rasjad gelar Maharadjo Sutan dari Kotogadang, Bukittinggi, seorang *Hoofddjaksa* (jaksa kepala) dan penasihat Sultan Deli. Sjahrir menempuh pendidikan di ELS dan MULO di Medan dan AMS di Bandung. Pada usia 20 tahun ia melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum di Leiden. Selama masa kuliah di Belanda, beliau terlibat sebentar dengan *Sosialistische Studentenclub* di Amsterdam. Persahabatan yang dijalinnya dengan tokoh-tokoh sosialis di Belanda seperti Syal Tas dan Jef Last, berpotensi mengembangkan minatnya terhadap kebudayaan dan gagasan-gagasan sosialisme. Di Belanda, Sjahrir juga aktif dalam organisasi *Perhimpunan Indonesia,* dan pernah menjadi Sekretarisnya. Kendati kuliahnya belum rampung, pada tahun 1931 atas permintaan Hatta, Sjahrir kembali ke Indonesia dan membantu membidani berdirinya *Pendidikan Nasional Indonesia* (PNI Baru) suatu partai kader yang lebih mengedepankan pencerahan dan pencerdasan kepada anak negeri, ketimbang memperbesar dukungan massa dalam perjuangan. Setahun kemudian, Mohammad Hatta juga kembali dari Belanda dan aktif memimpin PNI Baru. Aktivitas kedua tokoh tersebut dan sejumlah tokoh lainnya seperti, Mohammad Bondan, Maskoen, dan Marwoto, membuat pemerintah kolonial bertindak tegas dengan mendigoelkan mereka. Sjahrir dan Hatta didigoelkan pada November 1934. Selama masa pembuangan di Digoel, Soetan Sjahrir aktif menulis surat berisikan renungan-renungan dan pendapatnya tentang situasi politik Hindia Belanda dan dunia. Perenungannya itu kemudian

---

[71] Reid, Anthony & O'Hare, Martin, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Gramedia,1995), hal 11-13.

dibukukan dengan judul *Renungan dan Perjuangan*. Berikut dikutipkan salah satu suratnya bertanggal 21 Maret 1936 [72]:

***21 Maret 1936** - Dalam tahun-tahun belakangan ini –atau lebih tepat- selama aku tinggal di Tanah Merah, aku telah mengalami suatu perubahan dalam diriku: ada sesuatu yang keras masuk ke dalam kalbuku, yang dulu tidak ada. Telah kualami sendiri di sana, bahwa dengan segala peradaban, kemanusiaan, keagamaan, kesusilaan, yang katanya dipunyai oleh manusia itu, tetap ada inti kebinatangan dalam diri kita, yang membuat segala peradaban, kemanusiaan dan keagamaan itu sesuatu yang ditertawakan. Telah kulihat di sana, bagaimana orang bisa bersikap keras dan kejam secara lihai terhadap orang lain, tanpa disadari sama sekali, betapa kasarnya ia dan tidak berperasaan.*
Dahulu aku sungguh-sungguh ingin menjadi seorang realis, tapi sebenarnya aku seorang idealis; aku memandang dunia dengan kacamata cita-citaku, dengan kacamata optimisme. Dengan sendirinya aku bersikap toleran, pun terhadap lawanku. Sekarang mereka telah membuatku menjadi seorang realis: dalam hal ini Boven Digoel sungguh telah menjadi suatu lembaga pendidikan bagiku…Manusia Tolstoi, bahkan manusianya Gandhi, yang selalu dalam bayanganku, hilang dalam pandanganku. Manusia pada hakekatnya masih begitu bodoh, kurang beradab, kasar dengan sifat-sifat kebinatangan. Dia boleh belajar ilmu dan bersembunyi di belakang kata-kata ilmiah, dia boleh berselubungkan gelar-gelar akademis dan bersembunyi di dalam seluruh bangunan khayal dari peradaban dan kebudayaan…namun unsur kebinatangan yang ada dalam dirinya,…akal budi yang tinggi ternyata tidak otonom menurut pengalaman…

Atas desakan berbagai pihak, pada tahun 1935 Soetan Sjahrir dan Mohammad Hatta di pindahkan ke Bandaneira. Selama di Bandaneira, Sjahrir mengangkat sebagai anak beberapa putra-putri Banda. Anak-anak itu selain mendapat pelajaran darinya dan dari Bung Hatta, juga acapkali dimintanya memutar musik klasik pada gramophone dengan keras. Hal itu tentunya mengganggu Hatta, sehingga suatu kali Hatta menegur anak-anak tersebut dengan mengatakan bahwa *Sjahrir telalu kebarat-baratan*. Teguran Hatta tersebut dibantah Sjahrir. Menurutnya, *bukan dirinya yang kebarat-baratan, tetapi justru Hatta-lah yang kebarat-baratan sebab Hatta mimpi saja dalam bahasa Belanda.* Masa

---

[72] Sjahrir, Soetan, *Renungan dan Perjuangan* (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1990) hal 95-96.

pembuangan di Bandaneira dijalani Sjahrir hingga tahun 1942. Setelah merdeka, Sjahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia. Bukunya yang berjudul, *Perjuangan Kita*, dinilai banyak pihak waktu itu merupakan haluan bagi Indonesia merdeka. Setelah Kabinet Sjahrir III jatuh pada tahun 1948, Sjahrir aktif mengembangkan *Partai Sosialis Indonesia* yang dibentuknya. Meskipun terlempar dari orbit kekuasaan, beliau tetap bersuara kritis terhadap ketidakadilan. Hal itu membuatnya menjadi tawanan politik Soekarno. Tokoh sosialis demokrat dan humanis terkemuka itu meninggal dunia di Swiss pada tahun 1966 dalam status tahanan politik Soekarno. Tidak kurang dari tiga juta orang mengiringi jenazahnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sehari setelah kematiannya pemerintah Soekarno mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional.

Soegoro Atmoprasodjo, lahir tanggal 23 Oktober 1913 di Yogyakarta. Pendidikan formalnya ditempuh di HIS, MULO, dan Taman Guru (Taman Siswa) di Yogyakarta. Mulai tahun 1930, Soegoro mengajar di Sekolah Taman Siswa Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Pada tahun 1932, ia pindah ke Bandung dan mengajar pada Pendidikan Nasional Indonesia
Tjahaya. Setahun kemudian, ia menjadi guru Sekolah Taman Siswa di Sukabumi. Bersamaan dengan itu, perhatiannya terhadap politik dan dunia pergerakan mulai menampakkan bentuk konkret. Sebetulnya sejak tahun 1929 Soegoro telah aktif dalam berbagai organisasi pergerakan seperti *Indonesia Muda* dan *Suluh Pemuda Indonesia* di Yogyakarta. Ia juga pernah menjadi Penulis I *Partai Indonesia* Cabang Situbondo. Pada tahun 1933, Soegoro menjadi Ketua Partai Indonesia (ilegal) sekaligus menjadi Ketua Umum *Konsentrasi Pemuda Radikal Revolusioner Indonesia* (ilegal) di Sukabumi. Kegiatannya pada bidang politik dan organisasi perlawanan tersebut membuatnya senantiasa dimata-matai oleh polisi rahasia Belanda, PID. Pada tahun 1936, Soegoro ditangkap pemerintah kolonial dan dibuang ke Boven Digoel. Masa pembuangan di Digoel dijalaninya sampai masuknya balatentara Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Soegoro Atmoprasodjo termasuk di antara ratusan tahanan Digoel yang diungsikan ke Australia. Di negara kanguru itu ia aktif dalam berbagai kegiatan mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Tulisannya yang berjudul, *Pendidikan dan Pengajaran Sebelum Perang, tak Berguna Selama dan Sesudah Perang,* mendapat perhatian luas, termasuk dari pihak kolonial Belanda. Berkaitan dengan tulisannya itu, pada tahun 1944 anggota

Raad van Indie, Van der Plas sengaja mendatangi Soegoro di Mackay, Australia dan menanyakan apakah karangan Soegoro akan dipraktikkan ? Menjawab pertanyaan tersebut Soegoro berkata, *"Kalau diberi kesempatan dan kekuasaan, mesti saya dapat jalankan"*. Jawaban Soegoro ditanggapi serius oleh Van der Plas dengan mengatakan bahwa pihaknya akan memberi kekuasaan dan kesempatan kepada Soegoro untuk mempraktikkan ide-ide dalam tulisannya itu. Tentunya jawaban Van der Plas tersebut mendatangkan kebingungan dan ketidakpercayaan dalam diri Soegoro. Ia minta waktu seminggu untuk mendiskusikan tawaran tersebut dengan kawan-kawannya di Australia. Setelah melalui diskusi panjang dengan kawan-kawan seperjuangan di Australia, Soegoro menerima tawaran Van der Plas sebagai salah satu strategi untuk melawan kolonial Belanda dari dalam. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Soegoro diberangkatkan dari Brisbane ke Hollandia (sekarang Jayapura). Selanjutnya dia menjadi *Advisieur Directeur Onderwijs en Eredients* sekaligus pimpinan *Sekolah Bestuur* di Kotanica/Kampungharapan. Di sekolah yang dipimpinnya itu, secara diam-diam Soegoro mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kemerdekaan, patriotisme dan kerangka Indonesia merdeka. Pada bulan Desember 1945, setelah Soegoro dan banyak tokoh Papua seperti Frans Kassiepo mengubah nama daerah Papua menjadi Irian, pecah pemberontakan melawan kolonial Belanda. Pemberontakan yang dipimpin Soegoro itu dengan mudah dipadamkan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Soegoro. Pada tahun 1947, Soegoro lari ke Irian Timur untuk selanjutnya menuju Australia, Ceylon, dan India. Ia kemudian menggabungkan diri dengan *Indonesia Office*. Pada tahun 1953, Soegoro pulang ke tanah air dan bekerja pada kementerian luar negeri. Ia pernah menjadi penasihat Menteri Luar Negeri RI ke PBB memperjuangkan pembebasan Irian Barat (1962) dan anggota Penasihat Front Nasional Pusat pada tahun 1963.

Wiranta, lahir di Conggeng, Sumedang, Jawa Barat tahun 1902. Menamatkan pendidikan Sekolah Desa Tiga Tahun pada 1911. Pada 1917 ia menjadi guru, dan setelah lulus diangkat menjadi *Kwekeling* di Sekolah Kelas II Kalapanunggal, Sukabumi. Tahun 1925 Wiranta pindah ke Bandung, dan memimpin mingguan berbahasa Sunda bersama Moh. Sanusi. Sewaktu memimpin mingguan itu, ia terkena *persdelict* sehubungan dengan artikelnya yang berjudul, *Tan Malaka Dibuang*. Tahun 1927-1931, Wiranta dibuang ke Boven Digoel. Selepas masa

pembuangan yang bersangkutan kembali aktif dalam dunia kewartawanan dan tulis-menulis. Salah satu tulisannya mengenai upaya pelarian dari Digoel terbit dengan judul, *Antara Idup dan Mati Atawa Boeron dari Boven Digoel,* pada tahun 1931. Episode cukup menarik dalam karyanya ini adalah perkisahan tentang Digulis Soedjito yang ditinggal lari isterinya ke Semarang. Berkata Roesmini isteri Soedjito melalui surat[73]:

Dinda pulang dari Digul, yang sampai sekarang baru 6 bulan lamanya, bukan kemauan dinda sendiri, tapi memang dengan sepakatnya kita berdua, ialah tertarik dengan anak kita musti bersekolah, dan harus turut bagaimana adanya jaman.

Dinda berpisah dengan kanda, karena suatu paksaan yang mengingat voor de toekomst (pikiran buat di kemudian hari), ialah supaya anak kita bisa dapat pengajaran yang sepatutnya, satu kemauan dari kanda sendiri supaya anak kita jadi seorang intelek.

Kita berpisah karena membela kepada anak kita berdua, dan dinda sekarang jadi babu dari kita punya anak.

Semasa pendudukan Jepang, Wiranta ditangkap dan baru dibebaskan setelah proklamasi. Ia menggabungkan diri dengan pemuda pejuang kemerdekaan di Cianjur. Tahun 1949 kembali menjadi Guru Sekolah Rakyat di Bandung. Selanjutnya Wiranta kembali aktif menulis fiksi, baik berupa cerita pendek maupun roman. Ia meninggal dunia di Bandung tahun 1983.

***

Akhirnya, inilah daftar nama orang-orang yang pernah didigoelkan. Jumlah mereka semuanya diperkirakan mencapai tiga ribuan orang. Melacak nama-nama para penghuni Koloni Pengucilan Boven Digoel saat ini relatif sulit lantaran data mengenai mereka terbatas jumlahnya akibat kurangnya perhatian terhadap peran yang telah mereka berikan bagi bakal bangsa dan negara ini. Nama-nama yang di himpun di sini hanyalah nama-nama yang relatif acapkali dicatat dalam buku-buku sejarah karena ketokohan mereka pada zaman itu.

---

[73] Wiranta, *Boeron Dari Digoel* (Magelang, Tamboer Press, Cetakan Pertama, 2000) hal 19.

DAFTAR NAMA PARA DIGOELIS

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
1	Abdulhamid, Tb, H	Pandeglang	1926	PKI
2	Arifin, Tb, H	Pamarayan	1926	PKI
3	Achmad, H	Serang	1927	Petani
4	Aliasgar, H	Silebu, Ciruas	1927	Petani
5	Ayot Satriawidjaja	Pandeglang	1926	PKI
6	Achmad, KH	Pancur, Serang	1927	Guru Agama
7	Akjar, H	Tejamari, Ciomas	1926	PKI
8	Asgari, H	Ciomas	1926	Guru
9	Ali Jasin	Pabuaran, Serang	1927	PKI
10	Ayib Achmad, H	Lontar, Serang	1926	PKI
11	Agoes Soleiman	Kaujon, Serang	1926	PKI
12	Abdul Malik	Petir, Pamarayan	1926	Sarekat Rakyat
13	Ali	Sangiang, Anyer	1927	PKI
14	Ali Achmad	Labuan, Anyer	1927	PKI
15	Achmad Bassaif	Batavia	1936	PKI
16	Atmodihardjo	Serang	1926	PKI
17	Alirachman	Serang	1926	PKI
18	Arman	Serang	1926	PKI
19	Alikasim	Serang	1926	Petani
20	Asmail	Ciomas	1926	Petani
21	Andung	Ciomas	1926	Petani
22	Aliakbar	Serang	1926	Buruh
23	Abdulkarim	Serang	1926	Petani
24	Amir	Serang	1926	Tukang Cukur
25	Abdullah	Serang	1926	Petani
26	Artadjaja	Ciomas	1926	PKI
27	Abdullah, H	Koranji, Serang	19261	PKI
28	Amin Koesasi	Semarang	927	PKI
29	Alip Mangoen		1927	PKI
30	Abdoelmoetalib		1927	PKI
31	Assari	Sukabumi	1927	PKI
32	Achmad Sjah	Padang	1927	PKI
33	Akif	Banten	1927	PKI
34	Aliarcham	Jawa Tengah	1927	PKI
35	Akhmad Khatib, Kiai	Banten	1927	Sarekat Rakyat
36	Abdulhadi, Kiai	Banten	1927	Sarekat Rakyat
37	Abdul Rakhman	Pontianak	1927	Sarekat Rakyat
38	Abdulsalam	Batavia	1937	PARI
39	Ali Basah Siregar	Batavia	1937	PARI
40	Asnawi, Kiai	Banten	1927	Sarekat Rakyat
41	Agoes Soleman	Banten	1927	Sarekat Rakyat
42	Afif, Haji	Banten	1927	Sarekat Rakyat
43	Akhmad Rifai	Banten	1927	Sarekat Rakyat
44	Abdulhalim, Kiai	Banten	1927	Sarekat Rakyat
45	Abdoel Xarim Ms	Medan	1927	PKI
46	Abdul Jabar	Sianok Bukittinggi	1928	Kuli
47	Abu Samah Sutan Salim	Kotopanjang	1928	Sarekat Rakyat
48	Abdul Gani	Sumatera	1928	Petani

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
49	Ayub Rajo Mudo	Ujuangkarang	1928	Pegawai KA
50	Adelan Pakih Sati	Batipuahbaruah	1929	Sarekat Tani
51	Awiskarni Dt Mangkuto B	Padang Panjang	1929	PKI
52	Atmoredjo	Hutapungkut		Nasionalis
53	Aboe Kasim	Flores	1934	PKI
54	Aboe Zaman		1934	PKI/SR
55	Ahjadiredja			
56	Atmosardjono		1927	PKI
57	Chatib Dt Singo Radjo	Sumatera Barat	1927	PKI
58	Ahmad bin Hoesin	Palembang	1927	PKI
59	Ahmad Dasuki	Solo	1927	PKI
60	Ahmad Soemadi	Jawa		VSTP
61	Ahija Soepardi	Surabaya	1927	PKI
62	Abas	Mandailing	1927	Moe'alimin
63	Atmosoemarto	Surakarta		Nasionalis
64	A.Y. Patty	Maluku/Ambon		PKI/SR
65	Amin,Ny	Banten	1937	Partindo
66	Abdoel Hamid Loebis	Sumatera Utara	1934	PARI
67	Amir Hamzah Siregar	Sumatera Utara	1927	PKI
68	Achmad Djunaedi	Priangan Timur	1937	Buruh
69	Asmin	Surabaya	1927	Sarekat Rakyat
70	Brotosewojo	Silungkang	1927	PKI
71	Boenimin	Solo	1927	PKI
72	Buyung Sutan Sinaro	Semarang	1928	Juru Tulis
73	Bagindo Mukhtar	Pariaman	1928	Petani
74	Bagindo Lian	Pauhkamba	1928	Tukang Cukur
75	Basir	Bukittinggi	1927	PKI
76	Besur, K.H	Banten		Nasionalis
77	Bakri, Ny	Semarang		Sarekat Tani
78	Buyung Khatib Talanai	Padanglaweh	1929	PKI
79	Bagindo Yunus	Pariaman	1929	Sarekat Tani
80	Bagindo Yusuf	Pilubang	1929	Barisan Merah
81	Buyung Idris	Tobohgadang	1929	PKI
82	Bagindo Saleh	Pakandangan	1929	PNI Baru
83	Bondan	Jawa Barat	1935	PNI Baru
84	Burhanuddin	Sulawesi	1935	PNI Baru
85	Bermawi Latif	Sumatera	1935	PKI
86	Boedisoetjitro	Jawa Barat	1927	PKI
87	Boejoeng Siregar	Mandailing	1934	PKI
88	Basaroeddin glr Dja Aman	Sibolga	1927	
89	Olemens Wentoek	Manado	1934	PKI
90	Dwisewojo		1927	PKI
91	Datuk Tan Muhamad	Padangpanjang	1927	PKI
92	Dongsowidirjo	Solo	1927	PKI
93	Djatoeng	Semarang	1927	PKI
94	Djoeardi		1927	PKI
95	Darsono	Betawi	1927	PKI
96	Darodjiman	Rembang	1927	PKI
97	Djamaludin Malin Sutan	Auaparumahan	1927	Sarekat Rakyat
98	Djamaluddin Ibrahim	Batavia	1937	PARI
99	Djamaloedin Tamin	Sumatera	1934	PARI

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
100	Djaka Dt Tan Muhammad	Panyalayan	1929	PKI
101	Daja bin Joesoef	Sumatera	1934	PARI
102	Dul	Batavia	1937	PARI
103	Dahlan	Jawa Barat	1927	PKI
104	Daniel Kamoe	Manado	1934	PKI
105	Darsono	Jawa Tengah	1927	PKI
106	Datuk Gani	Sumatera Utara	1927	PKI
107	Datuk Leman	Sumatera Utara		SarekatRakyat
108	Datuk Batuah, H	Sumatera Barat	1927	Nasionalis
109	Darman	Banyuwangi		Nasionalis
110	Djoyopranoto	Jawa Barat	1927	PKI
111	Djalaloeddin Taib	Sumatera Barat	1934	Permi
112	Datuk Bandar	Sumatera Barat	1934	PSI
113	DatukSingo Radjo	Sumatera Barat	1934	Permi
114	Dawud	Sumatera	1934	PARI
115	Djokosoedjono	Jawa Timur	1937	PKI
116	Dulmuin	Pamarayangan	1927	PKI
117	Daud	Petir,Pamarayan	1926	PKI
118	Dulhamid	Pabuaran,Ciomas	1926	Petani
119	Durachim	Gng Sari, Ciomas	1926	PKI
120	Djakaria	Labuan, Anyer	1927	Petani
121	Djari	Pancur, Serang		Pedagang
122	Dullah	Serang	1926	Tukang Batu
123	Entjang	Caringin	1927	Petani
124	Entol Enoh	Menes	1926	Jawara
125	Emed, H	Caringin	1926	PKI
126	Enggus, H	Warnasari Cilegon	1927	Pedagang
127	Firdaus Haroenrasjid	Solo	1927	PKI
128	Goesti Djohan Idroes	Kalimantan	1927	Nasionalis
129	Goesti Soeloeng	Kalimantan		Nasionalis
130	Goenawan	Bandung		PKI
131	Gombak Dt nan Bareno	Panyalalan	1929	Sarekat Rakyat
132	Gondojoewono, R.M	Betawi	1927	PKI
133	Goenardjo Hardjoseputro	Surabaya		VSTP
134	Gapoer, H	Jawa	1927	Nasionalis
135	Hardjosuprto	Rangkasbitung	1926	Pedagang
136	Hasan, H	Pancur Serang	1927	PKI
137	Hilman, Tb	Kaujon Serang	1926	PKI
138	Haroen	Surabaya	1927	PKI
139	Hartadi	Semarang	1927	PKI
140	Hermawan	Bandung	1927	PKI
141	Heroedjono		1927	PKI
142	Hardjowijono	Madiun		PKI
143	Hartono	Madiun		PKI
144	Hartojo	Solo		PKI
145	Hermawan Said	Jawa	1927	Guru
146	Haroejoewono	Jawa Barat	1927	PKI
147	Hamid St Sinaro Parputih	Bukittinggi	1928	Sarekat Rakyat
148	Haroenrasjid	Surakarta	1927	Medan Moeslimin
149	Hasin Glr Dja Panusunan	Sibolga		
150	Hardjodiwongso	Surakarta	1927	Mawa

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
151	Hardjoprawiro			
152	Hasanuddin	Batavia	1926	PKI
153	Ibing	Murui Menes	1926	PKI
154	Ibrahim	Ciomas	1926	PKI
155	Ibrahim	Padang	1928	Tukang Sepatu
156	Ishak	Serang	1927	PKI
157	Idrus Sutan Indra	Solok	1928	PKI/SR
158	I.F.M Chalid Salim	Sumatera	1927	PKI/SR
159	Iljas Jacub	Asamkumbang Pessel	1934	Permi
160	Isdi	Jawa Timur	1927	PKI/SR
161	J. Soenario	Jawa Timur	1927	Sarekat Rakyat
162	Jahja, H	Pamarayan	1927	Guru Agama
163	Johanes Woworoentoe	Manado	1934	PKI
164	Jahja Nasoetion	Sumatera	1937	PARI
165	Jaro Kamid	Banten	1927	PKI
166	Johannes Rumus	Sawahlunto	1927	Sarekat Rakyat
167	Jalaluddin, H	Silungkang	1934	Sarekat Rakyat
168	Jaafar Sutan Pamenan	Padang	1928	Sarekat Rakyat
169	Jalaluddin Thaib	Bukittinggi	1934	Permi
170	Kartodanoedjo		1927	PKI
171	Kartowidjojo		1927	PKI
172	Kadarisman	Semarang	1927	PKI
173	Koesno Sastrosoewirjo	Semarang	1927	PKI
174	Kariatmadja	Bandung	1927	PKI
175	Kantjoeng		1927	PKI
176	Koesnin	Salatiga	1927	PKI
177	Karopandojo	Semarang	1927	PKI
178	Kamari	Betawi	1927	Sarekat Tani
179	Kaliang Malim Batuah	Padangpanjang	1929	Sarekat Tani
180	Keri Kari Sulaiman	Bungotanjuang	1929	PARI
181	Kandor	Sumatera		Nasionalis
182	Karni	Ponorogo		Nasionalis
183	Kasan, Ny	Semarang		Nasionalis
184	Koesno Goenoko	Bandung	1927	PKI/SR
185	Kamim	Pabuaran Ciomas	1926	Petani
186	Kasiman	Ciomas	1926	Petani
187	Kasan	Anyer	1926	PKI
188	Karis	Serang	1926	Petani
189	Koesen	Jawa	1927	Sarekat Rakyat
190	Mochtar	Bogor	1927	PKI
191	Moestapa	Medan	1927	PKI
192	Madassim	Semarang	1927	PKI
193	Martowirjo		1927	PKI
194	Moh Said		1927	PKI
195	Makmud Amin	Solo	1927	Sarekat Rakyat
196	Martodihardjo	Solo	1927	Sarekat Rakyat
197	Marlan		1927	PKI
198	Moenasijah		1927	PKI
199	Moch Sanoesi	Bandung	1927	PKI
200	M.Saad Dt Rajo Timbua	Selayo/Solok	1927	PKI/SR
201	Koesmen	Pekalongan		Nasionalis

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
202	Marco Kartodikromo	Cepu	1927	PKI
203	Mangoen	Jawa	1930	
204	Mohammad Hanafiah	Sumatera		
205	Matrawie	Jawa		
206	Mohammad Ashari	Jawa	1927	Sarekat Rakyat
207	M.J Barani	Sumatera	1927	PKI
208	Mu'min, H	Banten	1927	PKI/SR
209	Mohammad Ali	Banten	1927	Sarekat Rakyat
210	Mohamad Ali	Semarang	1927	Sarekat Rakyat
211	Mohammad Nur	Banten	1927	PKI
212	Mohammad Tahir, H	Banten	1927	Sarekat Rakyat
213	Muhammad Ihsan	Banten	1927	Sarekat Rakyat
214	Muklis, H	Tegal	1928	SarekatIslam
215	Murad Sari Marajo	Padang	1927	PKI
216	Malik Datuk Saripado	Auaparumahan	1928	Sarekat Rakyat
217	Manan Sunan Marajo	Bukittinggi	1928	Sarekat Rakyat
218	Muin Sutan Maruhum	Panyalaian	1928	Sarekat Rakyat
219	Musim Mangkudum Sati	Padangpanjang	1929	PKI
220	Mohammad Arief Siregar	Sumatera	1929	PARI
221	Moehidin Nasoetion	Sumatera Utara		Partindo
222	Moerad	Makassar	1927	PKI
223	Madjid St Rangkayo B	Panyalaian		PKI
224	Mukhtar Luthfi, H	Bukittinggi	1929	Permi
225	Mardjohan	Semarang	1927	PKI
226	M. Sanoesi	Jawa Barat	1927	PKI
227	Moestakim	Tegal	1927	PKI
228	Mohammad Hatta	Sumatera	1935	PNI Baru
229	Moerwoto	Jawa Tengah	1935	PNI Baru
230	Mohammad Bakri	Ciomas	1926	PNI Baru
231	Mohammad Salim, H	Caringin	1927	Petani
232	Mohammad Saleh	Serang	1926	PKI
233	Mohammad Arif	Serang	1926	Polisi
234	Mohammad Toha	Pandeglang	1926	Petani
235	Mardjoek, H	Kubang Serang	1927	Pedagang
236	Markoem Samirata	Betawi	1927	PKI
237	Mohammad Hasjim, Tb	Rangkasbitung	1926	Petani
238	Muhammad Sis	Pandeglang	1926	PKI
239	Muhmmad Jusuf	Ciomas	1926	PKI
240	Mardjuk, Tb	Pamarayan	1926	Mandor
241	Mad Saleh	Pabuaran Ciomas	1926	PKI
242	Moh. Isa, Tb	Pamarayan	1927	PKI
243	Muhammad Amin	Ciomas	1927	Petani
244	Moeslik	Pabuaran Ciomas	1927	Petani
245	Muhammad Nur Fanani	Serang	1927	PKI
246	Martadjani	Ciomas	1926	Penjaga Ladang
247	M. Rais Sutan Mangkuto	Rao-Rao Tanah Datar	1927	Nasionalis
248	Muhammad Jassin	Labuan, Anyer	1927	PKI
249	Muhammad Arif, H	Dalung, Serang	1926	PKI
250	Mohammad Gozali, KH	Caringin	1926	PKI
251	Maskun	Jawa Timur	1935	PKI
252	Mohammad Isa	Banten	1927	PKI

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
253	Mangoen Djojo	Jawa Tengah	1930	PKI
254	Marjoen	Surabaya		Nasionalis
256	Marsoem	Semarang		Nasionalis
257	Mat Saleh	Banten	1927	PKI
258	Murad, T.A	Makassar	1935	PNI Baru
259	Mohammad Kasan	Jawa		Nasionalis
260	Moestadjab	Tegal		PKI
261	Makki	Makassar		Nasionalis
262	Muljadirna	Jepara		
263	Moefendi alias Boediarjo	Solo	1927	PKI
264	Mangoenatmodjo	Surakarta	1927	PKI
265	Mardjono	Jawa		PARI
266	Mohammad Jasin	Medan	1927	PKI
267	Marsoedi	Yogyakarta		SKBI
268	Maswar Madjid	Sumatera Selatan	1934	PARI
269	Moekandar	Surabaya		PKI
270	Moch. Tojib	Semarang		Nasionalis
271	Ny. Maskun	Jawa Timur	1935	
272	Ny.Moerwoto	Jawa Tengah	1935	
273	Moetakalimoen	Surakarta	1927	RaadvanVakbonden
274	Mangoenatmodjo	Surakarta	1927	Santri/Guru agama
275	Maun	Batavia	1937	PARI
276	Malelo Siregar	Batavia	1937	PARI
277	Ngadiran	Surabaya	1927	PARI
278	Ngadiran	Kediri	1927	PKI
279	Nawawi	Semarang	1927	PKI
280	Naming	Batavia	1937	PKI
281	Nurdin Bagindo Sutan	Padang	1928	Sarekat Rakyat
282	Nait Dt Sisi nan Putih	Silungkang	1929	Sarekat Rakyat
283	Nait St Mangkudum	Padangpanjang	1929	PKI
284	Ngadiman	Jawa Timur	1927	PKI
285	Natar Zainoeddin	Sumatera	1927	PKI
286	Najoan	Manado	1927	PKI
287	Nawi	Sukalaba Ciomas	1926	Petani
288	Nuning	Sumatera Timur	1927	PKI
289	Nani	Banten	1927	PKI
290	Nurut	Banten	1927	PKI
291	Ngadiman	Jawa	1927	PKI
292	Ngadimin	Wonogiri		PARI
293	Niti Soemantri	Jawa	1927	Guru
294	Osa Maliki wangsadinata	Padalarang	1930	PKI
295	Oesman Soetan Keadilan	Sumatera	1927	PKI
296	Oemi	Sumatera Barat	1927	Nasionalis
297	Okarta Jaman	Jawa Barat	1927	PKI
298	Ongko D	Banten	1927	PKI
299	Puradisastra	Serang	1926	PKI
300	Pakih Salih Al Arifi	Rao-Rao Tanah Datar	1927	Nasionalis
301	Paloloi	Makassar		Nasionalis
302	Pontjopangrawit	Solo	1927	Sarekat Rakyat
303	Prawirosardjono	Surabaya	1927	PKI
304	Prawirodihardjo	Kudus	1927	PKI

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
305	Poespowardojo	Solo	1927	PKI
306	Prapto	Madiun	1927	PKI
307	Pamerdi	Wonosari	1937	PARI
308	Prawirodinoto	Jawa Barat	1927	Nasionalis
309	R. Dardiri Soeromidjojo		1927	PKI
310	Rahim Mantiko Malin	Sungaicacang	1927	Sarekat Rakyat
311	Ruskak	Surabaya	1937	PKI
312	R.M Gondojuwono	Jawa Barat	1937	PKI
313	R.M Sukardjo Prawirojudo	Jawa	1927	ABK
314	Raja	Sumatera Barat	1927	Sarekat Rakyat
315	R. Saffioeddin	Banten	1927	PKI
316	Ranoe	Solo	1927	PKI
317	Radimin		1927	PKI
318	Respati	Surakarta	1927	PKI/SR
319	Rujani	Serang	1927	Tukang Jahit
320	Radi, H	Anyer	1926	Petani
321	Raden Moenandar	Jawa Tengah	1927	Sarekat Rakyat
322	Sudarmin	Batavia	1927	PARI
323	Subeno	Batavia	1937	PARI
324	Sabilal Rasjad	Sumatera Barat	1934	Permi
325	Soenarjo	Surabaya	1927	PARI
326	Sarosan	Solo	1927	PARI
327	Soetedjo	Cepu	1927	PARI
328	Sukrawinata	Jakarta	1927	PKI
329	Sinting, H	Banten	1927	PKI
330	Saldi, H	Banten	1927	PKI
331	Samsoedin Katjamata	Solo	1927	PKI
332	Sardjono	Jawa	1927	PKI
334	Soemantri	Semarang	1927	PKI
335	Soehirman	Jawa		PKI
336	Soeprodjo	Bandung	1927	PKI
337	Soeprapto	Tegal	1927	PKI
338	Sandjojo	Jawa	1927	PKI
339	Saleh Mangkuto Sati	Sawahlunto	1927	Sarekat Rakyat
340	Syukur Dt Bandaro K.	Pandaisikek	1929	Sarekat Rakyat
341	Suki Datuk Bongsu	Padangpanjang	1929	Sarekat Hitam
342	Sidi Hamzah	Pariaman	1929	PKI
343	Soendah	Ternate	1927	
344	Sajoeti Melik	Bandung	1930	Nasionalis
345	Sentot	Sudimampir Anyer	1926	PKI
346	Soekrawinata	Jawa Barat	1927	PKI
347	Soetan Perpatih	Sumatera Barat	1927	PKI
348	Saleh, Tb	Pandeglang	1926	Petani
349	Sera	Ciruas	1926	PKI
350	Salihun	Rangkasbitung	1926	PKI
351	Surabaita	Pandeglang	1926	PKI
352	Soerodjojo	Jawa	1927	Sarekat Rakyat
353	Salikin	Pancur Serang	1926	Guru Agama
354	Samedan	Sangiang Anyer	1927	Petani
355	Sawiri	Waringin Anyer	1927	PKI
356	Soleman	Ciomas	1926	PKI

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
357	Soeeb, H	Pamarayan		Petani
358	Santani, H	Kebonsari Cilegon	1927	Penjahit
359	Soetan Zaid Ali	Sumatera Barat	1927	PKI
360	Soetan Sjahrir	Sumatera	1935	PKI
361	S. Hassanoesi	Sumatera	1927	PKI
362	Soewignjo	Jawa Tengah		Nasionalis
363	Sofie	Jawa Barat		
364	Soegijem	Semarang		Nasionalis
365	Soekaesih	Sumatera Barat		Nasionalis
366	Salamah	Jawa Tengah		Nasionalis
367	Soeriaatmadja	Jawa Tengah		Nasionalis
368	Soerianegara	Jawa Tengah		PKI
369	Soewirdjo	Tegal	1927	PKI
370	Soegeng	Kediri	1927	PKI
371	Soebardi		1927	PKI
372	Soeminto	Semarang	1927	PKI
373	Soelaeman	Semarang	1927	PKI
374	Sedjomartojo		1927	PKI
375	Soehodo	Semarang	1927	PKI
376	Soekandoro	Semarang	1927	PKI
377	Sastrowirijo		1927	PKI
378	Siswoditardjo	Solo	1927	PKI
379	Soetijono	Solo	1927	PKI
380	Soedibio		1927	PKI
381	Soekiban	Surabaya	1927	PKI
382	Soepowo		1927	PKI
383	Soegeng	Surabaya	1927	PKI
384	Sarip		1927	PKI
385	Soekirno		1927	PKI
386	Soeroto		1927	PKI
387	Soegiri		1927	PKI
388	Soelasikan	Semarang	1927	PKI
389	Samirata		1927	PKI
390	Soekendar		1927	PKI
391	Sastrosoewirjo	Cirebon	1927	PKI
392	Soerat Hardjomartojo	Solo	1927	PKI
393	Soenarjo	Lumajang	1927	PKI
394	Sindoeatmo	Jawa Tengah	1927	Nasionalis
395	Salamah	Jakarta		
396	Soewirdjo	Jawa Tengah	1927	PKI
397	Soeko Soemitro	Jawa Tengah	1927	Sarekat Rakyat
398	Soeradi	Jawa Tengah	1927	Sarekat Rakyat
399	Soekodo	Jawa Timur		PKI
400	Soepardi	Jawa Timur		PKI
401	Soemardi	Jawa Timur		PKI
402	Sandjojo	Banten	1927	PKI
403	Sadjaja	Jawa Tengah		PKI
404	Sandjojo	Jawa Barat	1927	PKI
405	Sastrawinata	Jawa Timur		PKI
406	Soetedjo	Jawa Timur		PKI
407	Soewidjo	Tegal		PKI

No.	Nama	Asal	Thn	Keterangan
408	Sjukur, H	Tegal		PKI
409	Soewardjo	Jawa Barat		PKI
410	Soemitro	Madiun		PKI
411	Soetikno	Ternate		PKI
412	Soelaeman	Jogyakarta		PKI
413	Soebono	Banten	1927	Nasionalis
414	Saleh Arief	Surabaya		Nasionalis
415	Soebekti	Jawa Timur		PKI
416	Samsoeri	Pekalongan		Nasionalis
417	Sjariefoedin	Pekalongan		PKI
418	Saring, Ny	Pekalongan		PKI
419	Sjamsoedin Moesarrif	Padangpanjang	1934	PKI
420	Sastrohardjo	Walikukun	1934	Sarekat Rakyat
421	Sindoeatmo	Jawa	1927	PKI
422	Soegoro Atmoprasodjo	Jawa Tengah	1936	Partai Indonesia
423	Safioedin	Jawa Tengah	1927	Nasionalis
424	Sjarief	Surakarta Surakarta	1927	Nasionalis
425	Siswomintardjo	Surakarta	1927	Medan Moeslimin
426	Sismadi Sastrosiswojo	Surakarta	1927	Mawa
427	Sastrowidjono	Surakarta	1927	Mawa
428	Soewarno	Surabaya	1928	PKI/SR
429	Sumadhi	Surabaya	1937	PKI/SR
430	Sunarman	Surabaya	1937	PKI
431	Sukaesih	Semarang	1937	PKI
432	Soekindar	Banten	1927	PKI
433	Sadaja	Sumatera Barat	1927	PKI/SR
434	Said Ali	Cirebon	1927	PKI/SR
435	Soediman		1927	PKI
436	Tjokrosoemarto	Temenggung	1927	PKI
437	Tarlan	Surabaya	1927	PKI
438	Tinggi Loebis	Sumatera	1927	PKI
439	Tatar Siregar	Wonosari	1927	PKI
440	Tahar	Kediri	1937	Guru
441	Taskandar	Kediri	1937	Penjahit
442	Tjiptosoehardjo	Surabaya	1937	Pedagang
443	Teungku Sjahkobat	Aceh	1927	Sarekat Islam
444	Tedjo Martojo		1927	PKI
445	Tb. Agus Soelaeman	Banten	1927	PKI
446	Tju Tong Hin	Serang	1926	PKI
447	Tohir	Labuan Anyer	1927	Petani
448	Tjondroseputro	Rangkasbitung	1926	PKI
449	Tan Tjo	Jawa Timur	1927	PKI
450	Taib	Silungkang	1927	Sarekat Rakyat
451	Talaha Sutan Bagindo	Sawahlunto	1927	Sarekat Rakyat
452	Talaha Datuk di Langik	Silungkang	1927	Sarekat Rakyat
453	Tongong Datuk Basa	Padangpanjang	1929	Sarekat Hitam
454	Tabib Datuk Bagindo S.	Pitalah	1929	Sarekat Tani
455	Tahir Dt Tahalo Basa	Batipuahbaruah	1929	Sarekat Tani
456	Umar	Ciomas	1926	Petani
457	Usman, H	Sirebu Ciruas		PKI
458	Umi binti Abdul Sjukur	Padang	1928	Sarekat Rakyat

No.	N a m a	A s a l	Thn	Keterangan
459	Unggun Khatib Basa	Padangpanjang	1929	Sarekat Rakyat
460	Umar bin Laudin	Batavia	1934	PARI
461	Udin Rahmany, H	Sumatera Barat	1927	PSI
462	Wiranta	Jawa Barat	1937	PKI
463	Winanta	Jawa Barat	1934	PKI
464	Saleh Rais	Padang	1935	Sarekat Rakyat
465	Soeka Sumitro	Jawa	1927	PNI Baru
466	Woro Moenasijah		1927	PKI
467	Woro Ati		1927	PKI
468	Woro Koerijah		1927	PKI
469	Wongsodihardjo	Solo	1927	PKI
470	Wiro S. Miardja	Banten	1927	PKI
471	Wajut	Anyer	1926	PKI
472	Wirosoeharto	Surakarta	1927	PKI/SR
473	Wiromartono	Surakarta	1928	PKI/SR
474	Warjoenah	Pekalongan	1927	PKI/SR
475	Zaini Sutan Maradjo	Silungkang	1929	Sarekat Rakyat
476	Zainuddin Khatib Basa	Sumatera	1927	Sarekat Rakyat
477	Zainoelhasan		1927	PKI
478	Djaetun	Jawa Tengah	1926	PKI
479	Zakaria		1929	Nasionalis
480	Masian	Jawa		
481	Nadji Adenan			
482.	Kadarisman			
483.	Soengeb alias Kartomidjojo			
484.	Joesoef gelar Haji Moehammad			
485.	Noer Ibrahim			
486.	Soetan Moesahoer	Lubuk Buaya Padang	1934	Jurnalis/PKI
487.	Djoewardi			
488.	Sadaroedin	Pamekasan Madura	1934	Propagandis PKI
489.	Effendie Seman alias Oesman	Klaten	1927	PKI
490.	Wirjosoedarmo alias Toegio			
491.	Djojososoekarjo alias Ismangoen			Para Digoelis dari No. 489 s/d 496 diberitakan oleh Koran Pandji Poestaka: Dibebaskan dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing pada tahun 1934
492.	Sosroprawoto alias Ngadiman			
493.	Atmopraseto alias Ngadyo			
494.	Wiriakartono alias Soewadiman			
495	Sadino Martopoespito			

Daftar jumlah tawanan di Boven Digoel dan Tanah Tinggi
menurut catatan
Statistische Zakboekje voor Nederlandsch Indie, 1935[74]

No.	Tahun	Jumlah Tahanan
1.	1931	1.353 Orang
2.	1932	858 Orang
3.	1933	688 Orang
4.	1934	645 Orang
5.	1935	659 Orang

DAFTAR NAMA DIGOELIS YANG MENINGGAL DUNIA SELAMA PEMBUANGAN PADA ZAMAN HINDIA-BELANDA

No.	Nama	Asal Kelahiran	Tgl Meninggal	Sebab Kematian
1	Mangoendjoyo	Semarang	5-4-1928	dimakan buaya
2	Koesmen	Pekalongan	10-7-1920	Malaria
3	Mardjoen	Surabaya	2-4-1930	TBC
4	H. Sjukur	Tegal	2-5-1930	ditimpa kayu
5	Soewirdjo	Tegal	5-7-1930	dipanah orang
6	Goenawan	Bandung	3-8-1931	tenggelam
7	Soemitro	Bandung	13-8-1931	tenggelam
8	Soetikno	Madiun	5-9-1931	malaria
9	Hartodjo	Solo	6-10-1931	TBC
10	Marsoen	Semarang	6-2-1932	malaria
11	Soeleman	Ternate	4-11-1932	dimakan orang
12	Soebono	Jogya	6-12-1932	malaria
13	Hartono	Madiun	9-6-1932	TBC
14	Datuk Gani	Sumut	3-8-1932	TBC
15	Prawirodinoto	Bandung	6-9-1932	malaria
16	Koesno Goenopo	Kediri	7-11-1932	tenggelam
17	K.H. Besur	Banten	3-1-1933	sakit tereng
18	Saleh Arif	Banten	7-1-1933	sakit dada
19	Mat Saleh	Banten	7-1-1933	dipotong orang
20	Ali Archam	Madiun	8-5-1933	TBC
21	R. Soebekti	Surabaya	4-5-1934	sakit nier
22	Karto	Solo	5-10-1934	dibunuh orang
23	Moekandar	Surabaya	10-11-1934	dibunuh orang

[74] J. Kartomi, Margaret, *Gamelan Digul; Di Balik Sosok Seorang Pejuang* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005) hal 59, pada catatan kaki.

24	Moch Tojib	Semarang	15-11-1934	kencing hitam
25	Darman	Banyuwangi	1-1-1935	flu
26	Karni	Ponorogo	6-7-1935	malaria
27	Murat	Makassar	5-8-1935	TBC
28	Samsoeri	Surabaya	2-3-1935	sakit otak
29	Hardjo Wijono	Madiun	20-10-1936	TBC
30	Sjarifuddin	Pekalongan	30-10-1937	malaria
31	Najoan	Menado	5-6-1941	dibunuh orang
32	Moestadjab	Tegal	5-6-1941	sakit
33	Naning	Sumtim	10-11-1941	dibunuh orang
34	Nana	Banten	11-10-1942	dibunuh kawan
35	Datuk Leman	Sumut	25-10-1942	malaria
36	Mohamad Kasan		22-8-1940	TBC
37	Muljadinna	Jepara		

DAFTAR NAMA KELUARGA DAN ANAK-ANAK
DIGOELIS YANG MENINGGAL DUNIA
DI BOVEN DIGOEL
PADA ZAMAN HINDIA-BELANDA

No.	Nama	Asal Kelahiran	Tgl Meninggal	Sebab Kematian
1	Nyi. Bakri	Semarang	5-6-1935	malaria
2	Nyi Saring	Pekalongan	6-7-1936	sakit keluron
3	Nyi Kasan	Semarang	22-3-1938	malaria
4	Nyi Amin	Banten	29-4-1938	malaria
5	Safiuddin	Pekalongan	27-9-1944	malaria

SENARAI BERITA MENGENAI PENDIGOELAN[75]

De Loc, 25 Jan mengabarkan hari ini berangkat 24 orang kominis dari Djokja akan teroes ke Digoel.

Aneta mengabarkan dari Bogor, bahwa beslit pengasingkan 44 orang propagandist kominis soedah ditanda tangani. Mereka itoe semoeanja asal dari Semarang.

Menoeroet beslit Goubernemen adalah 23 orang kominis dari daerah Banjoemas dan Pasoeroean diasingkan ke Digoel. Diantaranja ada jang dari daerah lain. (J.B)

Menoeroet beslit Goebernemen adalah 3 orang kominis dari daerah Bandoeng diasingkan ke Digoel.

Dikirim ke Digoel. Beberapa hari jbl. Dari Djokja telah dikirimkan 10 orang kominis (jang doea perempoean) ke Semarang dan dari sana teroes dikirimkan ke Digoel dengan kapal api Van der Wijk. Tiga orang perempoean dan 5 anak-anak mengikoet mereka itoe.

Kaoem kominis Betawi. Kabarnja dari 196 orang kominis Betawi jang sekarang masih ada dalam tahanan dan menoenggoe kepoetoesan perkaranja, boleh djadi jang 90 orang akan dikirimkan ke Digoel. Lainnja akan diperiksa oleh Landraad atau akan dibebaskan.

Diasingkan ke Digoel. Menoeroet besluit Goebernemen ada 3 orang kominis poela jang diasingkan ke Digoel. Di Djokja polisi telah menangkap seorang kominis, pelarian dari Makassar, bernama Soemardjono. Oentoek penangkapan kominis tsb disediakan premie f 50. ia laloe dikirim kekantor polisi dan akan dikirimkan ke Digoel.

Kominis perempoean. Menoeroet besluit Goebernemen Bok Warjoenah lid S.R. dan P.K.I beroemah di Balamoea, Pekalongan diasingkan ke Digoel.

Markoem Samirata, seorang kominis dari Betawi jang akan diasingkan ke Digoel, tertangkap di Bandoeng. (J.B)

Tanggal 22 Mrt jl dari Semarang telah berangkat 64 orang jang diasingkan ke Digoel dengan kapal perang Java, bersama-sama dengan 53 orang keloearganja. Mereka itoe semua asal dari res. Semarang. (J.B)

---

[75] Dihimpun dari Kroniek dalam Koran *Pandji Poestaka* tahun 1927 dan 1934.

Menoeroet besluit Goebernemen adalah 16 orang kominis dari Residensi Rembang jang diasingkan ke Digoel. Diantara kereka itoe jang 6 orang bangsa Tiong Hoa. (J.B)

Menoeroet besluit Goebernemen tanggal 1 April dari daerah residentie Westerafdeeling (Borneo) ada 11 orang kominis jang diasingkan ke Digoel.(J.B)

Sedikit hari lagi dari Blora akan dikirimkan 14 orang kominis dan doea orang poela dari Bodjonegoro ke Soerabaja. Dari sana mereka akan teroes dikirimkan ke Digoel pada tanggal 12 Mei j.a.d. Doea orang perempoean dan 2 orang anak-anak toeroet ketempat pengasingan itoe. (J.B)

Menoeroet besluit Goebernemen adalah 10 orang kominis dari daerah Djokja dan Kedoe diasingkan ke Digoel. (de.Loc).

Tanggal 2 Juni jbl dari Deli dikirimkan ke Belawan 15 orang kominis jang akan dibawa ketanah Djawa dengan kapal api Melachior Treub. Dari tanah Djawa mereka itoe akan dikirimkan ke Digoel. (Bat.Nbld).

Pengadilan Landraad di Soerabaja telah mendjatoehkan hoekoeman pada anggota2 perkoemp Petjat Tondo Pangroeat, jang telah kerap kali kami kabarkan dalam P.P seperti berikoet: Klaas Wironoto 3 tahoen pendjara, Mas Soewardi 2 tahoen; 5 pesakitan lainnja dibebaskan. Sepandjang kawat Aneta dari Soerabaja anggota-anggota perk. Petjat Tondo Pangroeat jang dibebaskan itoe, ditahan oleh polisi, karena mereka akan dikirimkan ke Digoel. (Bat.Nbld).

Menoeroet besluit Goebernemen ada 10 orang dari daerah Kediri yang diasingkan ke Digoel. (J.B).

Menoeroet besluit Goebernemen ada poela 32 orang yang diasingkan ke Digoel. Mereka asal dari mr. Cornelis, Weltevreden, Krawang, Bandoeng dan Cheribon. (J.B.).

Beberapa hari jbl. Di Poerworedjo polisi telah menangkap kominis Saridjo, anggota D.O (dubbel Organisatie). Ia bekas koeli S.S di Manggarai. Roepanja ia akan diasingkan ke Digoel Djoega dan sekarang ditahan dalam pendjara di Weltevreden. (J.B).

Oleh karena kekoerangan tempat dalam kapal-kapal api jang berlajar di Hindia sebelah timoer, maka pengangkoetan orang-orang kominis jang diasingkan ke Digoel itoe diperhentikan dalam sementara wantoe. Roepanja boelan j.a.d. pengangkoetan itoe akan dimoelai poela.(J.B)

BAB VII

RENUNGAN

Dewan Pekerjaan dan Perburuhan Mackay (Australia, PS) mengajukan protes atas dibuangnya orang-orang Indonesia dari negeri ini ke kamp-kamp penjara, dan minta agar mereka diizinkan tinggal di sini sampai mereka dapat dikembalikan ke Jawa, Sumatera, Ambon, dan Sulawesi sebagai orang-orang yang bebas

.

Telegram A. Carvloth
kepada
Menlu Dr. Hebert Vere Evatt

AKTIVITAS DIGOELIS DI AUSTRALIA

Koloni pengasingan Digoel secara resmi ditutup ketika Jepang datang mengusir Belanda. Pada awal kedatangan pasukan Jepang, sedikitnya 507 tahanan Digoel termasuk 212 orang anggota keluarganya diungsikan dengan kapal *Both* ke Australia.

Mereka membawa serta ke Australia pengalaman perjuangan melawan Belanda, juga penghancuran ideologinya, kenangan tentang perlakuan buruk yang mereka terima, dan harapan-harapan yang telah hidup kembali dari kuburan pemberontakan tahun 1926/27, yang harus mereka tebus dengan kebebasan yang mereka punyai [76].

Di Australia, para digoelis berikut anak dan istrinya dipenjarakan selama beberapa bulan di perkampungan penjara di Liverpool dan Cowra, di pedalaman New South Wales yang masih liar dan selalu diterpa angin dan musim dinginnya sangat mengganggu kesehatan. Kondisi dan perlakuan buruk yang dialami para mantan digoelis di perkampungan penjara Liverpool dan Cowra itu mendapat protes keras dari orang-orang Australia, termasuk dari Partai Buruh, tokoh-tokoh sosialis, dan sejumlah orang komunis di negara kanguru itu.

Protes keras menyangkut perlakuan pemerintah Australia terhadap para bekas digoelis dilakukan dengan cukup luas dan terencana. Protes tersebut umumnya dilakukan melalui berbagai tulisan dalam koran-koran, selebaran-selebaran politik, dan demonstrasi. Semuanya itu

[76] Lockwood, Rupert, *Armada Hitam* (Jakarta, Gunung Agung, 1983), hal 27.

bermuara pada pemberian kelonggaran-kelonggaran tertentu bagi para eksdigoelis untuk ambil-bagian dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Begitu berada di luar kawat berduri Australia, kebanyakan bekas tahanan digoel menunjukkan semangat yang tinggi dalam memperkecil ketertinggalan. Mereka memperluas bacaan, diskusi-diskusi politik, dan memperbaiki penguasaan bahasa Inggris. Para mantan digoelis tersebut berkeyakinan bahwa diperlukan pendekatan-pendekatan dan cara-cara baru untuk melawan kolonial Belanda.

Para pengurus Cenkim, berdiri: Awiscarni, Sudiono, Iskandar Ishaq, Saleh Bratawijaya, Zainun; duduk: Sarjono, Musirin, Jamaluddin Tamin, Bondan, Slamet.

Paling tidak, hal itu tampak dari tingginya intensitas perjuangan *Central Komite Indonesia Merdeka*, Cenkim, yang didirikan pada 21 September 1945 oleh Djamaluddin Tamim, Mohammad Bondan, dan sejumlah mantan orang buangan Digoel lainnya[77].

[77] Reid, Anthony & O'Hare, Martin, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1995), hal 13.

Kawasan Tenggara Australia
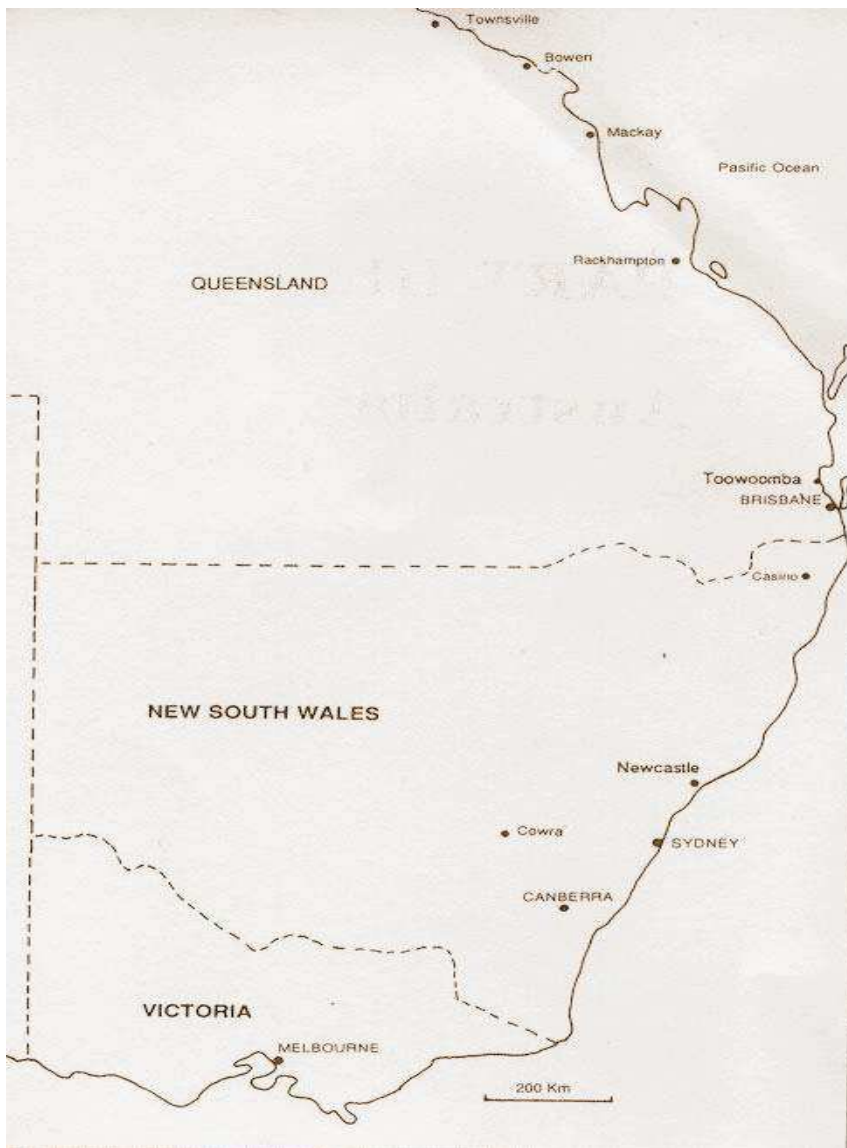
Hingga penghujung tahun 1945, Cenkim, tercatat berulangkali melakukan kampanye politik memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jalur yang ditempuh adalah melalui artikel-artikel untuk koran dan radio, serta penyebaran pamflet politik. Selain itu, mereka juga mengupayakan hubungan yang mendalam dengan tokoh-tokoh Partai Buruh Australia, tokoh-tokoh Serikat Buruh, dan orang-orang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Anthony S. Reid, para aktivis Cenkim merentangkan sejumlah jaringan pada kalangan masyarakat Indonesia yang lebih luas, khususnya di Melbourne, Sydney, Brisbane, dan Mackay. Jaringan-jaringan tersebut dan kawan-kawan mereka orang Australia yang berhaluan kiri seperti Richard Dixon, Gerald Peel, dan Rupert Lockwood, banyak menulis artikel yang mendukung Indonesia dalam pers kiri.

Semuanya itu membuat masalah Indonesia menjadi berita utama dalam pers Australia, terlebih lagi setelah dilakukannya aksi pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang berpangkalan atau berlabuh di Australia. Pemboikotan atas kapal-kapal Belanda itu mendatangkan dampak politik yang cukup besar. Pemboikotan yang dimotori anggota Serikat Buruh Pelabuhan yang bersimpati terhadap Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Australia mengakui kewajibannya terhadap Belanda, tetapi sekaligus tidak ingin membuat gusar Serikat-Serikat Buruh dengan cara mematahkan pemogokan.

Memang harus diakui, perjuangan yang dilakukan para bekas orang buangan Digoel itu bersifat kekiri-kirian. Kenyataan tak terelakan itu disebabkan oleh pengaruh Revolusi Bolsyevik dan Revolusi Cina yang ikut melatarbelakangi perjuangan mereka melawan penjajahan Belanda

Terlepas dari persoalan itu, kemudian hari ternyata sejarah berbicara lain dan mencari jalannya sendiri. Banyak digoelis yang pada masa awal perjuangannya bersifat kekiri-kirian, kemudian tampil sebagai nasionalis dan demokrat sejati.

Walaupun begitu, banyak pula di antara mereka yang lenyap ditelan sejarah. Mereka dilupakan dan terlupakan, serta tidak lagi berperan dalam panggung sejarah Indonesia modern karena pemikirannya tidak lagi sesuai dengan *élan vital* zaman. Apalagi, sejarah hanya mencatat apa-apa yang berbekas dalam konteks zaman. Ketentuan yang berlaku adalah, tidak ada apa-apa dalam sejarah, kecuali peran sentral manusia dan kemanusiaannya dalam melawan ketidak-adilan dan menggugat penghinaan atas *human dignity* (martabat manusia).

Jika demikian halnya, lalu di manakah arti penting koloni pengucilan Digoel bagi generasi baru Indonesia? Hanya sekedar kisah sejarah belakakah? Beragam jawaban interpretatif tentang betapa keji dan

menghinanya tindakan pembuangan/pengasingan atas diri manusia dapat dikemukakan untuk itu.

PELAJARAN DARI DIGOEL

Sejarah memang sering kali berulang, Koloni Digoel boleh saja telah ditutup dan orang belajar banyak tentang kekejiannya. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah Republik Indonesia juga melakukan tindakan yang sama terhadap tokoh-tokoh yang dinilai berseberangan jalan.

Bukti-bukti mengenai tindakan pengucilan, pembuangan atau pengasingan terhadap tokoh-tokoh tersebut cukup panjang deretannya dalam lembaran sejarah Indonesia.

Chaerul Saleh, salah seorang pengikut Tan Malaka, yang pada awal revolusi memimpin *Laskar Rakyat* melawan tentara Belanda, dibuang ke luar negeri dengan alasan melanjutkan studi[78]. Padahal tindakan pembuangan tersebut dilakukan karena Chaerul Saleh dinilai melakukan oposisi bersenjata terhadap keputusan *Konferensi Meja Bundar* yang dalam pandangannya merupakan peleburan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, Chaerul Saleh memilih melanjutkan studi di Belanda, tetapi karena kegiatan politiknya, maka oleh pemerintah Belanda dia dinyatakan *persona non grata (orang yang tidakdisukai),* dan selanjutnya dia pindah ke Bonn, Jerman Barat, pada tahun 1952.

Pada akhir tahun 50-an, tokoh-tokoh PRRI/Permesta seperti Soemitro Djojohadikoesoemo, Des Alwi, Sebastian Tanamas, dan banyak lainnya lagi, melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan dan pemenjaraan oleh Rezim Soekarno. Meskipun bukan dibuang, masa pelarian di luar negeri tersebut umumnya mereka akui menimbulkan rasa terasing yang mendalam akibat putusnya hubungan sosio- kultural, sosio-politik, serta sosio-ekonomi dengan negara dan bangsa Indonesia.

Selain itu, Presiden Soekarno juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dinilai merongrong pemerintahannya. Banyak di antara tokoh yang ditangkap tanpa diadili itu adalah kawan-kawan seperjuangannya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka antara lain adalah mantan Perdana Menteri RI, Soetan Sjahrir, Mr. Moehammad Roem, Prawoto, Soebadio Sastrosatomo, K.H. Z.E Muttaqin, Anak Agung Gde Agung, Mochtar Lubis, Sultan Hamid Algadri II, Buya HAMKA, Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara, mantan Perdana Menteri Mohammad

---

[78] Hadi Soewito, Dra. Irna H.N, *Chaerul Saleh Tokoh Kontroversial* (Jakarta, PT. Mutiara Rachmat, 1993), hal 72-87

Natsir, dll. Perdana Menteri pertama RI, Soetan Sjahrir bahkan meninggal dunia dalam status tahanan pemerintah Soekarno pada tahun 1966, padahal pada tahun-tahun awal proklamasi kemerdekaan, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir dikenal sebagai *tritunggal* yang berperan besar menentukan arah dan haluan Republik Indonesia[79].

Ketika pemerintahan Soekarno tumbang sebagai akibat pemberontakan PKI tahun 1965, penggantinya, Jenderal Soeharto juga melakukan banyak penangkapan, terutama terhadap tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya, juga terhadap orang-orang yang dianggapnya merongrong kekuasaannya.

Banyak di antara orang-orang tersebut dihukum mati, dipenjarakan di Rumah Tahanan Khusus, dan diasingkan ke Pulau Buru, bahkan banyak pula yang dilenyapkan.

Hingga dilepaskannya seluruh tahanan G30S/PKI di Pulau Buru atas desakan dunia internasional pada penghujung dekade 70-an, Pulau Buru dapat dikatakan merupakan *suatu kamp konsentrasi* yang dibangun pemerintah Soeharto bagi orang-orang komunis di Indonesia.

Selain melakukan penangkapan terhadap orang-orang kiri, Rezim Soeharto juga melakukan banyak pemenjaraan terhadap pihak-pihak yang dinilainya "mengganggu stabilitas nasional".

Para politisi dan tokoh yang merasakan langsung betapa bengisnya kebijaksanaan Soeharto tersebut antara lain, Soebadio Sastrosatomo, Bung Tomo, Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, W.S Rendra, H.M Sanusi, Letnan Jenderal (Purn) M. Jassin, Letnan Jenderal (Purn) H.R. Dharsono, A.M Fatwa, dan banyak lainnya lagi.

Selama berkuasa, Presiden Soeharto, juga tercatat melakukan *pembunuhan perdata* terhadap lawan-lawan politiknya, khususnya terhadap tokoh-tokoh Petisi 50 seperti Jenderal (Purn) A.H. Nasoetion, Letnan Jenderal Mar. (Purn) Ali Sadikin, Letnan Jenderal (Purn) H.R. Dharsono, Letnan Jenderal (Purn) M. Jassin, Bakri Tianlean, H.C. Princen, dkk, memang tidak dipenjarakan dalam arti fisik.

Mereka *dicekal* dalam pengertian *diasingkan secara mental psikologis* dari lingkungan pergaulan politik, ekonomi, dan sosial. Banyak orang merasa takut dan terancam jika berhubungan dengan tokoh-tokoh Petisi 50, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang dahulunya erat berkawan dengan tokoh-tokoh tersebut, tidak berani mengundang tokoh-tokoh bersangkutan dalam berbagai acara, termasuk kenduri yang bersifat kekeluargaan dan pribadi sekalipun.

Pada masa-masa akhir kekuasaannya, Soeharto tercatat antara lain menangkap dan memenjarakan Dr. Sri Bintang Pamungkas dan Drs.

---

[79] Lubis, Mochtar, *Catatan Subversif* (Jakarta, Penerbit Sinar Harapan,1980).

A.M. Fatwa. Kedua tokoh tersebut adalah politisi yang berani bersuara lantang menggugat Rezim Soeharto. Sejumlah anak muda yang dinilai rezim Soeharto sebagai *berhaluan kiri* seperti Budiman Sujatmiko, Pius Lustrilanang, Widji Thukul, Dita Indah Sari, Yenny Rosa Damayanti dan banyak lainnya, juga mengalami penangkapan dan penculikan. Hingga hari ini beberapa di antara mereka bahkan tidak diketahui keberadaannya hidup atau mati. Beberapa hari menjelang kekuasaan Soeharto jatuh, terjadi penembakan terhadap beberapa orang mahasiswa yang berdemonstrasi memprotes Rezim Totaliter Soeharto di kampus Universitas Trisakti, Jakarta.

RENUNGAN dan PENGAPUNGAN

Berbagai peristiwa menyangkut penangkapan, pemenjaraan, pengasingan, pengucilan, dan penculikan atas diri manusia memang merupakan lembaran hitam dalam catatan sejarah kekuasaan di Indonesia, setidak-tidaknya sampai Soeharto lengser.

Catatan panjang itu mestinya menyadarkan tiap penguasa di republik ini untuk melakukan perenungan atas amanat kekuasaan yang diembannya. Sejarah panjang koloni Digoel jangan sampai terus berulang sebab pemenjaraan dan pembunuhan terhadap seseorang, sama artinya dengan membunuh peradaban. Setidaknya asumsi ini -dengan meminjam ungkapan Albert Camus- menuntut tiap individu agar meningkatkan keterhirauannya atas nasib manusia dan kemanusiaannya. Orang yang *solider* terhadap derita sesama, umumnya cenderung menjadi *soliter*. Apalagi perjuangan adalah selalu antara individu dan haknya yang keramat untuk mengungkapkan dirinya dan struktur kekuasaan yang meminta pengukuhan, penindasan, dan kepatuhan[80] . Dan seperti juga Albert Camus, di atas segalanya itu, setiap kita memang harus merasa prihatin menyaksikan dunia yang melulu dibangun dengan air mata dan darah[81] .

Hak seseorang untuk memberontak atas ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan harus dihargai dan dinilai secara proporsional. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai hak untuk memberontak (*The*

---

[80] Douglas,William O. (1898-1980), *Hakim Agung Amerika Serikat.*

[81] Camus, Albert, *Resistance, Rebellion, and Death* (New York, Vintage International,Vintage Books, 1988). Albert Camus memenangkan hadiah Nobel untuk Sastra tahun 1957 pada usia 43 tahun. Dalam sambutan pada acara penerimaan hadiah Nobel bidang Sastra itu ia mengatakan bahwa seorang penulis saat ini tidak dapat melayani orang-orang yang membuat sejarah, ia harus melayani orang-orang yang menjadi sasaran sejarah.

right to rebel), kalau melihat ketidak-adilan. Dahulu, kini, dan nanti, kezaliman masih tetap ada. Dahulu, kini, dan nanti, hak untuk memberontak juga tetap harus ada. Hak untuk memberontak tersebut sesungguhnya merupakan hal yang terbukti jauh mengakar dalam sejarah peradaban.

Hal ini setidaknya sejalan dengan pendapat Alexander Solzhenitsyn, seorang pembangkang utama Soviet dan pemenang Hadiah Nobel untuk Kesusastraan tahun 1970. Sastrawan pembela hak azasi manusia ini dengan paksa dibuang dari Uni Sovyet pada awal tahun 1974 setelah menerbitkan *Gulag Archipelago* yang dianggap sebagai salah satu buku terpenting abad ke-20 karena mengupas dengan rinci kekejaman system penjara dan kamp kerja paksa yang didirikan selama pemerintahan Stalin.

Solzhenitsyn yang selama penerbangan pembuangannya ke luar Uni Sovyet menolak makan dan minum karena takut diracun oleh KGB berpendapat bahwa dari dalam jurang-jurang pengap dan gelap inilah, dari bawah reruntuhan inilah kami sekarang meneriakkan suara-suara lemah kami yang pertama. Jika kami menantikan sejarah untuk memberi kami kebebasan dan hak-hak kodrati berharga lainnya, maka kesia-siaanlah yang kami nantikan. Sejarah adalah kita –dan tidak ada alternatif selain memikul beban daripada apa yang yang sedemikian kami dambakan dan mengangkatnya ke luar dari jurang dalam [82]. Lebih lanjut ia menambahkan, "Sepanjang hidup saya.....dan orang-orang yang sependapat dengan saya, kami semua mempunyai satu sudut pandang: lebih baik mati daripada menjadi orang yang dihinakan".[83]

Hal senada juga lantang diujarkan oleh bapak bom Hidrogen Uni Sovyet, Andrei Sakharov, yang diasingkan ke Gorky oleh rezim totaliter Sovyet pada Januari1980 setelah secara pedas mengeritik penyerbuan Soviet ke Afghanistan pada Desember 1979. Suara lantang Sakharov yang mengenai nasib orang-orang yang tidak disenangi oleh penguasa Rusia yang dihimpunnya dalam *Sakharov Speaks*[84] memang sempat menghentak kesadaran dunia tentang betapa mencekamnya hidup dalam rasa takut.

Kendati sampai akhir hayatnya Adrei Sakharov terbilang konsisten memperjuangkan hak-hak azasi manusia, Alexander Solzhenitsyin menganggap perjuangannya nihil, sebab apalah artinya

---

[82] Solzhenitsyn, Alexander, Ed, *From Under the Rubble* (London: Collins&Harvill Press,1975) hal x.

[83] Solzhenitsyn, Alexander, *Warning to the Western World* (London: The Bodley Head and British Broadcasting Corporation, 1976) hal 20-21.

[84] Shakarov, Andrei D, *Shakarov Speaks* (London: Collins & Harvill Press,1974)

memperjuangkan hak azasi manusia jika bom-bom Hidrogen tetap juga dikembangkan.

Alexander Solzhenitsyn dapat dikatakan merupakan pejuang hak azasi manusia yang acapkali berpandangan skeptis dalam memandang dunia. Namun demikian protes-protes kerasnya terhadap ketidak-adilan dapat dikatakan berjaya menempatkan manusia dan kemanusiaannya dalam proporsinya yang benar.

Solzhenitsyn senantiasa menempatkan diri sebagai warga dunia, ia berkeyakinan di mana pun manusia berada jika ia menemukan ketidak-adilan, maka menjadi kewajibannyalah untuk menegakkannya.

Sikap keras Solzhenitsyn pernah membuat pemerintahan Jimmy Carter yang menampungnya menjadi gerah dan tidak enak hati. Secara khusus first lady Amerika Serikat waktu itu, Rosalyn Carter, pernah menyindir Solzhenitsyn sebagai orang yang tidak tahu membalas budi sehubungan beragam kritik yang dilancarkan Solzenitsyn atas berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat dibidang kemanusiaan.

Mengacu kepada pendapat Solzhenitsyin, kiranya di sinilah letak kunci pokok mengapa kekuasaan dan pemerintahan harus dinilai bukan dari prestasi teknisnya semata, melainkan dari posisi serta maknanya bagi manusia, dari nilainya bagi martabat serta nurani manusia.

Kesadaran dan perenungan tentang hakekat kekuasaan dan kebebasan bagi manusia harus diperdalam dan ditingkatkan penghargaan serta pengakuannya sebab saat ini telah terjadi pergeseran cara pandang akibat modernisasi.

Dunia seperti diakui Guru Besar Harvad, Profesor Jeffry Sach, memang tidak lagi terbagi-bagi ke dalam ideologi, tetapi justru terbagi-bagi oleh penguasaan teknologi. Keterbagian dunia secara teknologis itu sudah barang tentu juga menimbulkan ketegangan-ketegangan baru, karena bertemunya kepentingan-kepentingan, harapan-harapan, dan nilai-nilai yang kadang-kadang saling berlawanan.

Semuanya itu dapat menjadi sumber potensi pemenjaraan kembali manusia, setidaknya *pemenjaraan dalam rasa terasing* di tengah deraan gelombang zaman yang cenderung menjebak manusia dalam labirin dolar dan keuntungan berskala instan (seketika).

Setidaknya, kenyataan itu ada benarnya, apalagi, menurut salah seorang pemikir besar pendidikan abad ini, Ivan Illich, disadari atau tidak, kita telah mewujudkan pandangan atas dunia menjadi lembaga-lembaga yang justru membuat kita menjadi tahanan-tahanan mereka. Pabrik-pabrik, media-media berita, rumah-rumah sakit, pemerintah-pemerintah, dan

sekolah-sekolah menghasilkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang terpaket untuk mengendalikan pandangan kita terhadap dunia [85].

Dalam hal ini tampak sekali kecenderungan kehendak berkuasa atau *will to power* dan kehendak mengonsumsi atau *will to consume,* berpotensi menjadi *berhala baru* dalam kehidupan manusia.

Rasa terasing (alienasi) yang dirasakan manusia modern pada hakikatnya sama dengan *pemenjaraan akal budi* secara perdata. Adalah tugas semua pihak untuk menghapus rasa terasing manusia yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman itu, melalui upaya tanpa henti yang memberi arti betapa berharganya hidup dan kehidupan.

Betapa mulianya manusia dan kemanusiaannya, jika simpul perdamaian dapat dipererat di atas kepentingan politik, ekonomi, pribadi, dan kepentingan golongan.

Dalam konteks reformasi Indonesia saat ini, eksplorasi makna atas kebebasan yang diperjuangkan bersama harus dapat dipertanggungjawabkan pada mahkamah hati setiap orang. Kebebasan tidak selamanya harus diatur oleh negara dalam bentuk hukum dan perundang-undangan yang menekan manusia.

Salah seorang pemikir besar abad ke-20, John Dewey, bahkan berpendapat, sudah saatnya perbedaan pandangan dan perselisihan-perselisihan diatasi dengan memperluas penggunaan cara-cara demokrasi, yaitu cara konsultasi, persuasi, perundingan, komunikasi, kecerdasan yang kooperatif, dalam tugas menjadikan politik, industri, pendidikan, dan budaya kita sendiri pada umumnya, sebagai pelayan dan manifestasi yang berkembang dari gagasan-gagasan demokrasi[86].

Pendapat John Dewey tersebut bukan saja harus direnungkan, tetapi terutama sekali harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan tidak boleh menafikan martabat manusia dan beragam perbedaan pandangan yang dimilikinya. Dengan kata lain, -jika kita memodifikasi pendapat Nietzsche- jangan sampai kekuasaan beranggapan bahwa Tuhan telah mati karena setiap orang membunuhnya di dalam hati masing-masing [87].

---

[85]Illich, Ivan, *Perayaan Kesadaran, Sebuah Panggilan untuk Revolusi Institusional* (Yogyakarta, Ikon Teralitera, 2002), hal 189.

[86] Dewey, John, *Budaya dan Kebebasan, Ketegangan antara Kebebasan Individu dan Aksi Kolektif* (Jakarta,Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal 161.

[87] Nietzsche, Friedrich, *Senjakala Berhala dan Anti-Krist* (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1999).

Orang yang tertindas harus dibebaskan dan dicerahkan, demikian pula kekuasaan yang menindas harus pula dibebaskan dan dicerahkan demi terjaganya peradaban di muka bumi [88].

Koloni pengasingan Boven Digoel telah mengajarkan banyak hal kepada kita mengenai betapa meruginya kekuasaan yang menekan (represif), sebab kebebasan sebagai hak mendasar manusia memang tidak akan pernah bisa dihapuskan, bahkan oleh maut sekalipun!

---

[88] Fraire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta, LP3ES, 1995).

Epilog

Di Digoel: Ketika Pemerintahan Kolonial Membangun Kubangan Derita

Oleh: Anhar Gonggong*

1. Pendahuluan: Kekerasan Kolonialis dan Kehendak Merdeka

Kekerasan Kolonialis dan Kehendak Merdeka; dua kata dengan makna yang berbeda. Kekerasan adalah cara sebuah kekuasaan pemerintah penindas untuk menaklukkan, menakuti, 'menjerakan' warga koloninya yang berani menentangnya. Apapun tujuan dan motifnya. Kehendak merdeka, adalah sikap dari warga terjajah tertindas untuk menempatkan dirinya di dalam bangsa-negara merdeka. Kekerasan adalah alat menindas; sedangkan kehendak merdeka menuju kepada tujuan pembebasan. Kekerasan membuahkan derita; kemerdekaan adalah tekad untuk mengakhiri derita. Kekerasan kolonialis dan kehendak merdeka, merupakan dua hal yang saling berhadapan di dalam sebuah ruangan wilayah, yaitu ruang Hindia Belanda, Nederlandsch-Indie, wilayah jajahan dengan warga tertindas.

Digoel. Sebuah nama tempat di Nederlandsch-Indie; tempat dengan 'derita yang pindah bersama dengan terbuangnya sejumlah warga negeri jajahan yang berkehendak untuk merdeka. Mereka dituduh melakukan pemberontakan, atau dituduh akan menjadi pemimpin bangsanya untuk meruntuhkan kekuasaan kolonial 'yang sah'. Atau karena dianggap sebagai warga yang berideologi kiri atau komunis dan karena membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Karena itu harus ditangkap!

Digoel dengan demikian adalah simbol dari kekerasan-angkuh kekuasaan pemerintah kolonial, tetapi sekaligus juga adalah pertanda historis dari keberanian-ketabahan dari warga negeri jajahan demi sebuah cita-cita untuk hidup bersama, yaitu kehendak merdeka!

---

* Dr. Anhar Gonggong adalah seorang sejarawan terkemuka, pengajar Agama dan Nasionalisme di Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia; juga mengajar Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Atmajaya, Jakarta, serta pengajar Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta; sekarang adalah deputi Menteri Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan berpegang pada cita-cita merdeka itu, maka sejumlah warga negeri jajahan telah 'bersedia dan atau dipaksa' untuk memasuki wilayah kubangan derita yang bernama Digoel itu. Ada sejumlah orang yang dibuang ke kubangan derita itu karena dituduh terlibat pemberontakan PKI di Banten dan di Silungkang. Tetapi ada juga yang dibuang ke sana karena dituduh sebagai pemimpin-penggerak bangsanya, dan karena itu dianggap sebagai penentang pemerintah kolonial Nederlandsch-Indie. Tokoh-tokoh utama seperti Bung Hatta dan Bung Sjahrir adalah di antara mereka yang dibuang ke Digoel karena anggapan seperti yang disebut terakhir itu.

Digoel, kubangan derita bagi pejuang negeri jajahan memang merupakan tempat yang digambarkan dapat menghilangkan nyawa. Ada buaya di sungai yang siap untuk menerkam. Ada ular yang siap mematok dengan bisa yang mematikan. Ada nyamuk malaria yang siap menyerang warga yang dihinggapinya. Bung Hatta di dalam Memoar, menyebutkan bahwa selama di Digoel dua kali ia diserang sakit malaria. Agar sembuh maka *'saban hari aku harus menelan pil kinine 6 biji sehari, di makan tiga kali'.*

Pak Maskoen, yang diadili bersama dengan Bung Karno di Pengadilan Bandung pada tahun 1930, dan kemudian setelah lepas dari penjara bergabung dengan Bung Hatta dan Sjahrir di dalam PNI-Pendidikan, juga ikut dibuang ke Digoel bersama Bung Hatta dan Bung Sjahrir, pernah menceritakan kepada saya tentang situasi 'yang menakutkan' di Digoel itu. Menurut pak Maskoen (tahun 1979) tidak mungkin seseorang tahanan dapat melarikan diri dari Digoel, karena alamnya yang ganas dan juga buaya dan ular siap memangsa.

2. Perlawanan dengan Strategi Otak: Kesediaan Melampaui Diri

Orang-orang yang amat pantas untuk mendapatkan sebuah penghargaan: Pahlawan bangsa dan Kemanusiaan adalah mereka yang memiliki kesediaan melampaui dirinya. Artinya, mereka telah melakukan tindakan, baik individual maupun kolektif, secara bersama yang amat tinggi risikonya bagi kelangsungan hidup diri pribadinya. Risiko itu dalam bentuk kelangsungan hidup yang menderita. Ia tidak memikirkan masa depannya, tetapi bahkan yang ada di dalam benaknya –dan ini menjadi kekuatan utama pendorongnya untuk berjuang- hanya untuk kepentingan warga setanah airnya yang harus menjadi merdeka dan bebas dari penindasan kolonial.

Kesediaan melampaui diri itu berkembang di dalam sebuah strategi baru untuk melanjutkan perlawanan, sebagaimana yang pernah

dilakukan pada abad-abad yang lampau. Strategi baru perlawanan yang saya maksudkan itu ialah *strategi otak* yaitu strategi yang terutama bertumpu pada pikiran-pikiran rasional dengan menggunakan 'alat-alat modern' yang mulai berkembang sejak awal abad ke-20; periode ini di dalam sejarah pembentukan diri kita sebagai bangsa, dikenal dengan *Sejarah Pergerakan Nasional.* Di dalam periode ini kita, para pejuang kemerdekaan itu menggunakan alat-alat perlawanan modern seperti organisasi -yang diawali oleh Boedi Oetomo, Indische Partij, dan Sarekat Islam- rapat-rapat, kongres-kongres, media cetak, dan dialog, baik lisan maupun tulisan.

Tentu saja di dalam periode ini telah berkembang pelbagai ideologi yang menjadi ideologi dari partai-partai, organisasi-organisasi yang bersangkutan. Atau individu-individu yang tampil di dalam kancah pergerakan kemerdekaan itu. Ada organisasi yang mulai berangkat dari landasan pendidikan-kebudayaan; ada yang berdasar pada nasionalisme, ada yang Islamistis, tetapi juga ada ideologi Marxis-Sosialisme dan Marxis-Komunisme.

Ada hal yang menarik, dilihat dari sisi pandangan pemerintah kolonialistik, yaitu mereka yang dianggap sebagai individu, kelompok organisasi, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah, mereka dianggap komunis atau setidak-tidaknya sosialis dan/atau 'kiri'. Sejalan dengan itu, pada awal tahun 1910-an-1920-an, memang telah berdiri organisasi-organisasi yang dianggap marxis-sosialis atau kiri. Bahkan kemudian berdiri pula organisasi yang berideologi Marxis-Komunis. Semua organisasi kiri itu sangat merisaukan para pemegang kekuasaan kolonialis di Nederlandsche-Indie. Karena itu, untuk meredam kekuatan penentang kekuasaan kolonialis itu, maka kekerasan telah menjadi alternatif terbaik mereka. Alternatif itu dilakukan dengan jalan penangkapan, pembuangan –antara lain ke Digoel, Bandaneira- dan tekanan-tekanan lainnya.

Tetapi tekanan-tekanan pemerintah kolonialis itu, terlihat tidak menyurutkan semangat dari para pejuang yang berpegang pada cita-cita 'kehendak merdeka' itu. Kekuatan cita-cita kehendak merdeka, melampaui kekuatan –dengan ganjaran yang menakutkan- penekanan yang diberikan oleh pemerintah kolonial, situasi sepi yang menakutkan, bisa-bisa ular dan gigitan buaya yang ganas, tidaklah menyurutkan usaha mereka untuk mewujudkan kehendak merdeka yang diperjuangkan sebagai tujuan bersama dan untuk sesama warga negeri jajahan. Mereka yang dibuang itu sebagian besar warga yang teguh pendirian! Itulah salah satu unsur utama dari mereka yang tampil sebagai pemimpin utama dan sejati. Itulah yang ditempuh di dalam melakukan perlawanan dengan strategi otak!

3. Di Digoel: Ketika Kolonialis Membangun Kubangan Derita.

Pada bagian 2 di atas, selintas telah disebutkan gambaran tentang situasi Digoel dan apa yang dialami oleh Bung Hatta dan Pak Maskoen. Di dalam buku Purnama Suwardi, yang berjudul: *Koloni Pengucilan Boven Digoel* ini disebutkan tujuan penguasa kolonial Belanda untuk menjadikan wilayah Timur Indonesia 'yang terpencil' ini sebagai tempat buangan, yaitu:

1. Menyembunyikan sekaligus mengasingkan para pejuang agar mereka tidak lagi menyuarakan gagasan-gagasan perlawanan mereka.
2. Menjauhkan pengaruh para pejuang terhadap rakyat.
3. Memutuskan kontak politik para pejuang, baik kontak politik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Mematahkan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda melalui pengucilan total yang meruntuhkan moril para pejuang.

Dengan tujuan seperti di atas, maka Digoel memang merupakan tempat yang tepat. Tujuan untuk mengisolasi para pejuang itu tentu pada batas tertentu mungkin dikatakan berhasil. Di balik keberhasilan tujuan kolonialistis itu, maka terhadap para pejuang 'buangan' itu, terjadi pula akibat lain, yaitu pen-(derita)-an. Di dalam buku ini situasi derita itu dikutip berdasar surat seorang digulis kepada Bung Hatta, dikatakan antara lain:

"…Digoel tidak lagi sebuah tempat. Kematian terus-menerus tersenyum kepada kami. Ia menjadi timbunan penderita paru-paru dan penderita malaria, penderita sakit jiwa dan setengah gila, di bawah panas menyengat matahari khatulistiwa yang tidak kenal ampun, di kelilingi oleh rawa-rawa yang tidak sehat, di tengah-tengah hutan belantara yang tidak bisa ditembus…"

Tentang betapa penderitaan menerpa para pejuang kemerdekaan itu, Pak Maskoen –yang juga telah disebut di atas- memang menyebutkannya sebagai *penderitaan yang tidak ada samanya.* Diperlukan ketabahan yang sangat handal untuk bertahan menghadapi siksaan di dalam tempat pembuangan kaum pejuang yang membahayakan itu.

Pak Maskoen menceritakan bahwa pada suatu ketika ia dan tiga orang kawannya 'diperintahkan' untuk mengambil sesuatu di hutan. Mereka berangkat berempat dengan bekal makanan, yang tentu saja terbatas. Setelah empat hari empat malam berjalan, dan kemudian hendak pulang, tetapi kesasar. Celakanya, persediaan makanan mereka sudah habis. Mereka berusaha untuk mendapatkan binatang, biasanya biawak yang cukup besar, untuk dimakan bersama. Tetapi seharian mereka tidak memperolehnya.

Di tengah sama-sama kelaparan itu, merekapun berunding. Keputusannya, kalau pada esok hari mereka tidak menemukan binatang untuk dimakan bersama, maka dengan sangat sedih-pedih, mereka bersepakat bahwa salah seorang di antara mereka harus rela menjadi 'korban' yang disantap. Kesepakatan kanibalis itu (akan) dilakukan melalui undian di antara mereka. Semalaman mereka berusaha untuk menggunakan panca indra untuk memantau adanya binatang yang mungkin ditangkap. Tetapi tidak berhasil. Pagi hari menjelang siang hari sebagai batas untuk melakukan perjanjian kanibalis itu, mereka disertai rasa khawatir dan rasa lapar dan amat capek mencari binatang yang mungkin dimakan. Nah, menjelang siang hari itu, mereka berhasil menemukan seekor biawak yang lumayan besar. Mereka berhasil menangkapnya! Termenung, kemudian… menangis terharu. Dan berangkulan. Dan dengan itu kesepakatan kanibalis itu tidak jadi dilakukan!

Digoel memang diciptakan oleh pemerintah kolonial, sebagai kubangan derita bagi pemimpin dan pejuang pergerakan kemerdekaan, yang dianggap membahayakan kekuasaan kolonial dan mereka yang berhasil ditangkap. Tentu saja langkah itu dianggap kekuasaan kolonial sebagai langkah yang menguntungkan posisi mereka. Tentu kekuasaan kolonial itu berharapakan berhasil mengatasi tindakan-tindakan kekuatan para pejuang kemerdekaan itu; mereka mengharapkan para pejuang itu jera, takut untuk menjalankan perlawanan mereka; apalagi mereka yang telah menjalani pembuangan ke tempat-tempat terpencil dan membuahkan trauma psikis itu.

Tetapi usaha pendigulan dengan tujuan agar para pejuang itu jera dan/atau takut untuk melanjutkan perjuangannya, ternyata gagal! Semua 'bekas' buangan dan tahanan, baik di penjara-penjara, di Bandaneira maupun mereka yang diasingkan di Digoel dan juga yang dibuang ke negeri Belanda, tidak pernah surut dari tujuan kehendak merdeka. Begitu keluar dari penjara atau begitu sampai di tempat asalnya dari pembuangan, maka segera pula mereka merancang siasat dan langkah tindakan baru untuk melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan kehendak merdeka itu. Bung Karno melakukan itu, Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangoenkoesoemo juga seperti itu. Bung Hatta dan Bung Sjahrir seperti itu juga. Penjara dan suasana menakutkan di tempat pembuangan seperti yang dialami di Digoel, ternyata, sekali lagi, tidaklah menjerakan mereka. Bahkan sebaliknya para pejuang ini makin setia kepada cita-citanya, hendak segera merdeka! Tekanan dari kubangan derita di Digoel, gagal menyurutkan semangat juang mereka, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda.

4. Penutup: Makna di Alam Merdeka

Digoel dibangun untuk kubangan derita bagi pejuang yang kehendak merdeka. Kini sudah memasuki usia yang ke-59 kita sudah memproklamasikan kemerdekaan bangsa yang sekaligus menegakkan sebuah negara baru. Selama usia kemerdekaan itu, ternyata kita belum sepenuhnya berhasil untuk memberi makna merdeka, yaitu mengakhiri derita.

Dalam bentuknya yang lain, tampak 'masih ada' kubangan-kubangan derita yang justru diciptakan oleh pemerintah republik yang merdeka ini. Derita tampak tidak dengan sendirinya segera hilang di alam merdeka ini. Dilihat dari sisi ini, amat besar artinya tulisan dari seorang 'muda; PNS yang masih menyimpan idealis ini, yang sedang ada di tangan Anda ini, yang telah menyajikan fakta-fakta sejarah tenang Digoel, yaitu Digoel yang dibangun sebagai kubangan derita oleh kekuasaan kolonial.

Sajian rekan Purnama Suwardi di dalam buku ini, paling tidak merupakan sebagai bahan refleksi untuk memahami betapa usaha menjadi merdeka dan 'kembali terhormat', bukanlah pekerjaan yang tanpa risiko yang amat berat. Refleksi itu mudah-mudahan dapat memancing kita untuk membangun kesadaran bersama dengan tekad bersama pula, untuk mempertahankan keberadaan bangsa dan negara kita, di dalam masa yang selama mungkin atau selama-lamanya.

Dari lubuk hatiku,
Aku bersumpah kepadamu,
Cinta yang setia bagimu,
Sampai keliang kuburku.

Segala kedudukan,
Segala kepunyaanku,
Wahai tanah airku,
Adalah anugerahmu.

(Heinrich Heine)

LAMPIRAN 1:

ROESOEH DI SOEMATERA BARAT[89]

Menoeroet berita dalam *Java Bode*, di Siloengkang dan Sidjoendjoeng (Soematera Barat) terdjadi roesoeh. Dibawah ini kami petik beberapa kabar kawat yang berhoeboengan dengan hal-ihwal kedjadian pada 1 / 2 Januari:

Tangsi *veldpolitie* di Moeara Kalaban diserang oleh 50 orang merah, jang mendjadi bagian dari soeatoe kawanan banjaknya 200 orang, dan jang bermaksoed menjerang Sawahloento. Serangan itoe dapat ditolak. Serdadoe dalam auto dari Sawahloento, akan membantu Moeara Kalaban, ditengah djalan bertemoe dengan 40 orang peroesoeh. Mereka itoe segera diserang serdadoe, dan terpaksa lari dengan meninggalkan 2 orang kawannja jang mati dan seorang jang dapat ditangkap. Tali kawat ke Siloengkang, dipoetoeskan.

Pagi-pagi benar toean Ass. Resident Sawahloento dengan 3 ½ brigade veldpolitie madjoe ke Siloengkang. Dihalaman station bertemu dengan 60 orang, jang ketika dipanggil boeat diperiksa apakah mereka itoe orang baik-baik apa djahat, 20 orang antaranja laloe menjerang dengan mempergoenakan sendjata tadjam. Doea orang veldpolitie mendapat loeka jang tiada membahajakan djiwanja; antara mereka itoe ada 7 orang jang mati. Sisanja, sebahagian lari dan sebahagian poela dapat ditangkap. Barang-barang station diroesakkan, wangnja ditjoeri mereka itoe. Roemah *stationschef* dilempar dengan bom, laloe dibakar. Stationschef itoe tiada meninggalkan pekerdjaannja. *Hulppost Commies* lari, dan beloem ketemoe. Seorang pegawai station Siloengkang dan anak stationschef, mendapat loeka parah.
Kereta api jang pertama dari Solok, antara Soengailasi dengan Siloengkang, ta' dapat madjoe, karena djalannja dihalangi. Kereta api itoe kembali lagi ke Soengailasi. Tali kawat dari Solok ke Tanah Datar, dipoetoeskan, tetapi pada hari itoe djoega dibetoelkan lagi. Roemah klerk di Soengailasi dan roemah klerk di Solok, demikian poela roemah Ass. Resident dan Penghoelu pasar, diroesakkan. Isinja lari.

Pagi-pagi poekoel ½ 8, seboeah *omnibus* dari Tandjoeng Ampaloe, jang mengibarkan bendera merah, ditahan oleh Demang, dimoeka tangsi veldpolitie di Moeara Kalaban. Dalam omnibus itoe doedoek Datoek Bidjo kepala peroesoeh dengan sepoeloeh orang kawannja. Sekaliannja bersendjata,

[89] Disalin dari Koran *Pandji Poestaka* No. 1 dan 2, Taoen V, 7 Januari 1927, hal 17.

antaranja kedapatan 2 boeah senapang beaumont. Laloe mereka itoe sekalian ditangkap.

Djalan ke Sidjoendjoeng, ta' dapat dilaloei. Oleh karena itoe toean Ass. Resident dari Sawahloento mentjoba ke Moeara Kalaban dengan kereta api. Ketika keloear dari terowongan (tunnel), toean ass. Resident bersoea dengan 20 orang jang bersendjata kelewang. 12 orang dari pada mereka itoe ditangkap, jang lain lari. Setelah lewat kampoeng Padang Siboesoek, kereta api itoe ditembaki peroesoeh, dan tembakan itoe dibalas. Lewat 2 K. M. semoea rel kereta api terlepas sekeroepnja. Kepala kampoeng Padang Siboesoek diboenoeh.

Ketika toean Ass. Resident kembali dari Sawahloento ke Siloengkang, dibatas bertemoe dengan kira-kira 30 orang. Mereka itoe disoeroeh menjerahkan dirinja. Seorang antaranja hendak menjerang, laloe ditembak mati. Pada majatnja kedapatan seboeah pistol browning dan satoe kantoeng berisi peloeroe.

Opzichter djalan diboenoeh dengan setjara boeas dalam roemahnja. Djoeroetoelis Negerihoofd kedapatan setengah mati dalam roemahnja dekat tiga majat. Empat orang goeroe sekolah Goebernemen semoea orang Boemipoetra diboenoeh.

Segenap Soengailasi sehingga ke Sidjoendjoeng, berontak.

Pada hari Minggoe sore, dikirimkan dari Padang Pandjang ke Sawahloento, tiga brigade serdadoe dalam auto. Didjambatan Padang Siboesoek auto serdadoe itoe ditembaki peroesoeh. Seorang Letnan kena tembak, laloe mati. Ada 10 orang peroesoeh jang mati dan 4 ditangkap.

Kepala hulppostkantoor Siloengkang, diboenoeh. Kantor itoe ditoetoep oentoek sementara. Perdjalanan kereta api antara Solok dan sawahloento lewat djoeroesan Kalaban, sebagian dihapoeskan dahoeloe. Negerihoofd Siloengkang diboenoeh oleh seorang moeda dengan pistol. Pemboenoeh itoe lari.

Di tandjoeng Ampaloe ada tiga boeah auto memakai bendera merah, soedah ditahan. Auto itoe dari Fort de Kock, lewat ditempat tadi pada djaoeh malam. Seorang dari pada isinja, ialah Abdoel Moenap bekas goeroe sekolah desa di Soengailasi.

Padang, 5 Jan. sekalian orang laki-laki di Padang Siboesoek, telah menjerahkan dirinja. 267 orang tangkapan dibawa oleh militer ke Sawahloento.

LAMPIRAN 2[90]:

SOEMATERA BARAT

Kabar-kabar jang kita dapat batja dalam s.s. kabar dari Soematera Barat menerangkan belaka, bahwa pergerakan kaoem pemberontakan disana soedah sampai pada achirnja, negeri soedah aman kembali dan pasar-pasar soedah moelai ramai poela, lebih lebih sedjak kepala perampok atau pemberontak jang bernama si Patai telah dapat ditewaskan.
Soenggoehpun pergerakan itoe soedah mengehendaki banjak koerban, tetapi patoet poelalah kita mengoetjapkan terima sjoekoer, karena lekas dapat dipadamkan, dan jang demikian itoe teroetama atas oesahanja militer. Djika tidak demikian allahoe robbi banjaknja darah akan mengalir di Soematera Barat. Menoeroet kabar jang kita batja dalam soerat-soerat kabar jang baroe sampai ini, banjak benar kominis itoe menjediakan sendjata, baik bom, maoepoen sendjata tadjam. Akan memberi pemandangan kepada pembatja betapa pergerakan jang telah dilakoekan berboelan-boelan dengan tiada diketahoei oleh Bestuur, dibawah ini kami toe3liskan beberapa petikan dari kabar-kabar jang kita dapat batja dalam soerat-soerat kabar dari Padang.

Perkara bom.

Di Emmahaven, dibelakang roemah polisi-opziener Wunnick terdapat satoe boengkoesan berisi 29 boeah bom. Berhoeboeng dengan hal itoe, didoega, bahwa atas orang-orang jang bekerdja di Emmahaven koeminisme berpengaroeh jang besar poela. Jang demikian telah ternjata pada koeli-koeli Kolendienst disana. Dalam waktoe jang terachir ini boekan sedikit djoemlahnja koeli-koleli Kolendienst menjerahkan kartjis merahnja kepada militer dan Bestuur.
Di Air Angat (Kota Baroe) dekat Padang Pandjang Bestuur telah mendapat 12 boeah bom jang terkoeboer dalam tanah. Berhoeboeng dengan ini beberapa pendoedoek disana telah ditangkap, diantaranja ada djoega perempoean.

Koerban bom.

Dikota Lawas (Padang Pandjang) kira-kira 7 boelan jang laloe seorang anak jang beroemoer kira-kira 8 tahoen disoeroeh membawa bom. Anak itoe loeka-loeka dan seboeah matanja roesak. Selama itoe anak itoe dapat disemboenjikan dalam kampoeng dengan loeka-loekanja jang hingga sekarang beloem semboeh. Baroe sekarang ia dapatdiserahkan berobat pada dokter.

[90] Disalin dari Koran *Pandji Poestaka*, 1927, hal 308.

Demikian dikampoeng Kalawi dekat Padang soedah kedapatan poela seorang bernama M.Jatim jang badannja dan tangannja soedah pada roesak, karena letoesan bom. Diapoen soedah dapat menjemboenjikan badannja kira-kira enam boelan lamanja. M.Jatim disoeroeh membawa bom kian kemari, dan pada soeatoe kali ia terdjatoeh dan bom itoepoen metetoes. Dada, kaki dan tangan M. Jatim soedah loeka, sedang moekanja soedah gemboeng.
Ketika didjalankan pemeriksaan, maka ternjata bahwa kepala pembikinan bom itoe ada di Soengai Poear (dekat Fort de Kock). Seorang Djawa bernama Tadjoedin mengadjarkan kepada anak negeri disana bagaimana memboeat bom itoe. Kaleng-kaleng besi bakal bom, jang diboeat di Soengai Poear itoe dikirim ke Padang Pandjang, dan mereka dari Padang pergi mendjempoetnja kesana. Tadjoedin sampai sekarang beloem dapat ditangkap.
Di Loeboek Mintoeroen soedah tertangkap seorang moerid Tadjoedin jang menoeroet keterangannja ia soedah memboeat 230 boeah bom.

Bom penghantjoerkan
djalan kereta api.

Politie di Padang telah dapat mengetahoei bahwa seorang bernama Bakar, bekerdja pada Werkplaats S.S.S. di Padang, ada menjimpan banjak bom.
Setelah didjalankan pemeriksaan maka kedapatan bahwa kira-kira 350 meter dari djalan kereta api di Loeboek Lintah ada disemboenjikan 23 boeah bom jang goenanja boeat hantjoerkan djalan kereta api itoe.

Sendjata tadjam.

Sendjata tadjam jang dapat ditangkap politiepoen banjak poela. Di Kota Lawas kedapatan dalam satoe loebang 200 boeah kelewang, 77 pisau belati dan 10 boeah browning. Di Panindjawanpoen, lain dari pada beberapa boeh browning, ada kedapatan djoega banjak kelewang.

Beberapa pemoeka kominis
Jang telah tertangkap.

Seorang bernama Rahman telah ditangkap di Padang Pandjang, ia bersalah telah mengerasi anak-anak masoek dalam perkoempoelan padvinders merah (I.P.O). anak-anak itoe mesti membeli kartjis f 0.25 seboeah.
Pakih Tahir, kemenakan si Patai, jang soedah sekian lama beroentoeng dapat meloepoetkan dirinja, soedah ditangkap oleh militer di Kloemboek. Pakih Tahir inilah jang menembak kepala kampoeng di Blanti, dekat Padang.
Sirin jang terkenal sebagai tangan kanannja si Patai soedah menjerahkan diri pada politie, sebab takoet akan bertemoe dengan militer.

Orang ini soedah doea boelan lamanja ditjari, dan menoeroet keterangannja selama itoe ia djadi koesir sado ke Padang, atau pergi ke Padang Pandjang, Fort de Kock, Pajakoemboeh, Solok dan lain-lain tempat berdjoealan sajoer-sajoeran. Waktoe tjapgomeh jang baroe laloe inipoen ia ada datang melantjoeng kekota Padang, sedang politie dan militer siboek mentjarinja.

LAMPIRAN 3:

ORANG-ORANG KOMINIS SAMPAI KE TANAH MERAH (BOVEN DIGOEL)[91]

Dalam *Soer.Handelsblad* ada ditjeriterakan tentang kedatangan orang-orang kominis ke Boven Digoel, demikian kami tiroekan seperloenja:

Pada tanggal 10 Maart kira-kira djam 6 sore, kapal *Fomalhout* meninggalkan Ambon dengan membawa orang-orang kominis jang bermoela diinterner dan dikirimkan ke Boven Digoel. Dikapal itoe diadakan segala peratoeran jang baik belaka. Bersama dengan mereka itoe, berangkat poela anak bini orang-orang militer, jang telah berangkat lebih dahoeloe, jaitoe, sementara dalam kapal, kelihatan senang belaka, diantaranja ada jang menjanji-njanji pelbagai matjam lagoe Belanda.

Ketika kapal moedik disoengai Digoel, maka nampak disepandjang tepi soengai itoe lebih ramai dari pada dihari 22 djanuari, ketika kapal pertama kali djalan disitoe. Roepanja hilir-moedik kapal itu, menerbitkan minat dalam hati orang Papoea; tidak sadja mereka itoe menampakkan dirinja ditepi soengai, akan tetapi berani poela menghampiri bivak (pemondokan) orang-orang militer. Mereka itoe sangat soeka akan pakaian, pakaian jang kojak-kojak dan tiada terpakai lagi, diambilnja dan laloe dipakainja. Barang-barang jang telah biasa, ditoekar dengan barang-barang orang Papoea, koerang disoekainja; lebih soeka pada pakaian jang rombeng-rombeng, jang diboeangkan orang.

Kira-kira poekoel 6 sore, kapalpoen memboeang saoeh (djangkarnja) di Tanah Merah. Dengan segera Kapten Becking datang kekapal. Ketika itoe, boelan amat terang benderang bagaikan siang. Hawapoen amat sedjoeknja dan njaman rasanja. Pada malam itoe djoega, orang-orang naik kedarat. Betapa girangnja, orang-orang militer ketemoe lagi dengan anak-bininja, ta' oesah dikatakan lagi disini.

Kominis-kominis jang diinternerpoen siboek bersiap dan laloe naik kedarat, dibawa pergi keroemah-roemah (barak) jang telah disediakan baginja oentoek sementara. Baharoe sadja datang, laloe mereka itoe diberi makan mentah, seperti: beras, ikan kering, katjang hidjau d.l.l. Lain dari pada itoe, tiap-tiap

[91] Disalin dari Koran *Pandji Poestaka,* 1927, hal 562.

keloearga (gezin) mendapat soeatoe tjerek, sehelai kain seprai kelamboe, minjak tanah, d.l.l.

Setelah selesai segala sesoeatoenja, maka tenang dan tedoehlah didalam barak itoe. Ta' kedengaran barang satoepoen, manandakan mereka itoe lelap menghilangkan lelahnja dan merasai lezatnja malam jang pertama dinegeri baharoe.

Pada keesokan harinja, pagi-pagi, orang-orang interniren itoe, dipanggil menghadap Kapten Becking. Kepada mereka itoe diberi tahoekannja, apa jang dikehendaki, oleh Kap. Becking dari mereka itoe dari dianja. Tiap-tiap seorang laki-laki diberi seboeah kapak dan seboeah patjul. Mereka itoe mesti bekerdja, oentoek keperloeannja sendiri dan oentoek bersama.

Waktoe bekerdjanja, diatoer seperti bagi orang-orang militer, jaitoe dari setengah toedjoeh sampai poekoel sebelas dan dari poekoel satu sampai poekoel empat sore.

Pada hari-hari jang pertama, mereka itoe mengoeroes dan mengatoer baraknja masing-masing dan akan menjelesaikan barak bagi saudara-saudaraja jang akan menjoesoel sedikit waktoe lagi. Kajoe dan ramoe-ramoean jang lain, soedah banjak disediakan.

Kampoeng jang akan diboeat oentoek mereka itoe, djaoehnja kira-kira 3 K.M dari barak sekarang. Oentoek djalannja sodah dirambah, lebarnja 3 M. lebih. Djika djalan itoe soedah siap, laloe akan dimoelaikan memboeat kampoeng itoe menoeroet tjontoh jang soedah diboeat. Tiap-tiap orang akan mendapat soeatoe pekarangan; disitoe nanti didirikan seboah roemah menoeroet tjontoh poela. Kemoedian masing-masing akan diberi sebidang tanah oentoek perladangannja.

Kapten Becking berdjandji hendak memberikan segala toendjangan jang boleh diberikannja, asal sadja mereka itoe menjatakan soeka bekerdja. Kepada orang interneran itoe diberi tahoekan poela, bahwa tiap-tiap seminggoe sekali akan dibagikan makanan mentah dan keperloean-keperloean jang lain.

Telah diadakan seboeah toko Goebernemen jang menjediakan keperloean orang-orang interneran itoe. Akan tetapi boekan maksoed Goebernemen akan mengadakan toko itoe oentoek selama-lamanja, melainkan kemoedian akan diserahkan kepada ichtiar mereka itoe sendiri. Apa poela, karena diantara mereka itoe didapati djoega interneran Tiong Hoa, kira-kira maksoed itoe ta' akan tinggal djadi maksoed sadja.

Dalam barak itoe ada soeatoe roemah sakit ketjil, dimana orang-orang sakit boleh mendapat pertolongan dokter. Doea orang perempoean interneran itoe, dahoeloenja soedah pernah djadi djoeroe rawat orang sakit (verpleegster). Kedoeanja soeka mendjadi verpleegster poela, bagi sekalian pendoedoek Boven Digoel itoe.

Agar soepaja Boven Digoel itoe dapat diasingkan dari doenia loear, maka ta' diizinkan penangkap-penangkap boeroeng oentoek masoek kesana. Poen orang-orang lain tidak diloeloeskan poela datang ketempat interneran itoe. Dan lagi segala soerat-soerat dari dan oentoek orang-orang interneran, diperiksa doeloe dengan teliti.

Pekerdjaan orang-orang interneran itoe, diperiksai oleh opsir-opsir tentera. Hasilnja menjenangkan hati. Baroe beberapa hari sadja, peri hal mengatoer dan membereskan barak itoe, telah soedah. Poen barak oentoek orang-orang kominis jang akan datang menjoesoel, telah selesai poela diboeat. Setelah itoe moelai mereka itoe memboeat djalan jang terseboet diatas. Sesoedah lima hari bekerdja, dapatlah mereka itoe menjiapkan djalan sepandjang 1. K.M.

Agaknja, soedah lebih dahoeloe dipikirkan oleh mereka itoe, hendak berladang berkeboen didalam hoetan jang akan mendjadi negeri baharoe itu. Tandanja kenjataan, bahwa mereka itoe ada membawa pelbagai matjam bidji-bidjian oentoek benih.

Pada 17 Maart, kapal *Fomalhout* milir, hendak mendjempoet kapal *Java* jang membawa orang-orang kominis poela.

Bersama dengan jang belakangan itoe, sekarang di Boven Digoel, ada 105 orang kominis, dan sama sekali dengan anak bininja ada 200 orang. Tanah Merah jang dahoeloe soenji itoe, sekarang mendjadi soeatoe kampoeng jang ramai.

LAMPIRAN 4:

Roesoeh di Soematera Barat[92]. Djamil telah ditembak mati oleh serdadoe dekat Siloengkang. Dialah algodjo jang melakoekan pemboenoehan pada 3 Jannuari di Siloengkang atas orang-orang jang diberi hoekoeman mati oleh pengadilan kominis (pihak kominis mengadakan sematjam hakim sendiri). Demikian poela Djamoe, kepala kominis jang soedah menjerang tangsi polisi di Oeara kalaban, soedah ditembak mati. Sebelas orang kepala kominis lagi, jang masih ditjari. Banjak sendjata, obat, bedil, bom dan dinamit telah kedapatan oleh serdadoe patroli.
Boei Sawahloento sekarang berisi 1100 orang peroesoeh.
Hadji Samad seorang dari dapa kepala pemimpin kominis di Ommelanden soedah ditangkap. Banjaknja jang soedah ditangkap di Ommelanden, hingga sekarang sama sekali ada 156 orang.

De Loc, 25 Jan mengabarkan[93], hari ini berangkat 24 orang kominis dari Djokdja, akan teroes ke Digoel dengan expres Djokdja-Weltevreden. Diantara mereka itoe ada seorang dari Klaten bernama Djoewardi, minantoenja Hadji Misbach. Ia berangkat ke Digoel dengan isterinja.

Pakih Ain dan **Mohamad Zen gelar H. Radjo Dilangit**, pemimpin-pemimpin hoeroe hara di Siloengkang jang dihoekom mati oleh Landraad Sawahloento, telah memasoekkan revisie atas poetoesan Landraad itoe.[94] (Kedoea orang ini dahoeloe telah menerangkan dimoeka hakim bahwa mereka soedah rela dihoekoem mati, tetapi mereka meminta soepaja pesakitan jang lain-lain minta dibebaskan karena menoeroet keterangannja, mereka berdoealah jang haroes memikoel segala kesalahan itoe, sebab jang lain-lain itoe berboeat sesoeatoenja karena adjakannya. *Red. P.P*).
Demikian poela Hadji Mohamad Noer Ibrahim dan Hadji Imam Samad, jang dihoekoem oleh Landraad Padang dengan 7 dan 6 tahoenpoen, soedah memasoekkan revisie. *(Sin.Sum)*.

Landraad Sawaloento telah mendjatoehkan hoekoeman atas perkara pemboenoehan lentan Simons, sebagai berikoet[95]:

---

[92] Ibid, hal 135.
[93] Ibid, hal 135.
[94] Ibid, hal 1017.
[95] Ibid, hal 1157.

Doea poeloeh tahoen pada Latip gelar Malin Sati dan Taleman gelar Datoek Bagindo Ratoe.
Lima belas tahoeh pada Kirahat gelar Radjo Penghoeloe, Leman gelar Moentiko Radjo, Badoe Hamid gelar Bandaro Koening, Mat Rasit, Marah Insan gelar Ampang Sati dan Binoe gelar radjo Garik.
Doea belas tahoen pada Loeki gelar malin Pandeka, Mat Aban, Marah Djilin, Saoen gelar soetan Bagindo, Mirin gelar Malin Malelo, Mat Ahat, Salam, Mat Doeni gelar Malin Soetan, Mak sarak gelar radjo di langit, Gindo Rahim gelar Pandoeko Sati, Marah amat dan Mak Joenoek gelar Pandoeko Soetan.
Enam belas tahoen pada Maritin gelar Hadji Samsoedin.

Mendapat ampoen[96]. Moh. Zen gelar Radjo dilangit dan Abdoerrahim alias Pakih Ain gelar Pakih Maradjo, jang dihoekoem mati oleh pengadilan Landraad Sawahloento pada 1 Januari 1927 dan disahkan oleh djoestisi Padang pada 26 juli 1927 mendapat ampoen dari S.P.T.B. G. Djenderal dan hoekoemannja dioebah mendjadi hoekoeman pendjara selama hidoep.
Permohonan ampoen 7 orang pesakitan poela jang masing-masing dihoekoem 20 tahoen oleh Pemerintah ditolak.
Saleh dan Salman, jang dihoekoem di Landraan Pandeglang, karena terda'wa dalam perkara pemboenoehan waktoe timboel peroesoehan kominis itu, dan jang telah disahkan oleh Djoestisi Betawi pada tanggal 19 Aug jl., mendapat ampoen S.P.T.B. G Djenderal; hoekoemannja dioebah mendjadi hoekoeman pendjara selama hidoep. Empat pesakitan lainnja jang masing-masing mendapat hoekoeman pendjara 20 tahoen, jang djoega mohon ampoen, ta' dikaboelkan.

Aneta mengabarkan[97], bahwa commissie van onderzoek di Bantam ta' berkeberatan atas kembalinja Kijai Tjaringin ke Bantam. Toen Adviseur Inl. Zakenpoen setoedjoe soepaja Kijai tsb. Dizinkan kembali kenegerinja, karena ia telah jakin betapa boeroeknja pengaroeh pergerakan kominis di Bantam itoe. Tetapi t Pokerol Djenderal dan t. Goebernoer Djawa Barat ta' bersetoedjoe. (Bat Nbld.)

[96] Ibid, hal 1516.
[97] Ibid, hal 824.

LAMPIRAN 5:

DERMA OENTOEK KOERBAN KOMINIS[98]

Sebagai telah diketahoei pembatja, orang-orang kominis di Siloengkang (Soematera Barat) telah menjerang goeroe-goeroe sekolah Goebernemen disana. Tiga orang goeroe telah ditembak mati, jaitoe: t.t. Mahmoed gelar Soetan Moedo, Djoemin gelar Soetan Maroehoem dan Rachman gelar Soetan Maradjo.

Gambar ini, ialah gambar pertoendjoekan adat lembaga zaman poerbakala di Alam Minangkabau, jang beloem selang berapa lama telah ditonilkan diroemah bola di Batoesangkar. Jang mengatoer dan mengadakan tonil itoe, ialah soeatoe Komite, jang terdiri dari goeroe-goeroe sekolah belaka, jaitoe: Soetan Tan Amas, Hoofdonderwijzer sekolah No. I, Voorzitter; Sjafiah, Hoofdonderwijzeres Kopschool, Ondervoorzitster; Noeraniah, Onderwijzeres H.I.S, Secretaresse dan beberapa orang Komisaris.

Maksoed komite itoe, ialah berdaja oepaja akan memoengoet wang derma oentoek penjantoeni anak isteri amtenar jang mati djadi koerban peroesoehan di Siloengkang itoe.

Jang mati telah tentoe koeboernja, tetapi jang hidoep, jaitoe anak isteri jang tinggal, betapakah halnja kalau tidak ditolong bersama-sama dengan oesaha dan dengan wang. Moga-moga dapatlah sedikit mendjadi sitawar sidingin kepada mereka itoe.

---

[98] Ibid, hal 435.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah,Taufik dkk, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta,LP3ES, 1998).
2. Anderson, B.R.O.C, *Java in a Time of Revolution* (Cornell University Press, 1972).
3. Amran, Rusli, *Cerita-Cerita Lama dalam Lembaran Sejarah* (Jakarta, Balai Pustaka, 1997).
4. Anwar, Rosihan, *Kisah-Kisah Jakarta Menjelang Clash ke-I* (Jakarta, Pustaka Jaya, 1979).
5. Anwar, Rosihan, *Mengenang Sjahrir* (Jakarta, PT. Gramedia, 1980).
6. Anwar, Rosihan, *Quartet, "Pertemuan dengan Empat Sahabatku"* (Jakarta, Yayasan Soedjatmoko dan Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, 1999).
7. Algadri, Hamid, *Suka Duka Masa Revolusi* (Jakarta, UI Press, 1991).
8. Algadri, Hamid, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab* (Jakarta, Penerbit Sinar Harapan, 1984).
9. Algadri, Hamid, *Mengarungi Indonesia, Memoar Perintis Kemerdekaan* (Jakarta, Penerbit Lentera,1999).
10. Bijkerk, J. C, *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat Yang Lebih Baik* (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1988).
11. Badrika, I. Wayan, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum* (Jakarta, Erlangga, 1994).
12. Bondan, Molly, *Spanning a Revoution!* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992).
13. Camus, Albert, *Resistance, Rebellion and Death* (New York, Vintage International, Vintage books, 1988).
14. Departemen, P dan K, *Sejarah Pendidikan di Indonesia* (Jakarta, Dep. P & K, 1993).
15. Departemen, P dan K, *Sejarah Pendidikan di Sumatera Barat* (Jakarta, Dep. P & K, 1997).
16. Departemen, P dan K, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta, Dep. P & K, 1996).
17. Departemen Penerangan, *Propinsi Sumatera Tengah* (Djakarta, Departemen Penerangan, 1954).

18. Dewey, John, *Budaya dan Kebebasan, Ketegangan antara Kebebasan Individu dan Aksi Kolektif* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998).
19. Djaya, Tamar, *Pusaka Indonesia*, (Jakarta, Kementerian P.P. dan K, 1951).
20. Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta, LP3ES, 1995).
21. Freire, Paulo, *Pedagogi Hati* (Jakarta, Penerbit Kanisius, 2001).
22. Gde Agung, Anak Agung, *Twenty Years Indonesia Foreign Policy* (Mouton & Co, The Hague, 1973).
23. Gie, Soe Hok, *Di Bawah Lentera Merah* (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya-Frantz Fanon Foundation, 1999).
24. Gie, Soe Hok, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan* (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1997).
25. Göksoy, Dr, *The Policy of the Dutch Colonial Government towards Islam in Indonesia* (Herndon Virginia, USA,the annual AMSS conference's paper, Oktober 1996).
26. Halim, *Di antara Hempasan dan Benturan* (Jakarta, Arsip Nasional, 1981).
27. Hamka, Dr, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta, Firma Tekad, 1963).
28. Hatta, Mohammad, *Memoir* (Jakarta, Tinta Mas, 1979).
29. Hatta, Mohammad, *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta, Tinta Mas, 1959).
30. Hatta, Mohammad, *Mendayung di antara Dua Karang* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976).
31. Husein, Ahmad dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950* (Jilid I&II, BPSIM, 1991).
32. Hutagalung, Arie Sukanti, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia* (Jakarta, CV. Rajawali, 1984).
33. Hasjmy, A, *Tanah Merah, Digul Bumi Pahlawan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976).
34. Hegel, G.W.F., *Filsafat Sejarah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002).
35. Hiqmah, Nor, *H. M. Misbach, Sosok dan Kontroversi Pemikirannya* (Yogyakarta, Yayasan Litera Indonesia, 2000).
36. Hartoko, Dick, *Bianglala Sastra, Bunga rampai sastra Belanda tentang kehidupan di Indonesia* (Jakarta, Penerbit Djambatan, 1985).

37. Husein, Ahmad, dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*, Jilid I & II (Jakarta, BPSIM, 1978).
38. Illich, Ivan, *Perayaan Kesadaran, Sebuah Panggilan untuk Revolusi Institusional* (Yogyakarta, Ikon, 2002)
39. Ingleson, John, *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta, LP3ES, 1988).
40. J. Kartomi, Margaret, *Gamelan Digul; Di Balik Sosok Seorang Pejuang* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005).
41. Kartodikromo, Mas Marco, *Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).
42. Kahin, Audrey**,** *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi 1945-1950* (MSI Cabang Sumatera Barat dan Ex-CTP/Pelajar Pejuang Kemerdekaan RI, 1997).
43. Kahin, Audrey, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989).
44. Kahin, George McT, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, Cornell University Press, 1952).
45. Kuruwaib, A., *Sekelumit Data Sejarah Nasional di Merauke* (Merauke, Cetak Stensil, 1989).
46. Kusuma Sumantri, Mr. Iwa, *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah*, Otobiografi, Editor : Nina H. Lubis (Bandung, CV. Satya Historika, 2002).
47. Legge,J. D, *Soekarno* (Sidney,Allan and Unwin,1978).
48. Legge,J. D, *Intellectuals and Nationalism in Indonesia* (Cornell Modern Indonesia Project, 1988).
49. Jarvis, Helen, *Tan Malaka, Pejuang Revolusioner atau Murtad?* (Yogyakarta, Cermin, 2000).
50. Lockwood, Rupert, *Armada Hitam* (Jakarta, Gunung Agung, 1983).
51. Loebis, Aboe Bakar, *Kilas Balik Revolusi; Kenangan, Pelaku, dan Saksi*, Edisi II (Jakarta, UI Press, 1995).
52. Malaka,Tan, *Dari Penjara ke Penjara*, Jilid I, II & III (Jakarta, Teplok, 2000).
53. Malaka, Tan, *Massa Aksi* (Jakarta, Komunitas Bambu, 2000).
54. Malaka, Tan, *Menuju Republik Indonesia* (Jakarta, Komunitas Bambu, 2000).
55. Martamin, Mardjani, dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982)

56. Murodi, *Melacak Asal-Usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat* (Jakarta, Logos, 1999).
57. Moehamad, Djoeir, *Memoar Seorang sosialis* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997).
58. Mustoffa, Sumono, *Sukarni dalam Kenangan Teman-Temannya* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1986).
59. Mrazek, Rudolf, *Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996).
60. Mrazek, Rudolf, *Tan Malaka* (Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1999).
61. Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta, Pustaka Grafiti Utama, 1989).
62. Nasution, A. H, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung, Angkasa, 1977).
63. Nasution, A. Muluk, *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927* (Jakarta, Mutiara, 1979).
64. Noer, Deliar**,** *Moh. Hatta, Biografi Politik* (Jakarta, LP3ES, 1990).
65. Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta, LP3ES, 1982).
66. Nietzsche, Friedrich, *Senjakala Berhala dan Anti-Krist* (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1999).
67. Nietzshe, Friedrich, *Ecce Homo* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1992).
68. Nietzsche, Friedrich, *Genealogi Moral* (Yogyakarta, Jalasutra, 2001).
69. Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta, Gramedia, 1987).
70. Onghokham, *Rakyat dan Negara* (Jakarta, LP3ES dan Pustaka Sinar Harapan, 1991).
71. *Pandji Poestaka* No. 1 dan 2, Tahoen V, 7 Januari 1927.
72. *Pandji Poestaka* No. 1, Tahoen XII, 2 Januari 1934.
73. Paprindey, Elias, *Lintasan Peristiwa Sejarah Bangsa Indonesia Menuju Prolog Trikora di Papua Barat* (Jayapura, 2000).
74. Pigay BIK, Decki Natalis, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 2001).
75. Poeze, Harry, *Tan Malaka I* (Jakarta, Pustaka Grafiti Utama, 1988).
76. Poeze, Harry, *Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945* (Jakarta, Pustaka Grafiti Utama, 1999).

77. Reid, Anthony J.S, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996).
78. Reid, Anthony J.S & O'Hare, Martin, *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1995).
79. Rivai, dr. Abdul, *Student Indonesia* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).
80. Rose, Marvin, *Indonesia Merdeka; Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta, Gramedia, 1991).
81. Roem, Mohammad, *Bunga Rampai dari Sejarah* (Jakarta,Tinta Mas, 1984).
82. Salim, Chalid I. F. M, *Limabelas Tahun Digul; Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea* (Jakarta, Bulan Bintang, 1977).
83. Sastrosatomo, Soebadio, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987).
84. Sjahrir, Sutan, *Renungan dan Perjuangan*, Kumpulan Surat terjemahan H. B. Jassin (Jakarta, Penerbit Djambatan dan Dian Pustaka, 1990).
85. Sjahrir, Sutan, *Perjuangan Kita* (Rumah Sjahrir-Banda Naira, 1988).
86. Sjahrir, Sutan, *Nasionalisme dan Internasionalisme* (Rumah Sjahrir-Banda Naira, 1988).
87. Sjahrir, Sutan, *Politik dan Diplomasi* (Sekretariat PSI, 1956).
88. Sjahrir, Sutan, *Sosialisme Indonesia Pembangunan –kumpulan tulisan* (Jakarta, Leppenas 1982).
89. Sjahrir, Sutan, *Pikiran dan Perjuangan -kumpulan tulisan* (Yogyakarta, Jendela, 2000).
90. Solzhenitsyn, Alexander (ed), *From Under the Rubble* (London; Collins & Harvill Press, 1975).
91. Solzhenitsyn, Alexander, *Warning to the Western World* (London :The Bodley Head and British Broadcasting Corporation, 1976).
92. Shakarov, Andrei D, *Shakarov Speaks* (London: Collins & Harvill Press, 1974).
93. Suharto, A. Sandiwan, *Perkeretaapian Indonesia, Sebuah Tantangan* (Jakarta, Manajemen, PPM Nomor 16 Tahun III Mei-Juni 1983).
94. Sudharta M.A, Tjokorda Rai dkk, *Kalender 301 Tahun* (Jakarta, Penerbit Dharmasuta, 1980)
95. Surianingrat, Bayu, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta, Dewaruci Press, 1981).

96. Suwardi, Purnama, *Sejarah Indonesia Modern dalam Dialog* (Jakarta, Cakrawala, 2000).
97. Suwardi, Purnama, *Oleh-oleh dari Boven Digoel* (Jakarta, Lensa, No.10, Edisi Juli 1992).
98. Shiraisi, Takashi**,** *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997).
99. Shiraisi, Takashi, *Hantu Digoel, Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial* (Yogyakarta, LKIS, 2001).
100. Soejono, Eri Soedewo, *Mahasiswa '45 Prapatan 10 dan Pengabdiannya* (Bandung, Patma, 1984).
101. Soebardjo, Ahmad, *Kesadaran Nasional, Sebuah Otobiografi* (Jakarta, Gunung Agung, 1978).
102. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* (Jakarta, 1963).
103. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994).
104. Toer, Pramoedya Ananta, *Cerita dari Digul* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2001).
105. Toer, Pramoedya Ananta, *Sang Pemula* (Jakarta, Hasta Mitra, 1985).
106. Tamim, Djamaluddin, *Dua Puluh Satu Tahun Kematian Tan Malaka 1949-1970* (Jakarta, 1970).
107. Widiyanto, P, *Osa Maliki dan Tragedi PNI*, (Jakarta, Prisma Edisi Khusus 20 Tahun, 1991).
108. Yuliati, Dewi, Dra. MA, *Semaoen,Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang* (Semarang, Penerbit Bendera, 2000)

PERIHAL PENULIS
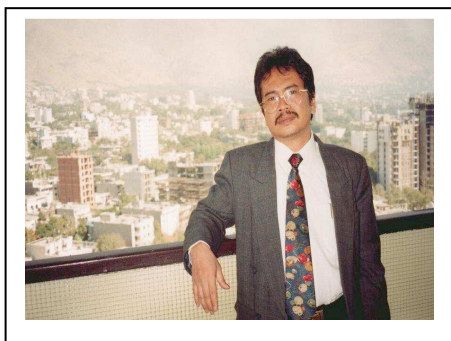
Purnama Suwardi lahir di Selayo, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 8 November 1961. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi ditamatkannya di Jakarta. Ia mulai bekerja di lingkungan Subdit Pemberitaan TVRI Jakarta sejak tahun 1987 sebagai reporter dan redaktur.

Pada bulan April 1991, ia melakukan wawancara eksklusif dengan Wakil Ketua MPR/DPR RI Saiful Sulun mengenai dominasi berlebihan pemerintah dalam beragam aspek kehidupan ketatanegaraan. Wawancara tersebut menjadi bahan wacana pada berbagai media masa selama lebih dari dua minggu. Pada tahun 1992, Purnama Suwardi mengikuti pertemuan para produser acara televisi Asia-Pasifik, ABU, di Kuala Lumpur, Malaysia. Masih pada tahun yang sama, *feature*nya: *Laila, I Can't Stop Loving You,* dinilai *very interesting* dan *exellent* oleh Executive Producer 1992 ABU Co-production. *Feature* dokumenter mengenai kehidupan lansia di Indonesia itu disulih-suarakan ke dalam enam bahasa dan disiarkan pada 22 negara di Asia Pasifik. Ia pernah menjadi anggota tim ad-hoc Media Center Departemen Penerangan RI, keanggotaan tersebut membuatnya diserahi tugas untuk melakukan berbagai wawancara menyangkut politik dan demokrasi sepanjang tahun 1998 saat mana reformasi bergulir kencang.

Pada tahun 2000, bukunya berjudul *Sejarah Indonesia Modern Dalam Dialog* diterbitkan. Buku tersebut merupakan transkripsi wawancaranya dengan sejumlah tokoh yang terlibat dalam pasang-surut sejarah Indonesia. Adapun buku *Koloni Pengucilan Boven Digoel* yang ditulisnya ini embrionya dilahirkan oleh reportase mengenai koloni Digoel yang dilakukannya pada tahun 1991. Perluasan kajian atas reportase tersebut dipersiapkannya cukup lama dan hasilnya adalah buku ini.

Purnama Suwardi memperoleh pendidikan dibidang pertelevisian antara lain dari AIBD, CNN, ABC Australia, dan Balai Diklat TVRI. Ia juga pernah mengajar di Balai Diklat TVRI dan beberapa Lembaga pendidikan Pertelevisian untuk mata kuliah Teknik Reportase, Dasar-dasar Jurnalistik, dan Teknik Wawancara.

Banyak mata acara TVRI pernah diproduksinya, seperti *Dian Rana, Spektrum, Gelar Wicara, Pilar Otonomi, Dialog Khusus,* dan Siaran-siaran Langsung Kenegaraan.

Saat ini Purnama Suwardi diserahi tugas sebagai Kepala Stasiun TVRI Sumbar. Sebelumya ia adalah Manajer Promosi dan Penjualan pada Unit Kerja Pemasaran Kantor Pusat Perjan TVRI. Selain itu ia juga pernah menjadi Sekretaris pada Presidium Federasi Serikat Pekerja TVRI.

Komunisme,
terutama sebagai suatu filsafat,
suatu ideologi yang sangat kompleks,
hanya mungkin dipakai sebagai simbol
bagi banyak orang, untuk menyatakan
ketidakpuasan sosial ekonomi.
Justru yang tidak dapat dimengerti
adalah pemberontakan komunis
pada tahun 1926-1927 itu.

(Dr. Onghoham)

Penjajahan Belanda itu menghimpun kekuatan
dengan perkawinan ratio modern dengan feodalisme Indonesia,
sehingga menjadi contoh fasisme yang terutama
dari fasisme di bumi.
Fasisme ini jauh sebelum fasisme Hitler dan Musolini. Jauh sebelum
mereka mendirikan kamp-kamp konsentrasi Buchenwald atau Belsen,
Boven Digoel sudah lebih dulu diadakan.

(Soetan Sjahrir)

Wahai kalian, kaum cendekiawan dan kaum nasionalis,
kami mohon kalian tidak terlalu keras menilai kami
orang buangan, sampah masyarakat kalian,
kaum buangan politik di Digoel.
Kepada kalian orang indonesia kami tujukan kata-kata ini.
Renungkanlah, untuk apa kami telah berjuang
dan menderita.
Ingatlah bahwa kami telah berkorban
untuk
'Ibu Indonesia'

(Mas Marco Kartodikromo)